

The background of the cover features a collage of Indonesian Rupiah banknotes in various denominations, including 5000, 100000, 20000, and 1000000. A silver coin is also visible in the lower-left quadrant. The text is overlaid on this background.

PENGANTAR **Sistem Ekonomi** *Indonesia*

Disusun Oleh :
Isna Fitria Agustina, M.Si.

Buku Ajar
Pengantar Sistem Ekonomi Indonesia

OLEH:
Isna Fitria Agustina, M.Si.



Diterbitkan oleh
UMSIDA PRESS
Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo
ISBN: 978-623-464-086-1
Copyright©2024.

Buku Ajar Pengantar Sistem Ekonomi Indonesia

Penulis: Isna Fitria Agustina, M.Si.

ISBN: 978-623-464-086-1

Editor: Monicha Puspitasari, M.KP.

Copy Editor: Wiwit Wahyu Wijayanti, S.H

Design Sampul dan Tata Letak: Andra Pratama Julianto, S.A.P.

Penerbit: UMSIDA Press

Redaksi: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jl. Mojopahit No 666B Sidoarjo, Jawa Timur

Cetakan Pertama, Januari 2024

Hak Cipta © 2024 Isna Fitria Agustina, M.Si.

Pernyataan Lisensi Creative Commons Attribution (CC BY)

Buku ini dilisensikan di bawah Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International License (CC BY). Lisensi ini memungkinkan Anda untuk:

Membagikan — menyalin dan mendistribusikan buku ini dalam bentuk apapun atau format apapun.

Menyesuaikan — mengubah, mengubah, dan membangun karya turunan dari buku ini.

Namun, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi dalam penggunaan buku ini:

Atribusi — Anda harus memberikan atribusi yang sesuai, memberikan informasi yang cukup tentang penulis, judul buku, dan lisensi, serta menyertakan tautan ke lisensi CC BY.

Penggunaan yang Adil — Anda tidak boleh menggunakan buku ini untuk tujuan yang melanggar hukum atau melanggar hak-hak pihak lain.

Dengan menerima dan menggunakan buku ini, Anda menyetujui untuk mematuhi persyaratan lisensi CC BY sebagaimana diuraikan di atas.

Catatan: Pernyataan hak cipta dan lisensi ini berlaku untuk buku ini secara keseluruhan, termasuk semua konten yang terkandung di dalamnya, kecuali disebutkan sebaliknya. Hak cipta dari website, aplikasi, atau halaman eksternal yang dijadikan contoh, dipegang dan dimiliki oleh sumber aslinya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Buku Ajar Pengantar Sistem Ekonomi Indonesia dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa halangan yang berarti. Shalawat dan salam selalu kami sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Buku ini ditulis sebagai referensi atau bahan rujukan yang dijadikan pegangan oleh mahasiswa untuk mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Buku Ajar Pengantar Sistem Ekonomi Indonesia ini memuat teori dan aplikasi yang dapat memudahkan pembaca menghubungkan materi perkuliahan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Sasaran utama buku ini adalah Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sedangkan sasaran umum adalah untuk Mahasiswa dan masyarakat umum.

Buku Ajar Pengantar Sistem Ekonomi Indonesia dapat dipergunakan acuan bagi mahasiswa dalam mempelajari dan memahami dengan cermat teori-teori ekonomi utamanya dalam sejarah perekonomian Indonesia, ekonomi politik, pendapatan nasional, perdagangan internasional, kebijakan fiskal, krisis ekonomi, dan pilar ekonomi Indonesia. Buku ini juga dapat digunakan referensi dalam menganalisis fenomena yang terjadi pada lingkungan yang dapat diidentifikasi sebagai masalah ekonomi.

Buku ini ditulis dalam 7 Bab yang memuat materi dasar Sistem Ekonomi Indonesia. Buku ajar harus digunakan sebagai referensi utama dalam memberikan materi perkuliahan terkait mata kuliah yang diampu dan dapat dikembangkan sebagai diskusi di kelas dengan mengaitkan fenomena mutakhir yang sedang berkembang di masyarakat.

Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis mengharapkan agar pembaca menggunakan informasi lain baik berupa buku atau jurnal yang relevan untuk memperkaya wawasan dan makna dari Buku Ajar Sistem Ekonomi Indonesia.

Penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar buku ajar Sistem Ekonomi Indonesia ini semakin berkualitas dan tentunya sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku. Terimakasih.

Penulis

Isna Fitria Agustina, M.Si.

DAFTAR ISI

BAB 1 Pengertian dan Sejarah Ekonomi

1.1 Pendahuluan.....	1
1.1.1 Deskripsi Singkat.....	1
1.1.2 Kompetensi Dasar.....	1
1.1.3 Indikator.....	1
1.2 Pembahasan.....	1
1.2.1 Pengertian dan Sejarah Ekonomi	1
1.2.2 Periode Ekonomi	3
1.3 Penutup.....	6
1.3.1 Rangkuman.....	6
1.3.2 Evaluasi.....	7
1.3.3 Daftar Pustaka.....	7

BAB 2 Ekonomi Politik

2.1 Pendahuluan.....	9
2.1.1 Deskripsi Singkat.....	9
2.1.2 Kompetensi Dasar.....	10
2.1.3 Indikator.....	10
2.2 Pembahasan.....	10
2.2.1 Struktur Perekonomian Indonesia	10
2.2.2 Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia	12
2.2.3 Pembangunan Ekonomi Indonesia	12
2.2.4 Tiga Paham Sistem Ekonomi	14
2.2.5 Revolusi Industri dan Dinamisme Sistem Ekonomi	16
2.3 Penutup	16
2.3.1 Rangkuman.....	17
2.3.2 Evaluasi.....	17
2.3.3 Daftar Pustaka.....	17

BAB 3 Konsep Pendapatan Nasional

3.1 Pendahuluan.....	19
3.1.1 Deskripsi Singkat.....	19
3.1.2 Kompetensi Dasar.....	19
3.1.3 Indikator.....	19
3.2 Pembahasan.....	19
3.2.1 Pembangunan Ekonomi Nasional	19
3.2.2 Sumber Pendapatan Negara	21
3.2.3 Gross Domestic Bruto	23
3.2.4 Gross National Bruto	24
3.3 Penutup	25
3.3.1 Rangkuman.....	25
3.3.2 Evaluasi.....	26
3.3.3 Daftar Pustaka.....	26

BAB 4 Perdagangan Internasional Indonesia

4.1 Pendahuluan.....	27
4.1.1 Deskripsi Singkat.....	27
4.1.2 Kompetensi Dasar.....	27
4.1.3 Indikator.....	27

4.2 Pembahasan.....	28
4.2.1 Pengertian Perdagangan Internasional	28
4.2.2 Kerjasama Ekonomi Antara Indonesia dan Pelaku Perdagangan Internasional.....	28
4.2.3 Zona Perdagangan	30
4.3 Penutup	35
4.3.1 Rangkuman.....	35
4.3.2 Evaluasi.....	35
4.3.3 Daftar Pustaka.....	35
 BAB 5 Kebijakan Fiskal Indonesia	
5.1 Pendahuluan.....	37
5.1.1 Deskripsi Singkat.....	37
5.1.2 Kompetensi Dasar.....	37
5.1.3 Indikator.....	37
5.2 Pembahasan.....	37
5.2.1 Orientasi Kebijakan Fiskal.....	38
5.2.2 Fungsi Kebijakan Fiskal.....	39
5.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	40
5.2.4 Kebijakan Ekonomi Indonesia	41
5.2.5 Garis Waktu Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia	44
5.3 Penutup	48
5.3.1 Rangkuman.....	48
5.3.2 Evaluasi.....	49
5.3.3 Daftar Pustaka.....	49
 BAB 6 Krisis Ekonomi	
6.1 Pendahuluan.....	50
6.1.1 Deskripsi Singkat.....	50
6.1.2 Kompetensi Dasar.....	50
6.1.3 Indikator.....	50
6.2 Pembahasan.....	51
6.2.1 Pengertian Krisis dan Resesi.....	51
6.2.2 Krisis Ekonomi Asia 1997.....	52
6.2.3 Dampak Krisis Ekonomi Asia Terhadap Perekonomian Indonesia.....	52
6.2.4 Kondisi Sosial Politik Indonesia Saat Krisis 1998	54
6.2.5 Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis Moneter 1998	55
6.2.6 Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis Ekonomi	55
6.2.7 Periode Kepemimpinan Presiden Megawati-Joko Widodo	56
6.3 Penutup	61
6.3.1 Rangkuman.....	61
6.3.2 Evaluasi.....	61
6.3.3 Daftar Pustaka.....	62
 BAB 7 Pilar Ekonomi Indonesia	
7.1 Pendahuluan.....	63
7.1.1 Deskripsi Singkat.....	63
7.1.2 Kompetensi Dasar.....	64
7.1.3 Indikator.....	64
7.2 Pembahasan.....	64
7.2.1 Badan Usaha Milik Negara.....	64
7.2.2 Peran BUMN Dalam Perekonomian Negara.....	67
7.2.3 Badan Usaha Milik Swasta.....	68

7.2.4 Peran BUMS Terhadap Pendapatan Negara.....	69
7.2.5 Koperasi.....	70
7.2.6 Kerjasama Publik Swasta.....	74
7.2.7 Studi Kasus Kemitraan Publik Swasta Negara.....	75
7.3 Penutup	76
7.3.1 Rangkuman.....	76
7.3.2 Evaluasi.....	76
7.3.3 Daftar Pustaka.....	77

**BATANG TUBUH DAN
SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH**

Bab	Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
BAB 1 SEJARAH EKONOMI	Pengertian dan Sejarah Ekonomi
	Periode Ekonomi
BAB 2 EKONOMI POLITIK	Struktur Perekonomian Indonesia
	Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia
	Pembangunan Ekonomi Indonesia
	Tiga Paham Sistem Ekonomi
	Revolusi Industri Dalam Dinamisme Sistem Ekonomi
BAB 3 KONSEP PENDAPATAN NASIONAL	Pertumbuhan Ekonomi Nasional
	Sumber Pendapatan Negara
	<i>Gross Domestic Bruto</i>
	<i>Gross National Bruto</i>
BAB 4 PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA	Pengertian Perdagangan Internasional
	Kerjasama Ekonomi Antara Indonesia dan Pelaku Perdagangan Internasional
	Zona Perdagangan
BAB 5 KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA	Orientasi Kebijakan Fiskal
	Fungsi Kebijakan Fiskal
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
	Kebijakan Ekonomi Indonesia
	Garis Waktu Perencanaan Pembangunan Ekonomi
BAB 6 KRISIS EKONOMI	Pengertian Krisis dan Resesi
	Krisis Ekonomi Asia 1997
	Dampak Krisis Ekonomi Asia Terhadap Perekonomian Indonesia
	Kondisi Sosial Politik Indonesia Saat Krisis 1998
	Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis Moneter 1998
	Pemulihan Pasca Krisis Ekonomi
	Periode Kepemimpinan Presiden Megawati – Joko Widodo
BAB 7 PILAR EKONOMI INDONESIA	Badan Usaha Milik Negara
	Peran BUMN Dalam Perekonomian Negara
	Badan Usaha Milik Swasta
	Peran BUMS Terhadap Pendapatan Negara
	Koperasi
	Kerjasama Publik Swasta
	Studi Kasus Kemitraan Publik Swasta

BAB 1

PENGERTIAN DAN SEJARAH EKONOMI

1.1 Pendahuluan

1.1.1 Deskripsi Singkat

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga bergantung pada kerjasama dengan sesama makhluk hidup di bumi untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kebutuhan utama manusia adalah makanan, yang diperoleh dari berbagai sumber alam, baik tumbuhan maupun hewan. Jumlah dan kualitas makanan yang didapat tergantung pada kemampuan dan cara manusia mengolahnya. Manusia juga berinteraksi dengan manusia lain untuk menukar makanan dengan sistem barter, jika makanan tidak cukup tersedia di satu tempat, manusia berkreasi sendiri untuk meningkatkan produksi makanan dengan cara beternak atau bercocok tanam. Selain makanan, manusia juga membutuhkan pakaian sebagai simbol identitas dalam suatu kelompok. Di masa lampau, manusia membuat pakaian dari kulit hewan atau pohon dengan berbagai desain sesuai dengan keterampilan mereka. Setelah memiliki makanan dan pakaian, manusia memerlukan tempat berlindung dari ancaman binatang liar atau hal-hal lain yang mengganggu. Maka dari itu, manusia membuat rumah sebagai tempat tinggal yang beragam bentuknya sesuai dengan kondisi alam dan budaya setempat. Rumah juga menjadi tanda status sosial, semakin besar dan mewah rumah seseorang, semakin tinggi pula kemampuan ekonominya. Secara langsung, manusia menitikberatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pada prinsip produksi, distribusi dan konsumsi, yang mana, dalam konteks ini, konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa, produksi menciptakan dan memasok kebutuhan secara berkala dan distribusi berperan dalam pengiriman hasil dari produsen ke konsumen, secara garis besar perputaran tersebut disebut dengan Ekonomi. Pada Bab 1 ini mempelajari Sejarah Ekonomi yang meliputi Pengertian Ekonomi dan Periode Ekonomi.

1.1.2 Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan Sejarah Ekonomi

1.1.3 Indikator

1. Mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan Pengertian dan Sejarah Ekonomi
2. Mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan Periode Ekonomi

1.2 Pembahasan

1.2.1 Pengertian dan Sejarah Ekonomi

Asal usul nama "ekonomi" dari bahasa Yunani, yaitu "eukonomia." Kata "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani kuno, yang terdiri dari dua kata: "oikos" yang berarti "rumah tangga" atau "kepemilikan" dan "nomos" yang berarti "hukum" atau "manajemen." Jadi, secara harfiah, "oikonomia" mengacu pada manajemen rumah tangga atau manajemen kepemilikan (Blaug, 1997). Istilah ini pertama kali digunakan

oleh filsuf-filsuf Yunani kuno, seperti Aristoteles dan Xenophon, untuk menggambarkan bagaimana seseorang harus mengelola sumber daya dalam rumah tangga mereka. Ilmu ekonomi telah berkembang seiring berjalannya waktu, meskipun aktivitas ekonomi sudah ada jauh sebelum teori ekonomi muncul. Sejak zaman primitif, manusia telah mencari cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Pada awalnya semua kebutuhan dipenuhi oleh individu sendiri, dan sistem barter digunakan sebagai cara pertukaran.

Sistem barter melibatkan pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan uang non tunai sebagai alat transaksinya. Hal ini berlanjut hingga masyarakat mengembangkan mata uang sebagai alat pembayaran. Pada masa transisi, pada masa pemanasan, perekonomian juga dipengaruhi oleh iklim dan kondisi geografis. Ilmu ekonomi yang kita kenal hari ini mulai dipindahkan dari zaman Yunani-Romawi, sekitar 300 SM, dan melanjutkan evolusinya selama zaman *Renaissance*. *Renaissance* adalah masa transisi dalam sejarah Eropa yang mengalami perubahan sosial besar, dimulai dari Abad pertengahan menuju Abad Modern, sekitar abad ke-15 hingga ke-16, dengan beberapa bahkan disebut dimulai pada abad ke-14 dan berakhir pada abad ke-17.

Perkembangan ilmu ekonomi tidak terlepas dari perkembangan sejarah manusia dan peradaban. Dari zaman Yunani-Romawi hingga zaman Renaissance, ilmu ekonomi mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian dengan kondisi sosial, politik, budaya, dan lingkungan yang ada. Ilmu ekonomi juga dipengaruhi oleh berbagai tokoh dan pemikiran yang memberikan kontribusi dan kritik terhadap ilmu ekonomi (Backhouse & Fontaine, 2010). Ilmu-ilmu juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang muncul dari sistem perekonomian yang berbeda-beda, seperti sistem barter, sistem ekonomi mata uang, sistem pasar bebas, sistem sosialis, dan lain-lain. Ilmu ekonomi juga mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan manusia dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang dinamis, komprehensif, dan relevan dengan kebutuhan manusia.

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Konsumsi disini mencakup penggunaan barang, jasa, dan kekayaan dalam berbagai bidang, seperti keuangan, industri, dan perdagangan. Selain itu, ilmu ekonomi juga mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang berharga, seperti uang, tenaga, dan waktu, serta tatanan kehidupan perekonomian suatu negara. Fokus utama ilmu ekonomi adalah perilaku manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Hal ini diasumsikan pada asumsi bahwa manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang terbatas menyebabkan kelangkaan. Oleh karena itu, ilmu ekonomi selalu mencari solusi atas masalah kelangkaan tersebut, yang menjadi landasan sejarah ilmu ekonomi. Dalam kerangka ilmu ekonomi, pertanyaan-pertanyaan mendasar yang selalu muncul adalah, apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi.

Dalam dunia ilmu ekonomi, terdapat berbagai perbedaan pendapat dan pemikiran di antara para pakar ekonomi. Hal ini dipengaruhi oleh selera, kemampuan berpikir, kepentingan, serta lingkungan di masa hidup para ahli tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu ekonomi masih menghadapi tantangan dan dinamika dari berbagai sudut pandang. Meskipun demikian, ilmu ekonomi saat ini telah memiliki kedudukan dan bentuk yang lebih kokoh sebagai ilmu pengetahuan dan bagian dari bangunan ilmu pengetahuan lainnya. Sebelumnya, kita telah membahas tentang awal mula munculnya ilmu ekonomi yang masuk ke dalam peradaban umat manusia. Dalam kalangan para pakar ekonomi, terdapat perbedaan pendapat dan keragaman pandangan yang dipengaruhi oleh preferensi pribadi, kemampuan berpikir, kepentingan individu, dan latar belakang lingkungan mereka. Fenomena ini mencerminkan kenyataan bahwa ilmu ekonomi masih terus menghadapi tantangan dan variasi dalam pandangan, dan hal ini tetap terlihat hingga saat ini. Walaupun demikian, saat ini ilmu ekonomi telah mencapai posisi yang lebih stabil dan terdefiniskan dengan baik sebagai cabang ilmu dan komponen penting dalam ranah ilmu pengetahuan.

Selama kita telah membahas sejarah munculnya ilmu ekonomi dalam perkembangan peradaban manusia, kita belum mencapai pemahaman yang konsisten tentang apa sebenarnya definisi ilmu ekonomi. Beberapa definisi ilmu ekonomi dari para ahli antara lain:

1. Adam Smith menggambarkan ekonomi sebagai "Ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sumber-sumber kekayaan suatu bangsa dengan fokus pada penyebab material dari kemakmuran, seperti hasil industri, pertanian, dan sejenisnya."
2. Alfred Marshall menyatakan bahwa ekonomi adalah "Ilmu yang memeriksa upaya individu dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Ilmu ekonomi membahas kehidupan manusia sehubungan dengan cara mereka memperoleh dan mengelola pendapatan mereka."
3. Menurut Lionel Robbins, "Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan sumber daya yang terbatas yang memiliki berbagai fungsi."
4. John Stuart Mill mengartikan ekonomi sebagai "sains praktis tentang pengeluaran dan pendapatan."
5. Abraham Maslow mendefinisikan ekonomi sebagai "bidang kajian yang berusaha memecahkan masalah kebutuhan dasar manusia melalui pengalokasian sumber daya ekonomi dengan prinsip-prinsip dan teori tertentu dalam sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien."
6. Hermawan Kartajaya menganggap ekonomi sebagai "platform di mana sektor industri beroperasi."
7. Paul A. Samuelson menjelaskan ekonomi sebagai "cara manusia dan kelompok mereka mengelola sumber daya yang terbatas untuk memproduksi dan mendistribusikan berbagai barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat."

Dari beragam definisi ekonomi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara manusia mengelola sumber daya material, baik secara individu maupun kolektif, guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Ilmu ekonomi berkaitan dengan pengaturan sumber daya individu, masyarakat, dan negara untuk mencapai tingkat kesejahteraan manusia. Karena ekonomi berfokus pada perilaku manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup dengan sumber daya yang tersedia, melalui keputusan tentang produksi, konsumsi, dan distribusi.

1.2.2 Periode Ekonomi

1. Ekonomi Klasik

Ekonomi Klasik yang berasal dari abad ke-18 dan ke-19, merupakan tonggak penting dalam sejarah pemikiran ekonomi. Era ini ditandai oleh karya-karya yang mengeksplorasi teori pasar dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Klasik mempromosikan manfaat pasar bebas dan menganjurkan intervensi pemerintah yang minimal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi (Smith 1723-1790, n.d.). Tokoh-tokoh terkemuka seperti Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill memberikan kontribusi penting pada periode ini.

Ekonomi Klasik memiliki ikatan kuat dengan kapitalisme, yang menekankan prinsip *laissez-faire*, yang mendukung pasar bebas yang mengatur dirinya sendiri, pertukaran barang dan jasa tanpa hambatan, dan persaingan terbuka sebagai motor penggerak kemakmuran ekonomi. Sebagai contoh, bayangkan pasar terbuka di mana pembeli dan penjual bertransaksi. Dalam skenario ini, harga ditentukan oleh interaksi dinamis antara penawaran dan permintaan, bukan oleh keputusan pemerintah.

Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Klasik menunjukkan keyakinan bahwa ekonomi pada dasarnya mampu mengatur dirinya sendiri. Dalam kerangka Klasik, diyakini bahwa ekonomi memiliki kemampuan intrinsik untuk mencapai keseimbangan yang dikenal sebagai tingkat Produk Domestik Bruto atau output riil alami (Say, 1880). Sebagai analogi, bayangkan orkestra di mana para musisi bermain bersama tanpa

konduktor, namun harmoni kolektif muncul secara alami. Demikian pula dengan ekonomi, di mana berbagai komponennya diharapkan dapat beroperasi secara efisien jika dibiarkan sendiri, sehingga mencapai tingkat output optimal tanpa intervensi eksternal. Ekonomi Klasik menyiratkan bahwa pasar yang tidak dibebani oleh regulasi yang berlebihan cenderung secara otomatis mencapai keseimbangan. Dalam keadaan seimbang ini, mereka mempertahankan pemanfaatan penuh sumber daya dan mengalokasikan sumber daya tersebut secara efektif untuk memaksimalkan produktivitas. Sebagai ilustrasi, bayangkan mesin yang terawat dengan baik dan beroperasi pada efisiensi maksimum. Setiap komponen menjalankan fungsinya masing-masing, menghasilkan sistem yang lancar dan produktif. Dalam konteks ekonomi, pemikiran Klasik berpendapat bahwa pasar bebas, seperti mesin yang terkalibrasi dengan baik, dapat berfungsi secara optimal tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya. Dengan mengeksplorasi Ekonomi Klasik, kita mulai memahami prinsip-prinsip dan konsep-konsep abadi yang terus membentuk pemikiran dan kebijakan ekonomi hingga saat ini. Melalui penekanannya pada pasar bebas dan intervensi pemerintah yang minimal, Ekonomi Klasik memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan pengaturan mandiri ekonomi dan upaya mencapai kesejahteraan.

2. Ekonomi Neoklasik

Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi Ekonomi Neoklasik, sebuah paradigma yang muncul pada awal abad ke-20. Ekonomi Neoklasik berpusat pada prinsip penawaran dan permintaan sebagai pendorong utama produksi, harga, dan konsumsi barang dan jasa. Kita akan melihat latar belakang historisnya, dampaknya terhadap bisnis dan pemerintah, teori dasarnya, dan implikasinya (Hunt & Lautzenheiser, 2011). Era Neo Klasik muncul pada pergantian abad ke-20, menantang teori-teori ekonomi klasik yang telah ada selama beberapa generasi. Inti dari teori ini adalah gagasan bahwa penawaran dan permintaan adalah pendorong utama di balik produksi, harga, dan konsumsi barang dan jasa. Periode ini menyaksikan perubahan besar dalam pemikiran ekonomi, yang memiliki dampak luas terhadap dunia bisnis, pemerintah, dan akademisi.

Ekonomi Neoklasik memiliki dampak besar terhadap cara bisnis beroperasi dan bagaimana pemerintah memilih untuk mengatur pasar. Misalnya, ekonom Neo Klasik mendorong pemerintah untuk berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan inovasi, dengan menekankan peran kemajuan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Samuels. Warren J, 1990). Bayangkan dunia di mana pemerintah berinvestasi dalam penelitian ilmiah inovatif yang mengarah pada pengembangan produk-produk revolusioner, menciptakan pasar baru, dan mendorong kemajuan ekonomi. Contoh nyata dari hal ini adalah perlombaan antariksa pada pertengahan abad ke-20, yang mendorong inovasi teknologi dengan konsekuensi ekonomi yang luas.

Gary Becker, seorang ekonom Neo Klasik terkemuka, memberikan kontribusi pada aliran pemikiran ini dengan mempelajari perilaku manusia melalui lensa kepentingan pribadi yang rasional dan maksimalisasi utilitas. Teori ini mengemukakan bahwa individu membuat pilihan berdasarkan pertimbangan rasional atas kepentingan pribadinya, memilih opsi yang diyakini akan memaksimalkan kesejahteraannya. Sebagai contoh bagi siswa, bayangkan seseorang memutuskan antara dua tawaran pekerjaan, mereka mempertimbangkan pro dan kontra untuk membuat pilihan rasional yang mereka yakini akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Inti dari Ekonomi Neoklasik terletak pada teorinya bahwa persepsi konsumen terhadap nilai suatu produk adalah kekuatan pendorong di balik harganya. Dengan kata lain, nilai suatu produk atau jasa ditentukan oleh seberapa besar konsumen bersedia membayarnya, bukan biaya produksinya. Hal ini sejalan dengan konsep perilaku rasional yang menyatakan bahwa masyarakat bertindak secara logis ketika mengambil keputusan ekonomi. Sebagai contoh, seorang pelajar pertimbangan untuk membeli gawai, konsumen bersedia membayar dengan harga tertentu karena mereka menganggap fitur dan manfaat ponsel itu berharga bagi mereka.

Ekonomi Neoklasik merupakan suatu keyakinan bahwa pasar pada dasarnya mengatur dirinya sendiri dan dapat mencapai keseimbangan tanpa intervensi pemerintah yang ekstensif (Hunt &

Lautzenheiser, 2011). Hal ini berarti bahwa pasar akan mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mempertahankan lapangan kerja penuh. Namun, para kritikus berpendapat bahwa teori ini gagal memperhitungkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan konsumen, seperti keterbatasan informasi, kesenjangan dalam akses sumber daya, dan pertimbangan emosional yang dapat menyimpang dari rasionalitas yang ketat. Dalam eksplorasi Ekonomi Neoklasik, kita menemukan perspektif yang menekankan pilihan konsumen dan peran penawaran dan permintaan dalam membentuk hasil perekonomian. Meskipun teori ini mempunyai peran penting dalam membentuk pemikiran ekonomi modern, hal ini bukannya tanpa para pengkritiknya yang menunjukkan keterbatasan asumsi-asumsinya.

3. Ekonomi Modern

Ekonomi modern adalah sistem yang kompleks dan saling terkait, yang membentuk bagaimana sumber daya dialokasikan di antara para partisipannya. Ekonomi modern merupakan aliran pemikiran ekonomi yang tingkatannya sudah lebih kompleks, karena permasalahannya pun juga semakin rumit, sehingga dibutuhkan pemecahan masalah yang lebih mendalam. Perekonomian modern sangat bergantung pada kemajuan teknologi, perubahan perilaku manusia, dan ideologi sosial yang berkembang. Manifestasi dari Ekonomi Modern dan kompleksitasnya terlihat di masa sekarang. Misalnya, ketersediaan pangan yang minim, ketimpangan pendapatan warga negara, pengangguran, atau perubahan iklim yang merusak hasil produksi pertanian. Contoh lain dari masalah ekonomi modern adalah terkait penghasilan. Di antara kita pasti ada yang selalu merasa gajinya kurang. Meskipun setiap tahun terjadi kenaikan, tapi masih saja terasa kurang. Selain itu, dampak ekonomi modern terlihat dari bangkitnya perusahaan-perusahaan raksasa berbasis digital, seperti contoh Amazon dan Facebook. Amazon mengubah pengiriman buku, menciptakan pasar global, sementara Facebook mengubah cara kita terhubung dan berkomunikasi.

Pemikiran sistem ekonomi modern muncul seiring berkembangnya zaman, teknologi, dan sumber daya manusia. Modern Monetary Theory (MMT) atau Teori Moneter Modern adalah teori ekonomi makro yang berbasis cetak uang (printing money) yang mana, teori ini merupakan salah satu bentuk kebijakan moneter suatu negara (Wray et al., 2023). Teori ekonomi modern membedakan dirinya dari ilmu ekonomi klasik dengan mempertimbangkan lebih dari sekedar sumber produksi dan teori tangan tak kasat mata. Hal ini mencakup spektrum yang lebih luas, termasuk peran permintaan, jumlah uang beredar, dampak pertumbuhan, monetarisme, dan perdagangan. Implikasi makro ekonomi dari inovasi digital meliputi banyak aspek. Sebagai langkah awal dalam melakukan analisis terhadap perkembangan inovasi digital dan ekonomi digital, penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengetahui implikasi makroekonomi dari inovasi digital. bebas Perekonomian global pada 2021 melanjutkan perbaikan dengan laju yang tidak merata, setelah berkontraksi cukup dalam pada 2020. Perbaikan ekonomi terutama didorong oleh pent-up demand baik dari pasar domestik maupun eksternal, seiring dengan pelonggaran restriksi mobilitas dan stimulus kebijakan.

Perekonomian Modern ditandai dengan kemajuan teknologi, perubahan perilaku manusia, dan berkembangnya ideologi sosial yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan. Dengan evolusi ekonomi ini, kita sering menyaksikan kenaikan harga yang stabil dari waktu ke waktu, disertai dengan peningkatan standar hidup. Namun, visi globalisasi dalam Perekonomian Modern juga menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kemiskinan relatif. Seperti contoh, seorang mahasiswa yang baru saja lulus dan memasuki dunia kerja, peluang dan pendapatan mereka akan ditentukan oleh perekonomian global yang saling terhubung. Implikasi Ekonomi Modern akan berdampak langsung pada pilihan karir dan standar hidup mereka. Dalam eksplorasi kami terhadap Ekonomi Modern, mengungkap dunia yang dibentuk oleh kekuatan dinamis dan interkoneksi. Memahami paradigma ini sangat penting bagi siswa saat mereka menavigasi lanskap ekonomi yang kompleks dan terus berkembang serta implikasinya yang mendalam terhadap masyarakat.

4. Ekonomi Postmodern

Ekonomi Postmodern adalah gerakan yang mencerminkan perubahan ekonomi dalam era kontemporer yang merupakan transformasi dari ekonomi tradisional ke dunia yang lebih kompleks (Lyotard et al., 1984). Sehingga, konsep ekonomi sebelumnya memerlukan penyesuaian yang lebih adaptif seiring dengan berjalannya waktu, dan kita perlu menyelaminya dengan pemahaman yang lebih mendalam. Contoh konkret dari Ekonomi Postmodern meliputi peningkatan pelayanan ekonomi, peran media massa yang mempengaruhi cara kita memandang dunia, ketergantungan global dalam perekonomian, dan perubahan dalam cara kita mengkonsumsi berbagai produk dan layanan. Bayangkan bagaimana platform digital dan media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan bisnis. Hal ini mencerminkan perubahan pola konsumsi yang semakin dinamis dalam masyarakat.

Teori Ekonomi Postmodern menyoroti kritik terhadap paradigma modernisme, yang dianggap telah gagal dalam meningkatkan martabat manusia. Kita akan membahas kritik terhadap rasionalisme, sains, dan dampak perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam ekonomi kontemporer. Implikasi Ekonomi Postmodern ini sangat terkoneksi satu sama lain, terutama dalam perubahan pola konsumsi masyarakat. Kehidupan pasca-modern menciptakan pola konsumsi yang mencerminkan era ini, dan kita akan memahami bagaimana perubahan ini mempengaruhi cara kita mengkonsumsi dan menikmati produk serta layanan yang ditawarkan oleh ekonomi modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah ide baru yang menolak atau termasuk dari pengembangan ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya yaitu paham modernisme. Postmodernisme mencoba memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Postmodernisme merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju ide baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. Munculnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari modernisme itu sendiri. Modernisme mengandung makna serba maju, gemerlap, dan progresif. Modernisme selalu menjanjikan perubahan ke dunia yang lebih mapan di mana semua kebutuhan dapat terpenuhi. Rasionalitas akan membantu kita menghadapi mitos-mitos dan keyakinan-keyakinan tradisional yang tak berdasar, yang membuat manusia tak berdaya dalam menghadapi dunia ini (Ali maksum, 2017).

Gagasan tentang Ekonomi Postmodern juga sejalan dengan perkembangan di era globalisasi saat ini, jika diperhatikan, saat ini pembangunan yang terfokus pada hal didasarkan pada kebebasan dan demokrasi akan menghasilkan kesejahteraan sosial dan dapat memperkecil tingkat kemiskinan dan kelaparan dalam waktu relatif cepat. Pembangunan haruslah sebagai perluasan kebebasan dengan menerapkan hak-hak dasar manusia serta peningkatan kapabilitas manusia (human development). Kritik tentang ekonomi modern tidak hanya disitu saja, ekonomi modern juga dinilai sangat egois, yang mana, penerapannya bertujuan untuk memenuhi kepentingan (self-interest) pribadi suatu organisasi yang memiliki kekuatan yang untuk mengatur siklus ekonomi di suatu negara. Ekonomi Postmodern mencerminkan dinamika ekonomi kontemporer yang semakin kompleks, mirip dengan bagaimana postmodernisme mencerminkan pergeseran dalam pemahaman kita tentang dunia. Ini adalah pandangan yang lebih luas tentang bagaimana globalisasi, teknologi, dan perubahan perilaku manusia membentuk ekonomi kita di era ini.

1.3 Penutup

1.3.1 Rangkuman

"Ekonomi" adalah istilah dari kata Yunani "eukonomia," yang berarti "rumah" atau "rumah" dan "hukum" atau "manajemen." Istilah ini pertama kali digunakan oleh para filsuf seperti Aristoteles dan Xenophon untuk menjelaskan bagaimana individu harus mengelola sumber daya di rumah mereka. Konsep ekonomi telah berkembang dari waktu ke waktu, dari era primitif hingga Renaisans. Hal ini mencakup berbagai perubahan dan adaptasi terhadap kondisi sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Hal

ini juga mencakup berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan ekonomi, seperti sistem uang, sistem modal sosial, dan sistem sosial.

Ekonomi adalah bidang interdisipliner yang berfokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti preferensi individu, kemampuan berpikir, dan pertimbangan lingkungan. Bidang ilmu ekonomi telah berkembang dari waktu ke waktu, dengan fokus pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan manajemen sumber daya dan distribusi sumber daya. Dalam dunia ekonomi, terdapat berbagai perbedaan dalam pemahaman dan penerapan konsep ekonomi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh preferensi pribadi, kemampuan berpikir, minat individu, dan faktor lingkungan. Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, ilmu ekonomi tetap menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia.

Periode ekonomi terbagi menjadi empat, yaitu ekonomi klasik, ekonomi neoklasik, ekonomi modern, dan ekonomi postmodern. Ekonomi klasik menekankan pentingnya pasar bebas dan intervensi pemerintah yang minimal untuk mencegah kemerosotan ekonomi. Ekonomi neoklasik menunjukkan bahwa pasar dapat berfungsi secara independen dan mencapai stabilitas ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Ekonomi modern ditandai dengan kemajuan teknologi, perubahan perilaku, dan berkembangnya ideologi sosial yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan. Ekonomi postmodern terfokus pada hal didasarkan pada kebebasan dan demokrasi akan menghasilkan kesejahteraan sosial dan dapat memperkecil tingkat kemiskinan dan kelaparan dalam relatif cepat.

1.3.2 Evaluasi

1. Bagaimana ilmu ekonomi masuk dalam peradaban manusia?
2. Mengapa ilmu ekonomi penting untuk dipelajari?
3. Kemukakan pendapat Anda terkait prinsip *laissez-faire*, apakah prinsip tersebut masih relevan digunakan saat ini?
4. Jelaskan prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh para ilmuwan dalam Teori Neoklasik sehingga dipandang lebih efektif!
5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perekonomian era modern? Kemukakan pendapat Anda didukung dengan contoh konkret!

1.3.3 Daftar Pustaka

- Ali maksum. (2017). Pengantar Filsafat Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme. In (*Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017*), 168. (Vol. 2). Ar-Ruzz Media.
- Backhouse, R. E., & Fontaine, P. (2010). Introduction: History of economics as history of social science. *History of Political Economy*, 42(SUPPL1), 1–21. <https://doi.org/10.1215/00182702-2009-070>
- Blaug, M. (1997). *Economic Theory in Retrospect* (5th ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511805639>
- Hunt, E. K., & Lautzenheiser, M. (2011). History of economic thought : a critical perspective. In *TA - TT - (3rd ed)*. M.E. Sharpe Armonk, N.Y. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/693811264>
- Lyotard, J.-F., Bennington, G., & Massumi, B. (1984). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. In *Poetics Today* (Vol. 5, Issue 4). University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.2307/1772278>
- Samuels, Warren J. (1990). Neoclassical Economic Theory, 1870 to 1930. In K. Henning & W. J. Samuels (Eds.), *Neoclassical Economic Theory, 1870 to 1930*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-009-2181-8>
- Say, J.-B. (1880). *A Treatise on Political Economy; or the Production, Distribution, and Consumption of Wealth*. McMaster University Archive for the History of Economic Thought. <https://econpapers.repec.org/RePEc:hay:hetboo:say1880>
- Smith 1723-1790, A. (n.d.). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. New York :

Modern Library, ©1994. <https://search.library.wisc.edu/catalog/999820678102121>
Wray, L. R., Armstrong, P., Holland, S., Jackson-Prior, C., Plumridge, P., & Wilson, N. (2023). Modern Monetary Theory: Key Insights, Leading Thinkers. In *Modern Monetary Theory: Key Insights, Leading Thinkers*. <https://doi.org/10.4337/9781802208092>

BAB 2

EKONOMI POLITIK

2.1 Pendahuluan

2.1.1 Deskripsi Singkat

Ekonomi politik adalah subjek yang menarik dalam pengembangan ilmu politik, dan interpretasinya bervariasi antara pemikir politik dan ekonomi yang berbeda. Salah satu pemikir terkenal, Marx, memandang ekonomi politik sebagai tentang kepemilikan alat produksi yang sangat dipengaruhi oleh sejarah. Secara umum, ekonomi politik dianggap sebagai disiplin interdisipliner yang menggabungkan ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik untuk menjelaskan bagaimana institusi politik, lingkungan politik, serta berbagai sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme, atau sistem lainnya, saling mempengaruhi (Maherul, 2019). Ini dapat dianggap sebagai metodologi yang memeriksa hubungan antara ekonomi dan politik, terutama dalam konteks perilaku institusi politik yang mempengaruhi pembuatan kebijakan ekonomi. Pendekatan lain dalam ekonomi politik diilustrasikan oleh pandangan Adam Smith, seorang ekonom terkenal, yang menggambarkan ekonomi politik sebagai cabang ilmu politik yang memberikan panduan bagi pengaturan ekonomi nasional. Pandangan ini juga dikuatkan oleh Mochtar Mas'od, yang memahami ekonomi politik sebagai studi yang mengeksplorasi hubungan antara fenomena politik dan ekonomi, hubungan antara negara dan pasar, serta interaksi antara lingkungan domestik dan internasional, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam studi ekonomi politik, terdapat berbagai perspektif dan konsep yang digunakan, salah satunya adalah liberalisme. Perspektif ini menekankan pentingnya kebebasan sebagai kunci untuk perkembangan manusia. Salah satu tokohnya, John Locke, menganggap kebebasan sebagai prinsip utama dalam politik, dengan definisi kebebasan yang mencakup ketidacampuran eksternal dalam aktivitas individu. Locke juga memperkenalkan konsep hak dasar manusia, seperti hak hidup, kebebasan, dan hak atas kepemilikan. Liberalisme memiliki dua konsep penting dalam analisis ekonomi politik (Henry, 1999). Pertama, konsep asumsi rasionalitas yang meliputi teori permainan, teori pilihan publik, dan teori pilihan rasional. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana keputusan diambil dalam situasi persaingan dan konflik yang melibatkan berbagai kepentingan. Teori pilihan publik, misalnya, menggabungkan pendekatan politik dan ekonomi untuk menganalisis perilaku aktor politik dan ekonomi dengan asumsi bahwa mereka bertindak secara rasional untuk memaksimalkan manfaat pribadi mereka.

Konsep kedua adalah ekonomi politik internasional (IPE), yang memeriksa interaksi antara kepentingan ekonomi dan proses politik dalam pembentukan kebijakan pemerintah. IPE menyoroti bagaimana ekonomi global dan politik saling mempengaruhi, khususnya dalam konteks persaingan antara kekuatan besar dan kekuatan lemah, seperti negara, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional. Istilah "ekonomi politik" sendiri berasal dari bahasa Yunani, dengan "polis" yang berarti kota atau unit politik, dan "oikonomia" yang merujuk pada manajemen rumah tangga (Rachbin, 2003). Gabungan kata ini mencerminkan hubungan yang erat antara produksi, keuangan, perdagangan, dan kebijakan pemerintah dalam hal moneter, fiskal, dan komersial. Pada awalnya, istilah ini digunakan untuk merujuk kepada cara pemerintah mengatur perdagangan, pertukaran, uang, dan pajak, yang sekarang sering disebut sebagai kebijakan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah ini mulai digunakan untuk mengkaji berbagai masalah ekonomi lainnya, dan ekonomi politik menjadi disiplin ilmu sosial yang diakui sebagai ilmu. Namun, penggunaan istilah "ilmu ekonomi" semakin menggantikan "ekonomi politik" pada akhir abad ke-19, meskipun perbedaan antara keduanya masih ada di beberapa tempat.

Perbedaan mendasar antara keduanya juga terkait dengan sejarah Marxisme. Menurut Marx dan Engels, ekonomi politik sebagai ilmu muncul bersamaan dengan perkembangan kapitalisme, karena sifat eksploitatifnya yang tersembunyi memerlukan analisis khusus untuk mengungkapkannya. Mereka menilai bahwa ekonomi politik konvensional hanya memperlakukan hubungan ekonomi sebagai pertukaran semata dan lebih merupakan ideologi daripada ilmu sejati. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa ekonomi politik yang sesungguhnya harus memeriksa produksi, buruh, dan pertukaran, tidak hanya perdagangan. Kemudian, istilah "ekonomi politik" digunakan untuk menyoroti interaksi antara aspek ekonomi dan politik, mencerminkan pentingnya hubungan antara keduanya (Spencer & Tregarthen, 1990). Namun, seiring berjalannya waktu, istilah ini telah digunakan dengan lebih longgar, terutama dalam konteks analisis ekonomi Marxis, yang lebih menekankan faktor-faktor non-ekonomi dalam ekonomi politik. Dengan demikian, perbedaan antara ekonomi politik dan ilmu ekonomi menjadi semakin kabur, dan istilah "ekonomi politik" digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aspek ekonomi dan politik secara umum. Pada Bab 2 ini mempelajari Ekonomi Politik yang meliputi Struktur Perekonomian Indonesia, Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia, Pembangunan Ekonomi Indonesia, Tiga Paham Sistem Ekonomi, dan Revolusi Industri Dalam Dinamisme Sistem Ekonomi.

2.1.2 Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan Ekonomi Politik

2.1.3 Indikator

1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi Struktur Perekonomian Indonesia
2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia
3. Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis Pembangunan Ekonomi Indonesia
4. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Tiga Paham Sistem Ekonomi
5. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Revolusi Industri dan Dinamisme Sistem Ekonomi

2.2 Pembahasan

2.2.1 Struktur Perekonomian Indonesia

Struktur ekonomi adalah gambaran mengenai bagaimana sektor-sektor ekonomi tersusun dalam suatu negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional. Terdapat empat sudut pandang dalam menganalisis struktur perekonomian, yaitu tinjauan makro-sektoral, tinjauan keuangan, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Dua pertama adalah aspek ekonomi, sementara dua yang terakhir adalah aspek politik (Indonesia, 2020). Dua jenis utama struktur ekonomi dalam suatu perekonomian adalah:

1. Struktur agraris, yang mengindikasikan dominasi sektor pertanian dalam mata pencaharian sebagian besar penduduk. Ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia.
2. Struktur industri, di mana sektor industri mendominasi perekonomian dan memberikan kontribusi besar terhadap produk nasional serta pertumbuhan ekonomi. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang termasuk dalam kategori negara industri.

Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan perubahan struktural dalam perekonomian, dari ekonomi tradisional yang didominasi oleh sektor pertanian menjadi ekonomi modern dengan sektor-sektor non primer seperti industri manufaktur yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran keberhasilan pemerintahan daerah dalam era otonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin baik penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Harapannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong pembangunan

infrastruktur, perbaikan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi akan mempercepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi bahwa faktor-faktor seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi juga tersedia untuk mendukung proses tersebut (Indonesia, 2020).

Sistem ekonomi dalam suatu negara merupakan bagian integral dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran, yang saat ini lebih dikenal sebagai sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila. Sistem ini merupakan gabungan dari elemen-elemen sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai dan filosofi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, struktur ekonomi Indonesia dikenal sebagai ekonomi kerakyatan. Prinsip ini telah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan. Pembangunan ekonomi pada dasarnya memiliki empat dimensi utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, upaya penanggulangan kemiskinan, perubahan atau transformasi ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat untuk meningkatkan dan memastikan kelangsungan pertumbuhan ekonomi sambil tetap mengatasi masalah kemiskinan. Proses perubahan struktur ekonomi ini ditandai oleh penurunan peran sektor primer (pertanian), peningkatan peran sektor sekunder (industri), dan kontribusi yang semakin besar dari sektor tersier (jasa) seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Teori perubahan struktural adalah pendekatan yang menitikberatkan pada proses transformasi ekonomi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang (NSB). Transformasi ini mengarah pada peralihan dari ekonomi yang sebelumnya lebih subsisten dan terutama berfokus pada sektor pertanian menuju ekonomi yang lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer. Dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi ini, terdapat dua teori utama yang sering digunakan, yaitu teori Arthur Lewis (teori migrasi) dan Hollis Chenery (teori transformasi struktural). Teori Lewis secara dasarnya membahas perkembangan ekonomi yang terjadi di wilayah pedesaan dan perkotaan. Teorinya mengasumsikan adanya dua tipe ekonomi dalam suatu negara: ekonomi pedesaan yang lebih tradisional dengan dominasi sektor pertanian, dan ekonomi perkotaan yang lebih modern dengan industri sebagai sektor utama. Sementara itu, teori Chenery, yang juga dikenal sebagai teori pola pembangunan, berfokus pada perubahan struktural dalam proses perkembangan ekonomi NSB. Teori ini menggambarkan transisi dari pertanian tradisional yang bersifat subsisten ke sektor industri sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan produksi sektor industri manufaktur, ada empat faktor utama yang dianggap penting:

1. Peningkatan permintaan domestik, yang mencakup permintaan langsung terhadap produk industri manufaktur dan efek tidak langsung dari peningkatan permintaan di sektor lain terhadap industri manufaktur.
2. Ekspansi ekspor (pertumbuhan dan diversifikasi) atau dampak keseluruhan dari peningkatan ekspor terhadap industri manufaktur.
3. Substitusi impor atau dampak keseluruhan dari peningkatan proporsi permintaan di setiap sektor yang dipenuhi melalui produksi dalam negeri terhadap produksi industri manufaktur.
4. Perubahan teknologi atau dampak keseluruhan dari perubahan koefisien input-output dalam perekonomian karena kenaikan upah dan pendapatan terhadap sektor industri manufaktur.

Dalam konteks negara-negara sedang berkembang (NSB), banyak faktor internal yang berkontribusi pada variasi dalam proses transformasi ekonomi ini. Beberapa faktor tersebut mencakup kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri, ukuran pasar domestik, pola distribusi pendapatan, strategi industrialisasi, sumber daya alam yang tersedia, dan kebijakan perdagangan luar negeri yang diterapkan. Variasi ini menghasilkan beragam pola transformasi ekonomi di antara NSB. Perubahan struktur ekonomi adalah sebuah fenomena dalam perekonomian yang timbul sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya akan

mempengaruhi tingkat dan pola konsumsi masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan struktur ekonomi, antara lain:

1. Produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor secara keseluruhan.
2. Adopsi modernisasi dalam meningkatkan nilai tambah dari bahan baku, produk setengah jadi, dan barang jadi.
3. Kreativitas dan penerapan teknologi, serta kemampuan untuk memperluas pasar produk atau jasa yang dihasilkan.
4. Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor-sektor dan komoditi unggulan.
5. Ketersediaan infrastruktur yang mendukung aliran distribusi barang dan jasa serta proses produksi.
6. Semangat wirausaha dan investasi masyarakat yang berkelanjutan.
7. Kemunculan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam wilayah-daerah.
8. Keterbukaan perdagangan baik di tingkat regional maupun internasional melalui ekspor dan impor.

Pertumbuhan ekonomi tidak terjadi dengan cepat dan tiba-tiba. Diperlukan langkah-langkah, prosedur, dan proses yang tepat di setiap sektor untuk memberikan dampak positif pada perekonomian suatu negara. Untuk menilai apakah suatu sektor mampu mempengaruhi perekonomian atau tidak, diperlukan analisis kinerja dan produktivitas sektor-sektor yang ada dalam negara tersebut.

2.2.2 Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia

Pembangunan ekonomi Indonesia secara konsisten diarahkan ke arah industrialisasi, yang mengakibatkan penurunan relatif dalam andil sektor pertanian dalam struktur ekonomi. Namun, belum semua lapisan masyarakat siap menghadapi perubahan ini. Hal ini mengakibatkan hanya mereka yang memiliki modal besar dan pengusaha besar yang dapat berperan aktif dalam pembangunan, sedangkan masyarakat lainnya terpaksa menjadi penonton. Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1985, sektor pertanian dan pertambangan memberikan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Indonesia, 2020). Namun, sejak tahun 1995, sektor industri pengolahan dan perdagangan, hotel, dan restoran mulai menggantikan peran sektor pertanian dan pertambangan. Meskipun sektor industri pengolahan terus meningkat hingga tahun 2010, kontribusinya kemudian mulai menurun, dan sektor keuangan dan jasa mengisi peran yang lebih besar. Sebaliknya, sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami stagnasi.

Secara umum, transformasi perekonomian Indonesia telah meningkatkan pendapatan per kapita dan memindahkan masyarakat dari agraris ke ekonomi yang berbasis industri dan jasa. Namun, masih ada tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, tekanan globalisasi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan pemisahan sektor keuangan dan sektor riil. Kecenderungan transformasi ekonomi yang telah terjadi selama 35 tahun terakhir harus menjadi perhatian semua partai politik yang menginginkan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Transformasi ini akan terus berlanjut seiring dengan proses demokratisasi politik dan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemecahan masalah yang tepat dan solusi yang komprehensif untuk mengatasi dampak dan tantangan yang muncul selama proses transformasi ekonomi terus berlangsung di Indonesia.

2.2.3 Pembangunan Ekonomi Indonesia

Masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto melibatkan upaya besar dalam mencapai modernitas, yang salah satunya melibatkan pengembangan infrastruktur fisik. Pembangunan ini direalisasikan melalui sistem pembangunan nasional yang dikenal sebagai Pembangunan Lima Tahun atau PELITA, yang terdiri dari enam periode pembangunan, yaitu PELITA I hingga PELITA VI.

1. PELITA I (1 April 1969 – 31 Maret 1974) menjadi fondasi awal pembangunan Orde Baru dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat dan membentuk dasar-dasar untuk tahap pembangunan selanjutnya. Sasaran PELITA I meliputi pangan, sandang, perbaikan infrastruktur, perumahan, peningkatan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Fokus utama PELITA I adalah pembangunan pertanian sebagai upaya mengejar ketertinggalan ekonomi.
2. PELITA II (1 April 1974 – 31 Maret 1979) menempatkan titik berat pada peningkatan standar hidup melalui pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan. Sasaran PELITA II mencakup sektor-sektor tersebut, perbaikan sarana dan prasarana, kesejahteraan rakyat, serta penciptaan lapangan kerja. PELITA II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengalami peningkatan produksi di sektor industri dan transportasi.
3. PELITA III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) lebih menekankan pada pembangunan pertanian guna mencapai swasembada pangan dan pembangunan industri yang mengelola bahan baku hingga menjadi produk jadi. PELITA III mengikuti prinsip Trilogi Pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah pembangunan nasional mencakup semua sektor ekonomi dengan pedoman Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.
4. PELITA IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989) menitikberatkan pada sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan mengembangkan industri yang mampu memproduksi mesin industri sendiri. PELITA IV mencapai kesuksesan dengan pencapaian swasembada beras dan program Keluarga Berencana serta pembangunan perumahan.
5. PELITA V (1 April 1989 - 31 Maret 1994) mengedepankan sektor pertanian dan industri. Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif, peningkatan ekspor, dan kondisi ekonomi yang baik selama periode ini.
6. PELITA VI (1 April 1994 - 31 Maret 1999) tetap fokus pada pembangunan ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Pada periode ini, Indonesia menghadapi krisis moneter yang mempengaruhi ekonomi negara, serta proses desentralisasi dalam birokrasi dan pengambilan keputusan.

Struktur perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan dari yang awalnya agraris menjadi lebih industrialis dan modern. Proses ini juga melibatkan desentralisasi dalam sistem birokrasi dan pengambilan keputusan. Sistem desentralisasi adalah suatu pendekatan yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atau entitas lokal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya ekonomi di tingkat yang lebih rendah. Hal ini menciptakan dinamika ekonomi yang berbeda dari sistem yang sangat terpusat (Sudarto, 2020). Di bawah desentralisasi, entitas lokal memiliki lebih banyak kontrol atas anggaran, pajak, dan kebijakan ekonomi yang relevan bagi wilayah mereka. Salah satu dampak positif desentralisasi terhadap stabilitas ekonomi adalah responsivitas yang lebih baik terhadap perubahan ekonomi. Ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur kebijakan ekonomi, mereka dapat lebih cepat menyesuaikan langkah-langkah ekonomi dengan situasi lokal. Ini memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap gejolak ekonomi, seperti perubahan dalam permintaan pasar atau masalah sektor tertentu.

Selain itu, desentralisasi juga dapat mendorong investasi lokal dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah yang otonom dapat menarik investasi ke wilayah mereka sendiri, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. Ini berpotensi mengurangi ketergantungan pada satu sumber ekonomi dan meningkatkan stabilitas dengan menyebarkan risiko ekonomi. Namun, perlu dicatat bahwa dampak desentralisasi terhadap stabilitas ekonomi juga tergantung pada bagaimana desentralisasi diimplementasikan. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif atau koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, risiko ketidakstabilan ekonomi dapat meningkat. Oleh karena itu, implementasi yang hati-hati dan sistem pengawasan yang efektif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa desentralisasi memberikan manfaat yang lebih besar daripada risikonya terhadap stabilitas ekonomi suatu negara, struktur perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan dari yang awalnya agraris menjadi lebih industrialis dan modern. Proses ini juga melibatkan desentralisasi dalam

sistem birokrasi dan pengambilan keputusan, yang dapat berkontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi negara.

2.2.4 Tiga Paham Sistem Ekonomi

1. Kapitalisme

Para ilmuwan sepakat bahwa Kapitalisme merupakan revolusi fundamental dalam pembentukan masyarakat modern. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dianggap sebagai proses ekonomi; kapitalisme dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideologi dan mencerminkan gaya hidup tertentu. Kapitalisme adalah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan distribusi, yang dimanfaatkan untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif (Spencer & Tregarthen, 1990). Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individu atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Dalam sistem ekonomi ini, ada kebebasan bagi individu untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antara badan usaha dalam ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya (Subandi, 2005). Dari beberapa definisi di atas, tidak ada Adam Smith melalui bukunya yang terbit pada tahun 1776 dengan judul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, yang menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha dalam persaingan sempurna dengan meniadakan semua intervensi pemerintah, Sistem ekonomi kapitalis didasarkan pada beberapa prinsip utama:

1. Hak Milik Swasta (Private Property): Hak milik swasta merupakan elemen kunci dalam kapitalisme. Ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak legal untuk memiliki barang-barang ekonomi dan sumber daya melalui perjanjian-perjanjian tanpa campur tangan negara. Hak pemilikan atas kekayaan memberikan insentif kepada individu untuk menggunakan aset mereka secara produktif, mempengaruhi distribusi kekayaan, dan memungkinkan pertukaran yang efisien.
2. *The Invisible Hand* (Tangan yang Tak Terlihat): Konsep ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat kapitalis termotivasi oleh kekuatan ekonomi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri dengan biaya yang sekecil mungkin. Ini berarti bahwa pasar akan mengatur dirinya sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah secara berlebihan.
3. Individualisme Ekonomi Laissez-Faire: Dalam kapitalisme, ada penekanan pada individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Pemerintah hanya berintervensi dalam aktivitas tertentu.
4. Persaingan dan Pasar Bebas (Free Market Competition): Mekanisme pasar menghasilkan persaingan, yang terjadi di antara penjual, pembeli, pekerja, dan majikan. Pasar bebas yang ideal adalah di mana penjual dan pembeli dalam jumlah yang cukup banyak sehingga mereka tidak dapat memengaruhi harga. Kebebasan penjual dan pembeli dari pembatasan ekonomi juga ditekankan.

Sistem ekonomi kapitalis berhadapan dengan beberapa tantangan, seperti kelangkaan sumber daya ekonomi. Untuk mengatasi kelangkaan ini, ekonom kapitalis harus menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental, seperti apa yang harus diproduksi, bagaimana sumber daya harus digunakan untuk produksi, dan untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Nilai barang dalam kapitalisme dibagi menjadi dua kategori, yaitu nilai guna (utility value) yang berkaitan dengan kepuasan individual dari mengonsumsi barang dan nilai tukar (exchange value) yang merupakan kemampuan barang untuk ditukar dengan barang lainnya. Harga merupakan bentuk khusus dari nilai tukar, diukur dalam uang, dan memfasilitasi transaksi ekonomi. Pemahaman ini menggambarkan pandangan dasar sistem ekonomi kapitalis terkait dengan hak milik swasta, tangan yang tak terlihat, individualisme ekonomi, persaingan pasar, dan pengukuran nilai barang.

2. Komunisme

Komunisme adalah sistem ekonomi di mana pemerintah berperan sebagai pengendali semua sumber daya ekonomi. Dalam sistem ini, individu tidak diizinkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang dapat ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis, dari yang terkecil hingga terbesar, dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan mencapai pemerataan ekonomi dan solidaritas. Namun, tujuan dari sistem komunis ini belum pernah mencapai tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme. Karl Marx, seorang tokoh yang sangat membenci Kapitalisme, adalah saksi sejarah bagaimana anak-anak dan wanita, termasuk anggota keluarganya sendiri, dieksploitasi oleh kapitalis sehingga sebagian besar dari mereka menderita penyakit TBC dan meninggal, akibat penderitaan yang berat yang mereka alami. Sementara itu, hasil kerja keras mereka dinikmati oleh pemilik sumber daya (modal) yang disebutnya kaum Borjuis.

Secara historis, kata Komunisme sering digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial di mana barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan setiap anggota masyarakat. Produksi dan konsumsi setiap individu tidak diizinkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang dapat ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis, dari yang terkecil hingga terbesar, dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan mencapai pemerataan ekonomi dan solidaritas. Namun, tujuan dari sistem komunis ini belum pernah mencapai tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme. Komunisme muncul sebagai aliran ekonomi, seperti anak haram yang tidak disukai oleh kaum kapitalis. Aliran ini muncul dengan tujuan yang sama dengan sosialisme, seringkali lebih bersifat gerakan ideologis dan mencoba untuk meruntuhkan sistem kapitalisme dan sistem lainnya yang telah mapan.

3. Sosialisme

Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang sepenuhnya diatur oleh negara. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat, karena segala sesuatunya diatur dan dikendalikan oleh negara. Sistem ekonomi sosialis bertujuan untuk menciptakan kemakmuran yang merata di masyarakat, sehingga tidak ada lagi penindasan ekonomi (Effendi et al., 2019). Meskipun sistem ini memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, kebebasan tersebut sangat terbatas dan ada campur tangan besar dari pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis meliputi penekanan pada kolektivitas, peran besar pemerintah, dan penentuan sifat manusia oleh pola produksi. Hak milik individu tidak diakui dalam sistem ini (Tho'in, 2015). Sosialisme sebagai sistem ekonomi dalam satu komando menempatkan negara sebagai pusat kegiatan ekonomi. Negara memiliki kekuasaan besar dalam kepemilikan bersama semua faktor produksi. Produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan ada perencanaan ekonomi yang ketat untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Santoso, 2011).

Sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx menghendaki peran maksimal negara. Negara harus menguasai semua sektor ekonomi untuk memastikan keadilan bagi rakyat, mulai dari produksi, konsumsi, hingga mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga dapat menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal yang serakah, sehingga monopoli dan eksploitasi tenaga kerja dapat dicegah dan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (Kamirudin et al., 2018). Di negara sosialis, yang umumnya pemerintahannya bersifat otoriter, masyarakat miskin tidak dapat bertindak sebagai subjek yang menentukan, melainkan hanya sebagai objek bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi. Dalam kapitalisme, individu berada di atas masyarakat, sedangkan dalam pandangan sosialisme, hak kepemilikan individu dihapuskan. Dalam sosialisme, sumber daya ekonomi adalah kepemilikan kolektif masyarakat atau negara, sehingga individu-individu tidak berhak untuk memilikinya.

Sistem ekonomi sosialis yang dibangun oleh komunis sosialis Marxian mencapai puncaknya ketika prinsip dasar dan sistem hak-hak kepemilikan menjadi hak bagi negara dan masyarakat. Secara

keseluruhan, sistem ekonomi sosialis ini berusaha untuk mengubah ketidaksamaan kekayaan dengan menghapuskan hak-hak kebebasan individu dan hak terhadap pemusatan kepemilikan yang mengakibatkan hilangnya hak dan semangat untuk bekerja lebih giat dan berkurangnya efisiensi kerja buruh (Pangiuk, 2011). Menurut konsep ekonomi sosialis, sumber kekayaan sangat langka. Kekayaan harus diperoleh melalui pemberdayaan tenaga kerja (buruh) di semua bidang, seperti pertambangan, pertanian, dan lainnya. Dalam sistem sosialis, semua bidang usaha dimiliki dan diproduksi oleh negara, tidak ada pasar dan tidak ada supply dan demand, karena negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan masalah dan keputusan ditangani langsung oleh negara (Mujiatun, 2020). Bekerja menurut sosialis merupakan cara dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia (kemakmuran dan kesejahteraan), buruh sebagai pemilik tenaga kerja harus memiliki nilai lebih atas hasil produksinya (Qomar, 2019).

2.2.5 Revolusi Industri dan Dinamisme Sistem Ekonomi

Revolusi Industri merupakan peristiwa sejarah yang mendefinisikan dinamika sistem ekonomi pada abad ke-18 dan ke-19. Ini adalah periode transformasi ekonomi dan sosial yang terjadi di Inggris dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Revolusi Industri dimulai dengan penggunaan mesin-mesin tenaga uap, seperti mesin pemintal dan mesin tenun, yang menggantikan produksi tangan manusia. Mesin-mesin ini memungkinkan produksi massal yang lebih efisien dan cepat, mengubah cara barang-barang diproduksi dan didistribusikan. Namun, ada sejumlah perspektif kritis terkait Revolusi Industri. Salah satunya adalah dampak sosialnya. Meskipun Revolusi Industri meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi, itu juga membawa dampak negatif seperti kondisi kerja yang buruk di pabrik-pabrik, eksploitasi buruh, dan perubahan radikal dalam struktur sosial. Beberapa berpendapat bahwa Revolusi Industri menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar antara pemilik modal dan pekerja, dengan banyak pekerja yang hidup dalam kondisi miskin. Selain itu, Revolusi Industri juga berdampak pada lingkungan. Penggunaan mesin-mesin tenaga uap dan industri berat menghasilkan polusi lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran udara dan air serta deforestasi.

Ini menimbulkan pertanyaan etika tentang dampak ekonomi terhadap alam dan memunculkan kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih berkelanjutan terhadap produksi dan konsumsi. Jadi, meskipun Revolusi Industri membawa banyak perubahan positif dalam dinamika sistem ekonomi, ia juga menimbulkan banyak isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang perlu dipertimbangkan secara kritis. Indonesia telah memberikan berbagai respons terhadap Revolusi Industri dan perubahan dalam sistem ekonomi global. Dalam konteks Revolusi Industri, Indonesia telah berupaya untuk memahami secara mendalam arti, sejarah, dan evolusi Revolusi Industri dari tahap 1.0 hingga 4.0. Ini termasuk memahami bagaimana Revolusi Industri telah mempengaruhi sejarah dan perkembangan industri manufaktur di Indonesia. Meskipun banyak negara Asia, termasuk Indonesia, mengalami keterlambatan dalam mengadopsi Revolusi Industri, mereka telah berhasil mencapai kemajuan signifikan pada akhir Revolusi Industri Ketiga. Sebagai contoh, dalam merespons Revolusi Industri 4.0, Indonesia telah merumuskan Strategi Konsolidasi 4IR ASEAN.

Indonesia sendiri telah adaptif dalam merespon ekonomi global, Indonesia telah berusaha untuk memahami dan merespons dampak dari perubahan ekonomi global saat ini. Meskipun ekonomi global mengalami perlambatan, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat, didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan kinerja ekspor yang positif. Selain itu, pada kuartal pertama tahun 2023, realisasi total investasi di Indonesia mencapai IDR 328,9 triliun, setara dengan 23,5% dari target total investasi untuk tahun 2023. Pada saat tantangan ekonomi global seperti pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik yang berkelanjutan, Indonesia telah berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Sebagai contoh, meskipun pandemi COVID-19 telah menciptakan dampak global yang signifikan dan meninggalkan efek yang serius, terutama pada kelompok yang rentan, Indonesia telah merespons dengan upaya untuk memulihkan ekonominya dan mengurangi dampak negatif dari pandemi. Indonesia telah merespons Revolusi Industri dan dinamika

sistem ekonomi global dengan berusaha memahami dan merespons tantangan dan peluang yang muncul. Selain itu, Indonesia juga telah berupaya untuk memperkuat ekonominya dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

2.3 Penutup

2.3.1 Rangkuman

Sistem ekonomi dalam suatu negara merupakan bagian integral dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran, yang saat ini lebih dikenal sebagai sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila. Transformasi struktural merupakan prasyarat untuk meningkatkan dan memastikan kelangsungan pertumbuhan ekonomi sambil tetap mengatasi masalah kemiskinan. Terdapat tiga paham sistem ekonomi, yaitu Kapitalisme, Komunisme, dan Sosialisme. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan terbaik bagi kepentingan individu atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi.

Komunisme adalah sistem ekonomi yang membentuk pemerintah sebagai pengendali semua sumber daya ekonomi. Sistem ekonomi sosialisme bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang stabil dalam masyarakat, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan dan manfaat yang sama. Revolusi Industri, sebuah periode transformasi ekonomi dan sosial pada abad ke-18 dan ke-19, ditandai dengan penggunaan tenaga kerja murah, seperti tenaga kerja kasar dan tenaga kerja tidak terampil, untuk memproduksi barang secara massal, efisien, dan cepat. Namun, hal ini juga menimbulkan efek negatif seperti kondisi kerja yang buruk, eksploitasi, dan perubahan radikal dalam struktur sosial.

2.3.2 Evaluasi

1. Kemukakan pendapat Anda terkait konsep liberalisme, jelaskan didukung dengan contoh konkret!
2. Mengutip dari CNBN Indonesia (2022), bidang pertanian tak lagi menarik minat anak muda, khususnya dari generasi Z. Ada sejumlah alasan mengapa banyak generasi Z yang tak ingin bekerja di bidang pertanian, seperti tidak ada pengembangan karir, penuh resiko, pendapatan kecil, tidak dihargai, dan tidak menjanjikan. Menyikapi pemberitaan tersebut, kemukakan pendapat Anda bagaimana pengaruh fenomena tersebut terhadap struktur perekonomian Indonesia?
3. Menurut pendapat Anda, bagaimana desentralisasi dapat memberikan dinamika bagi pembangunan ekonomi di Indonesia?
4. Mengutip dari IDX Chanel (2023) bahwa sepanjang tahun 2023, sejumlah sentimen makro membuat pasar global dan domestik bergejolak. Mulai dari ancaman krisis perbankan Amerika Serikat (AS), sikap Bank Sentral Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunga 5,5%, krisis properti di China, pecahnya perang Israel-Palestina, hingga kenaikan Covid-19 pada akhir tahun 2023. Menurut pendapat Anda bagaimana pengaruh gejolak ekonomi politik global terhadap perekonomian di Indonesia?
5. Revolusi Industri 5.0 yang telah berlangsung sejak tahun 2019 melibatkan banyak bentuk teknologi dan Indonesia menjadi salah satu negara yang kini sedang berusaha untuk mewujudkannya. Kemukakan pendapat Anda, bagaimana peluang dan tantangan Indonesia dalam menghadapi hal tersebut?

2.3.3 Daftar Pustaka

Effendi, S., Islam, U., & Utara, S. (2019). Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 147–158.

- Henry, J. F. (1999). John Locke, Property Rights, and Economic Theory. *Journal of Economic Issues*, 33(3), 609–624. <https://doi.org/10.1080/00213624.1999.11506188>
- Indonesia, T. D. P. (2020). Perubahan Struktur Indonesia. *Jurnal Perekonomian Indonesia*, 7–8.
- Maherul, M. (2019). Mengenal Ekonomi Politik. *Journal Economy*, 12(4), 1–12. <https://www.researchgate.net/publication/343917210>
- Mujiatun, S. (2020). Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. *Jurnal Analytica Islamica*, 3(1), 90–107. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/440>
- Pangiuk, A. (2011). Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid dalam Sistem Islam). *Nalar Fiqh*, 4(2).
- Parakkasi, I., & Kamiruddin, K. (2018). Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 107–120. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a5>
- Qomar, M. N. (2019). Kritik Karl Marx terhadap Konsep Buruh Kapitalis Kajian Komparatif Ekonomi Syariah Atas Buku Das Kapital. 3 *AnCoMs (Annual Conference for Muslim Scholars)*, 1(03), 1003–1009. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1293148>
- Rachbin, D. J. (2003). *Ekonomi politik dan teori pilihan publik* (R. F. Sikumbank (ed.); 2nd ed.). Bogor : Ghalia Indonesia.
- Santoso, F. S. (2011). Reformasi Ekonomi Berbasis Bagi Hasil Belajar Dari Sistem Ekonomi Sosialis. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 193. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i2.193-207>
- Spencer, M. H., & Tregarthen, T. D. (1990). *Contemporary Economics*. Worth Publishers. https://books.google.co.th/books?id=_zi3GwAACAAJ
- Subandi. (2005). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Alfabeta. <https://books.google.co.th/books?id=b1zYZwEACAAJ>
- Sudarto, A. (2020). *Perekonomian Indonesia* (1st ed.). Lampung Membangun.
- Tho'in, M. (2015). Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis – Sosialis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(03), 118–133. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i03.34>

BAB 3

KONSEP PENDAPATAN NASIONAL

3.1 Pendahuluan

3.1.1 Deskripsi Singkat

Pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu, umumnya diukur dalam satu tahun. Konsep ini mencakup berbagai macam pendapatan yang diterima oleh individu, perusahaan, dan pemerintah di dalam suatu negara. Pendapatan nasional dapat diukur melalui berbagai metode, termasuk pendekatan produksi (mengukur nilai tambah selama proses produksi), pendekatan pengeluaran (mengukur total pengeluaran untuk barang dan jasa), dan pendekatan pendapatan (mengukur total pendapatan yang dihasilkan oleh faktor produksi). Metode-metode ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap ekonomi, tetapi seharusnya menghasilkan estimasi yang setara. Pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara, menganalisis pertumbuhan ekonomi, merencanakan kebijakan fiskal dan moneter, serta memahami distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Data pendapatan nasional sering digunakan untuk mengidentifikasi tren ekonomi, merancang kebijakan fiskal dan moneter, serta memahami struktur ekonomi suatu negara. Pada Bab 3 ini mempelajari Konsep Pendapatan Nasional yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumber Pendapatan Negara, *Gross Domestic Bruto*, *Gross National Bruto*.

3.1.2 Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan Konsep Pendapatan Nasional

3.1.3 Indikator

1. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Pembangunan Ekonomi Indonesia
2. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Sumber Pendapatan Negara
3. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi *Gross Domestic Bruto*
4. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi *Gross National Bruto*

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pembangunan Ekonomi Nasional

Pembangunan merupakan tantangan mendasar bagi suatu bangsa atau negara, yang melibatkan pencarian kondisi ideal masyarakat dan strategi untuk merealisasinya. Pembangunan ini adalah tanggung jawab negara melalui pemerintahnya untuk memajukan kondisi seluruharganya menuju keadaan yang lebih baik. Di Indonesia, pembangunan sering dikaitkan dengan berbagai istilah seperti *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europianization*, dan *political change*, karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretatif. *Developmentalisme* di Indonesia telah mengalami perkembangan dari konsep ideal tatanan kesejahteraan yang diilhami oleh negara-negara Barat (Kuncoro, 2013). Namun, makna kesejahteraan ini tergantung pada konteks penggunaannya. *Modernization* merujuk pada transformasi dari kondisi primitif atau tradisional ke kondisi yang lebih baik secara fisik. *Empowering* mencakup upaya memberdayakan untuk meningkatkan kemampuan suatu objek. *Industrialization* adalah peralihan dari mata pencaharian agraris ke pekerjaan industri. *Economic growth* menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator

keberhasilan pembangunan. *Europeanization* mencerminkan aspirasi untuk meniru negara-negara Eropa dalam mencapai kemajuan. *Political change* adalah perubahan dalam kondisi politik yang berdampak pada pembangunan.

Dari pengertian-pengertian ini, dapat diidentifikasi beberapa nilai dasar pembangunan. Pertama, pembangunan adalah proses yang melibatkan tahapan-tahapan tertentu. Kedua, pembangunan merupakan perubahan menuju kondisi yang lebih baik dengan peningkatan nilai dan guna objek pembangunan. Ketiga, pembangunan melibatkan subyek, metode, dan objek tertentu. Pembangunan memiliki berbagai dimensi yang menjadi fokus peningkatan kemakmuran masyarakat. Ini termasuk ekonomi, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia, hukum, politik, sarana, dan keadilan. Setiap dimensi memiliki tujuan dan target yang spesifik (Sadono, 2010). Musuh utama pembangunan adalah keterbelakangan, ketidakberdayaan, ketergantungan, kebodohan, dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan pekerjaan rumah dalam pembangunan. Ada dua pendekatan utama dalam menjelaskan kemiskinan: pendekatan internal yang menyalahkan faktor di dalam negara itu sendiri, dan pendekatan eksternal yang melibatkan faktor luar yang mempengaruhi kemiskinan. Dalam konteks pendapatan, pembangunan berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilannya. Pendapatan adalah salah satu dimensi penting dalam upaya mencapai kemakmuran masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, pembangunan dapat diukur dengan lebih jelas dalam mencapai tujuan dan targetnya (Ahmad Ma'ruf, 2008).

Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh oleh seluruh penduduk atau pelaku ekonomi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Besarnya pendapatan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan sumber daya produksi, tingkat keahlian tenaga kerja, kemajuan teknologi produksi, alokasi modal, dan stabilitas negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional termasuk permintaan agregat dan penawaran agregat (Syamsi, 1994). Permintaan agregat adalah total permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa pada tingkat harga tertentu, sedangkan penawaran agregat adalah total penawaran barang dan jasa oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kedua faktor ini dapat meningkatkan pendapatan nasional. Investasi juga memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan nasional. Peningkatan investasi dalam negeri akan meningkatkan produksi nasional dan pada akhirnya pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi dari waktu ke waktu dan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhinya, termasuk peran pemerintah. Menurut teori dasar pertumbuhan ekonomi Neoklasik oleh Solow dan Swan (1956), peran pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam hal pengeluaran maupun pajak. Pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh stok modal, tenaga kerja, dan teknologi yang bersifat eksogen. Pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan populasi, namun hal ini tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Dimand & Spencer, 2008). Teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) menjelaskan bahwa investasi dalam modal fisik dan modal manusia memainkan peran penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui perubahan dalam konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik, serta penerimaan dari pajak. Teori ini juga mengakui bahwa faktor seperti infrastruktur, hukum, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan perdagangan internasional juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, sektor pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam sejarah perekonomian. Pemerintah berperan dalam menerapkan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengurangan pengangguran, dan pengendalian inflasi. Kebijakan fiskal pemerintah Indonesia terutama menggunakan dua instrumen utama, yaitu perpajakan dan pengeluaran (Mardiasmo, 2012). Pengeluaran pemerintah adalah salah satu instrumen penting kebijakan fiskal yang diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Pemerintah berupaya meningkatkan pengeluaran sebagai bagian dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Selain itu, pengeluaran pemerintah riil juga meningkat seiring dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Peran pemerintah dalam perekonomian terlihat dari pengeluaran pada sektor ekonomi yang cenderung meningkat sebagai persentase dari total pengeluaran (Sadono, 2010).

Konsumsi dan tabungan juga berperan penting dalam menentukan pendapatan nasional. Konsumsi adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa, sedangkan tabungan adalah pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Peningkatan konsumsi dan tabungan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional. Ada beberapa konsep terkait dengan pendapatan nasional, termasuk GDP (Gross Domestic Product) atau PDB (Produk Domestik Bruto), GNP (Gross National Product) atau PNB (Produk Nasional Bruto), NNP (Net National Product) atau PNN (Produk Nasional Neto), NNI (Net National Income) atau PN (Pendapatan Nasional Neto), PI (Personal Income) atau Pendapatan Perorangan, dan DI (Disposable Income) atau Pendapatan Disposibel. Setiap konsep ini mengukur pendapatan nasional dengan cara yang berbeda dan mempertimbangkan berbagai faktor seperti depresiasi, pajak, subsidi, dan pengeluaran konsumen (Mulyasari, 2020).

3.2.2 Sumber Pendapatan Negara

Pendapatan negara merujuk pada aliran dana ke kas negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan kebutuhan pemerintah dalam proses pembangunan negara. Pendapatan negara, atau yang sering disebut juga sebagai penerimaan pemerintah, terdiri dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, keuntungan dari perusahaan negara, denda, sumbangan dari masyarakat, dan sebagainya. Dalam konteks ini, pendapatan negara dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendapatan dari pajak dan pendapatan dari sumber-sumber lainnya. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara sesuai dengan undang-undang, tanpa adanya pemberian jasa atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Di negara-negara yang telah mencapai tingkat kemajuan yang tinggi, pajak menjadi sumber utama pendanaan pemerintah. Sebagian besar dari pengeluaran pemerintah digunakan untuk mengelola administrasi pemerintahan, sementara sisanya dialokasikan untuk mendukung kegiatan pembangunan. Ini mencakup pembayaran gaji pegawai pemerintah, pendanaan sistem pendidikan dan layanan kesehatan untuk warga negara, mendukung anggaran militer, serta membiayai berbagai infrastruktur penting yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh pengeluaran ini berkontribusi pada peningkatan pengeluaran agregat dan meningkatkan tingkat aktivitas ekonomi di negara tersebut.

Sumber pendapatan negara umumnya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pendapatan dari pajak dan pendapatan non-pajak.

- a. Pendapatan Pajak : merupakan kontribusi finansial yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, tanpa ada imbalan langsung. Pendapatan negara dari pajak dapat dibagi lagi menjadi dua jenis:
 - 1) Pajak Langsung : Ini adalah jenis pajak yang harus dibayarkan langsung oleh individu atau perusahaan yang memiliki penghasilan atau keuntungan. Contohnya termasuk pajak penghasilan individu dan pajak perusahaan.
 - 2) Pajak Tidak Langsung: Jenis pajak ini dapat ditransfer beban pembayarannya kepada pihak lain. Beberapa contoh penting dari pajak tak langsung adalah pajak impor dan pajak penjualan. Pendapatan dari pajak ini mencakup pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah.

Secara keseluruhan, kedua jenis pajak ini merupakan sumber utama pendapatan untuk pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan layanan publik. Pendapatan pajak dapat dibagi lagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

- 1) Pajak Pusat : Wewenang pemungutan pajak berada di tangan pemerintah pusat. Beberapa pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Masuk, dan Cukai Tembakau serta Alkohol beserta Hasil Olahannya.
- 2) Pajak Daerah : Wewenang pemungutan pajak berada di tangan pemerintah daerah. Pajak daerah provinsi termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak daerah kabupaten/kota termasuk Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, serta Pajak Parkir.

Pendapatan negara dari berbagai jenis pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, termasuk administrasi pemerintahan dan proyek-proyek pembangunan, yang selanjutnya meningkatkan pengeluaran agregat dan memajukan aktivitas ekonomi negara.

b. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Seiring dengan perkembangan pembangunan nasional di berbagai sektor, Indonesia mengalami peningkatan dalam berbagai jenis pendapatan negara yang tidak termasuk dalam kategori pajak. Penerimaan pajak terdiri dari berbagai sumber, termasuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Selain itu, penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi, yang mencakup unsur pajak dan royalti, juga dianggap sebagai bagian dari pendapatan pajak karena komponen pajaknya yang lebih signifikan. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merangkum semua jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah pusat di luar dari sektor perpajakan. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, PNBP didefinisikan sebagai seluruh pendapatan pemerintah pusat yang tidak bersumber dari penerimaan pajak (Keuangan, 2023). Ini mencerminkan diversifikasi sumber pendapatan negara yang penting dalam mendukung pembangunan nasional dan kegiatan pemerintahan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah komponen penting dari pendapatan negara. Sesuai dengan tujuan nasional yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945, pemerintah mengandalkan PNBP untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan dan proyek pembangunan. Peran PNBP ini sangat signifikan dalam meningkatkan kemandirian finansial Indonesia, baik dalam aspek pembiayaan negara maupun dalam pembangunan nasional (Syamsi, 1994). Dalam rangka memastikan manfaat optimal dari PNBP, pemerintah mendasarkan diri pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan. Tujuan utama dari undang-undang yang mengatur PNBP adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong kemandirian finansial negara dan pembangunan melalui pemanfaatan efektif PNBP dan pengelolaan administratif yang teratur, termasuk penyetoran PNBP ke kas negara.
- b. Memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat yang berkontribusi pada pembiayaan pembangunan, agar sejalan dengan manfaat yang diperoleh dari aktivitas yang menghasilkan PNBP.
- c. Mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, pembangunan yang adil di seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatkan investasi.
- d. Membantu pembentukan aparatur pemerintah yang efektif, bersih, dan berwibawa, dengan menyederhanakan prosedur dan memastikan pemenuhan kewajiban, serta meningkatkan tata kelola keuangan dan anggaran negara, termasuk pengawasan yang lebih baik.

Dengan cara ini, PNBPN berperan vital dalam memajukan dan membiayai berbagai aspek pembangunan dan pemerintahan di Indonesia. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumber-sumber selain pajak. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang berbagai jenis PNBPN:

- a. Penerimaan dari Pengelolaan Dana Pemerintah: Ini mencakup pendapatan yang diperoleh dari berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah, seperti jasa giro. Selain itu, sisa anggaran pembangunan dan anggaran rutin yang tidak digunakan juga termasuk dalam kategori ini.
- b. Penerimaan dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam : Pendapatan ini berasal dari penggunaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara. Misalnya, royalti yang diperoleh dari sektor pertambangan.
- c. Penerimaan dari Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan : Ini mencakup pendapatan seperti dividen atau keuntungan yang diperoleh pemerintah dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta hasil penjualan saham pemerintah dalam BUMN.
- d. Penerimaan dari Kegiatan Pelayanan Pemerintah : Pendapatan ini berasal dari berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan.

Selain itu, pendapatan juga bisa berasal dari pemberian hak paten, merek, hak cipta, visa, paspor, dan pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan (Markus, 2005).

1.2.3 Gross Domestic Bruto

Produk Domestik Bruto (GDP) adalah indikator penting dalam mengevaluasi kondisi ekonomi suatu negara. GDP mampu mengukur total pendapatan yang diterima semua individu dalam ekonomi dan total pengeluaran negara untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekonomi. Hal ini dimungkinkan karena dalam ekonomi secara keseluruhan, total pendapatan selalu sama dengan total pengeluaran. GDP didefinisikan sebagai nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. Namun, ada beberapa aspek yang tidak termasuk dalam perhitungan GDP, seperti nilai dari semua aktivitas yang berlangsung di luar pasar, kualitas lingkungan, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, GDP per kapita, yang merupakan rasio antara GDP dan jumlah penduduk suatu negara, dianggap sebagai alat yang lebih baik untuk memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada penduduk rata-rata dan standar hidup warganya (Mankiw, 2009). GDP sering menjadi fokus utama dalam statistik ekonomi karena dianggap sebagai ukuran terbaik tentang kesejahteraan masyarakat. Ini karena GDP mampu mengukur dua hal sekaligus: total pendapatan semua orang dalam ekonomi dan total pengeluaran negara untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekonomi. Alasan GDP dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran adalah karena dalam ekonomi secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran (Mankiw, 2009).

GDP perekonomian dapat dihitung dengan dua metode: menambahkan semua pengeluaran rumah tangga atau menambahkan semua pendapatan (upah, sewa, dan keuntungan) yang dibayarkan oleh perusahaan. Penting untuk memahami fungsi GDP dalam ekonomi, apa yang dapat diukur dan apa yang tidak, komponen dan jenisnya, serta hubungan GDP dengan kesejahteraan. Dalam pengukuran, GDP mencoba menjadi ukuran yang mencakup banyak hal, termasuk barang-barang yang diproduksi dalam ekonomi dan dijual secara legal di pasar. GDP juga mencakup nilai pasar dari layanan perumahan dalam ekonomi. GDP mencakup barang yang dapat dihitung (makanan, pakaian, mobil) dan layanan yang tidak dapat dihitung (potong rambut, pembersihan rumah, kunjungan ke dokter). GDP mencakup barang dan jasa yang sedang diproduksi. GDP mengukur nilai produksi dalam batas geografis suatu negara. GDP mengukur nilai produksi yang terjadi selama interval waktu tertentu, biasanya setahun atau satu kuartal (tiga bulan). GDP mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam ekonomi selama interval tersebut. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat diukur oleh GDP, seperti banyak barang yang diproduksi dan

dijual secara ilegal, seperti obat-obatan terlarang. GDP juga tidak mencakup barang-barang yang tidak pernah memasuki pasar karena diproduksi dan dikonsumsi dalam rumah tangga (Mankiw, 2009).

GDP (ditunjukkan sebagai Y) terdiri dari empat komponen: konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), dan ekspor neto (NX). Persamaan ini, $Y = C + I + G + NX$, adalah persamaan identitas yang selalu benar berdasarkan definisi variabelnya. Komponen-komponen tersebut adalah:

- a. Konsumsi adalah total pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa.
- b. Investasi adalah total pembelian barang yang akan digunakan untuk produksi barang dan jasa di masa depan.
- c. Belanja pemerintah mencakup total pengeluaran pemerintah daerah, negara bagian, dan pusat untuk barang dan jasa.
- d. Ekspor neto adalah selisih antara pembelian produk domestik oleh orang asing (ekspor) dan pembelian produk asing oleh warga negara (impor).

Ketika mempelajari perubahan ekonomi sepanjang waktu, ekonom ingin memisahkan dua faktor: peningkatan output barang dan jasa dan peningkatan harga barang dan jasa. Mereka mencari ukuran jumlah total barang dan jasa yang diproduksi oleh ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga barang dan jasa tersebut. Untuk mendapatkan ukuran produksi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, kita menggunakan GDP riil, yang mengukur produksi barang dan jasa pada harga konstan. GDP riil menggunakan harga dari tahun dasar yang tetap untuk menentukan nilai produksi barang dan jasa dalam ekonomi. Karena GDP riil tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, perubahan GDP riil hanya mencerminkan perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi.

Selain GDP riil, ada juga GDP nominal, yang mengukur produksi barang dan jasa dengan harga saat ini. GDP nominal dipengaruhi oleh peningkatan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dan juga peningkatan harga barang atau jasa tersebut. Dari kedua statistik ini, kita dapat mengetahui statistik ketiga, yaitu deflator GDP, yang mencerminkan harga barang dan jasa tetapi bukan jumlah yang diproduksi. Deflator GDP mengukur tingkat harga saat ini relatif terhadap tingkat harga di tahun dasar. Deflator GDP adalah salah satu ukuran yang digunakan oleh ekonom untuk mengamati tingkat harga rata-rata dalam ekonomi. GDP dapat digunakan untuk mengukur total pendapatan dan total pengeluaran dalam suatu perekonomian untuk barang dan jasa. Oleh karena itu, GDP per kapita, yang merupakan rasio antara GDP dan jumlah penduduk, dapat memberikan gambaran tentang pendapatan dan pengeluaran rata-rata per individu dalam perekonomian. Kebanyakan orang cenderung lebih memilih pendapatan dan pengeluaran yang lebih tinggi, sehingga GDP per kapita tampaknya menjadi ukuran yang cukup alami untuk kesejahteraan rata-rata per individu. GDP per kapita memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada penduduk rata-rata, tetapi di balik angka rata-rata tersebut, ada perbedaan besar antara berbagai pengalaman yang dialami oleh individu. Akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa GDP adalah ukuran kesejahteraan yang baik untuk berbagai tujuan, tetapi tidak untuk semua tujuan (Mankiw, 2006:19-22).

1.2.4 *Gross National Bruto*

Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) dalam bahasa Inggris, memiliki konsep yang mirip dengan GDP, tetapi mencakup jenis pendapatan yang sedikit berbeda. PNB menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatannya dihitung. Hubungan antara Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PDB = PNB - PFN_{LN}$$

Di mana PFN-LN adalah pendapatan faktor neto dari luar negeri, yaitu pendapatan faktor-faktor produksi yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan faktor-faktor produksi yang dibayarkan ke luar negeri. Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Untuk menghitung kenaikan dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang dihasilkan harus dihitung pada harga yang tetap. Nilai pendapatan nasional yang diperoleh dari penghitungan ini disebut pendapatan nasional pada harga tetap atau pendapatan nasional riil. Barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian dapat dinilai dengan dua cara, yaitu menggunakan harga pasar dan harga faktor. Hubungan antara harga pasar dan harga faktor dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Harga pasar} = \text{harga faktor} + \text{pajak tak langsung} - \text{subsidi}$$

Setiap harga pasar suatu barang termasuk nilai penyusutan (depresiasi). Nilai barang-barang modal akan semakin susut dari satu periode ke periode lain. Kesusutan nilai tersebut merupakan bagian dari biaya produksi. Oleh karena itu, dalam pendapatan nasional pada harga pasar termasuk nilai penyusutan barang modal. Pendapatan nasional yang masih meliputi depresiasi disebut Produk Nasional Bruto (PNB). Untuk memperoleh Produk Nasional Neto (PNN), nilai depresiasi harus dikurangi dari PNB. Dengan demikian, PNN adalah PNB dikurangi depresiasi.

GDP dan GNP adalah dua ukuran penting dalam mengevaluasi kesejahteraan ekonomi suatu negara. Keduanya mewakili nilai pasar total dari semua barang dan jasa yang diproduksi selama periode tertentu. GDP (Produk Domestik Bruto) mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam batas geografis suatu negara. GDP adalah indikator penting karena memberikan gambaran apakah ekonomi sedang tumbuh atau berkontraksi. Sebuah GDP yang meningkat menunjukkan ekonomi nasional yang tumbuh, sedangkan GDP yang tidak berubah banyak dari tahun ke tahun menunjukkan ekonomi dalam keadaan stabil, dan GDP yang menurun menunjukkan ekonomi nasional yang menyusut. Sementara itu, GNP (Produk Nasional Bruto) mengukur nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara suatu negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, sementara GDP adalah indikator ekonomi lokal/nasional, GNP mewakili bagaimana warga negara berkontribusi terhadap ekonomi negara. Dengan demikian, GDP dan GNP mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara karena mereka mencerminkan kondisi ekonomi secara keseluruhan, termasuk produksi, konsumsi, investasi, dan perdagangan internasional. Perubahan dalam GDP atau GNP dapat menunjukkan perubahan dalam kondisi ekonomi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi.

3.3 Penutup

3.3.1 Rangkuman

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi dari waktu dan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Teori pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh stok modal, tenaga kerja, dan teknologi yang bersifat eksogen. Pendapatan negara merujuk pada aliran dana ke kas negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan kebutuhan pemerintah dalam proses pembangunan negara. Pendapatan negara dapat dibagi menjadi dua jenis, yang pendapatan dari pajak dan pendapatan dari sumber-sumber lainnya. *Gross Domestic Bruto* adalah indikator penting dalam mengevaluasi kondisi ekonomi suatu negara, menentukan pendapatan total individu dan pendapatan total yang dihasilkan oleh perekonomian untuk memperoleh barang dan jasa. Sedangkan *Gross National Bruto* mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai faktor produksi. Hubungan antara GDB dan GNB dapat didefinisikan sebagai efek bersih produksi dari satu wilayah ke wilayah lain.

3.3.2 Evaluasi

1. Kemukakan pendapat Anda apa yang dimaksud dengan teori pertumbuhan endogen?
2. Mengapa konsumsi dan tabungan berperan dalam menentukan pendapatan nasional?
3. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Beberapa tahun terakhir, jasa titip (jastip) menjadi trend di kalangan anak muda, namun menuai pro dan kontra karena barang impor masuk tanpa terkena pajak. Deskripsikan pendapat Anda terkait fenomena jastip, bagaimana pemerintah Indonesia harus menyikapi?
4. Jelaskan apa perbedaan *Gross Domestic Bruto* (GDB) dan *Gross National Bruto* (GNB)? Serta berikan contoh perusahaan apa saja yang berkontribusi pada GDB dan GNB?
5. Databoks (2023) menerbitkan data bahwa Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Namun, jika dihitung secara per kapita, nilainya kalah dari negara tetangga. Secara per kapita, ekonomi Indonesia hanya masuk peringkat ke-5 di ASEAN, masih kalah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Deskripsikan analisis Anda, faktor apakah yang menyebabkan Indonesia kalah saing dengan negara-negara tetangga dalam *Gross Domestic Bruto*?

3.3.3 Daftar Pustaka

- Ahmad Ma'ruf. (2008). PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44–55.
- Dimand, R., & Spencer, B. (2008). Trevor Swan And The Neoclassical Growth Model. *History of Political Economy*, 42. <https://doi.org/10.1215/00182702-2009-019>
- Kuangan, K. (2023). *Baik, Kinerja Tahun, Awal Optimisme, Menjaga Ekonomi, Penguatan Tengah, Di Penguatan, Kewaspadaan Di, Ekonomi Kewaspadaan, Tengah Global, Ketidakpastian*.
- Kuncoro, M. (2013). Economic Geography Of Indonesia: Can MP3EI Reduce Inter-Regional Inequality? *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 2(2), 17–33.
- Mankiw, N. G. (2009). Macroeconomist as a scientist and engineer. *Voprosy Ekonomiki*, 2009(5), 86–103. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-5-86-103>
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan*. Andi.
- Markus, M. (2005). *Perpajakan Indonesia : suatu pengantar*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyasari, W. R. (2020). Ekonomi Kelas XI. *Repositori Kemdikbud*, 1, 7–8.
- Sadono, S. (2010). *MAKROEKONOMI : Teori Pengantar* (19th ed.). Rajawali Press.
- Syamsi, I. (1994). *Dasar - dasar kebijaksanaan keuangan negara*. Jakarta Renika Cipta.

BAB 4

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

INDONESIA

4.1 Pendahuluan

4.1.1 Deskripsi Singkat

Sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya alam, Indonesia harus menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia adalah melalui perdagangan internasional. Dalam konteks perdagangan, Indonesia terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, Indonesia juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam perdagangan internasional. Berikut ini adalah beberapa aspek yang terkait dengan aktivitas perdagangan Indonesia, jenis barang yang diekspor, negara tujuan ekspor, proses perizinan perdagangan luar negeri, mitra kerjasama ekonomi internasional, serta dinamika hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan mitra perdagangan internasional lainnya. Perdagangan internasional, yang merupakan alat untuk pertukaran barang dan jasa di tingkat global, telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan dalam lima dekade terakhir. Hal ini terjadi karena banyak negara berkolaborasi untuk menghapus hambatan perdagangan dan mendorong perdagangan bebas. Perdagangan internasional adalah komponen kunci dari proses globalisasi (Apridar, 2015). Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia dapat memberikan manfaat dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, baik secara langsung melalui pengaruh terhadap alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung melalui peningkatan tingkat investasi. Setiap bentuk hambatan dan proteksi perdagangan harus dihindari dan dihapuskan karena mereka adalah sumber distorsi dalam perdagangan internasional.

Pada tahun 1995, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didirikan. WTO memainkan peran penting dalam mempromosikan perdagangan bebas dalam proses globalisasi. Tujuan utama pendirian WTO adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan sistem perdagangan dunia yang aman. Selain itu, WTO juga memainkan peran penting dalam menjalankan setiap aturan yang telah ditetapkan dalam setiap perjanjian perdagangan dunia seperti Uruguay Round Second dan perjanjian pada GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Salah satu konsekuensi dari perjanjian WTO adalah bahwa setiap negara di dunia akan berada pada level dan tingkat yang sama dalam perdagangan internasional. Ini berarti bahwa negara-negara berkembang sekarang berada dalam skenario ekonomi global dan harus bersaing dengan negara-negara maju (Shoemith Dennis ed, 1986). Liberalisasi perdagangan adalah tantangan bagi negara-negara miskin dan negara yang sedang berkembang untuk dapat mempertahankan ekonomi mereka dan berpartisipasi dalam persaingan global (PKPPIM Kementerian Keuangan, 2019). Pada Bab 4 ini mempelajari Perdagangan Internasional Indonesia yang meliputi Pengertian Perdagangan Internasional, Kerjasama Ekonomi Antara Indonesia dan Pelaku Perdagangan Internasional, dan Zona Perdagangan.

4.1.2 Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan Perdagangan Internasional Indonesia

4.1.3 Indikator

1. Mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan Pengertian Perdagangan Internasional

2. Mahasiswa mampu menganalisis Kerjasama Ekonomi Antara Indonesia dan Pelaku Perdagangan Internasional
3. Mahasiswa mampu menganalisis Zona Perdagangan

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan, dalam arti luas, merujuk pada aktivitas membeli dan menjual barang atau jasa di suatu lokasi, di mana terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran pada titik yang dikenal sebagai titik ekuilibrium. Sementara itu, istilah internasional merujuk pada skala global, bukan hanya sebatas satu area tertentu. Oleh karena itu, perdagangan internasional dapat diinterpretasikan sebagai serangkaian transaksi perdagangan antara pembeli dan penjual (dalam hal ini antara satu negara dengan negara lain dalam bentuk ekspor dan impor) di pasar, dengan tujuan mencapai keuntungan maksimal bagi kedua pihak. Beberapa abad yang lalu, aliran Merkantilis berpendapat bahwa perdagangan internasional adalah transaksi untung-rugi atau win-lose deal (Bappenas, 2009). Menurut pandangan ini, ekspor menguntungkan (win) sedangkan impor merugikan (lose), sehingga negara harus berusaha meningkatkan ekspor dan menghindari impor (Shoosmith Dennis ed, 1986). Namun, sejak awal abad ke-19, para ekonom pasar berpendapat sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa perdagangan internasional adalah transaksi yang saling menguntungkan atau win-win deal, karena beberapa alasan berikut:

1. Perdagangan internasional melibatkan dua transaksi ketika dua negara saling melakukan ekspor dan impor yang saling menguntungkan. Misalnya, jika Indonesia tidak mengimpor barang sama sekali dari Australia, maka Australia tidak akan dapat membeli barang yang kita ekspor ke negara tersebut, karena Australia tidak memiliki uang rupiah. Uang rupiah ini baru diperoleh jika Australia mengekspor barang atau jasa ke Indonesia.
2. Perdagangan internasional memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Jika Indonesia tidak memiliki hubungan perdagangan internasional dengan negara lain di dunia, keanekaragaman barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar domestik Indonesia akan sangat terbatas. Misalnya, kita tidak akan menemukan komputer buatan Amerika, jam tangan buatan Swiss, atau mobil dari Jepang. Meskipun Indonesia dapat mengembangkan industri substitusi impor untuk memproduksi mobil sendiri, biaya produksinya akan lebih tinggi dari harga mobil impor dari Jepang.
3. Perdagangan internasional dapat menciptakan efisiensi. Negara yang mencoba memenuhi semua kebutuhan barang dan jasanya sendiri (self-sufficient economies) tidak akan mencapai efisiensi dalam perekonomiannya. Hanya dengan perdagangan internasional, efisiensi dapat dicapai dan kedua negara akan saling mendapatkan keuntungan karena faktor-faktor seperti aneka sumber daya alam, skala ekonomi, dan perbedaan selera. Ketiga faktor ini adalah pandangan umum (common views) yang menjelaskan mengapa perdagangan internasional antara dua negara dapat saling menguntungkan. Selain pandangan umum ini, masih ada pandangan spesifik (specific views) yang menjelaskan mengapa perdagangan internasional harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Pandangan spesifik tersebut adalah spesialisasi.

4.2.2 Kerjasama Ekonomi Antara Indonesia dan Pelaku Perdagangan Internasional

Untuk mewujudkan kepentingan nasional di bidang ekonomi, Indonesia menjalin hubungan luar negeri melalui kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak dalam hubungan internasional yang juga berorientasi pada ekonomi. Dalam kerjasama ini, Indonesia selalu mendorong masyarakat untuk menghargai satu sama lain, tidak mencampuri urusan domestik negara lain, menolak penggunaan kekerasan, dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia mencakup kerjasama bilateral, regional, dan multilateral (Bappenas, 2009).

1. Kerjasama Bilateral

Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara dan satu wilayah khusus non-self governing. Mitra kerjasama Indonesia tersebar di delapan kawasan, termasuk Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, serta Eropa Tengah dan Timur. Beberapa negara yang menjalin kerjasama perdagangan bilateral dengan Indonesia adalah Amerika Serikat dan Belgia.

Dalam bidang ekonomi, Indonesia dan Amerika Serikat menjalin kerjasama dalam investasi, pariwisata, dan perdagangan. Amerika Serikat adalah investor kedua terbesar di Indonesia dengan nilai investasi mencapai USD 359,1. Jumlah turis Amerika Serikat yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2010 mencapai 171.528 orang. Nilai total perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat pada tahun 2016 mencapai USD 13,02 miliar, menjadikan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama ketiga Indonesia setelah China dan Jepang. Dari total nilai perdagangan tersebut, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai USD 9,13 miliar, memberikan keuntungan sebesar USD 5,23 miliar bagi Indonesia.

Kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Belgia meliputi investasi dan perdagangan. Belgia menanamkan investasi di Indonesia di berbagai sektor utama seperti perkebunan, baja, farmasi, garmen dan tekstil, pergudangan, transportasi, dan telekomunikasi. Dalam perdagangan, kedua negara melakukan ekspor dan impor satu sama lain. Beberapa komoditas ekspor Indonesia yang diimpor oleh Belgia antara lain alas kaki, pakaian, furniture, perekam suara, benang sintetis, ban, kopi, kayu tripleks, daun tembakau, kertas, lampu, jeroan, dan cat sintesis. Sementara itu, komoditas ekspor Belgia yang diimpor Indonesia antara lain produk kimia, susu terkonsentrasi, kompresor angina, kertas daur ulang, darah/vaksin raw materials, produk kimia nitrogen heterosiklik, pupuk kimia, mentega, truk, obat-obatan, coklat, dan tepung gandum. Belgia juga memiliki beberapa perusahaan besar di Indonesia, seperti Solval di bidang kimia, SIPEF di bidang perkebunan, Bekaert di bidang industri baja, dan Delhaize di bidang retail dan supermarket.

2. Kerjasama Regional

Indonesia menjalin kerjasama regional atau kerjasama kawasan dengan berbagai negara yang berada dalam tiga lingkaran konsentris. Lingkaran pertama adalah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), lingkaran kedua adalah ASEAN + 3 (Jepang, China, Korea Selatan), dan lingkaran ketiga adalah negara-negara atau kerjasama kawasan tertentu di luar dua lingkaran sebelumnya. ASEAN adalah organisasi yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Anggota pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring waktu, negara-negara lain bergabung menjadi anggota ASEAN, termasuk Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuan awal pembentukan ASEAN adalah untuk memfasilitasi kerjasama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas regional, dan membentuk kerjasama dalam berbagai bidang kepentingan bersama. Selama beroperasi, ASEAN telah mengembangkan berbagai agenda politik penting, seperti Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN) dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC), yang menjadi dasar bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai. Pada tahun 2015, ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

MEA adalah integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan wilayah ASEAN yang aman dengan pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, mengentaskan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. MEA memiliki empat karakteristik utama: pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang kompetitif, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Untuk mencapai karakteristik ini, ASEAN melakukan berbagai upaya, termasuk aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, e-commerce, pengembangan UKM, dan inisiatif

integrasi ASEAN. Selain itu, ASEAN juga melakukan Kerjasama Ekonomi ASEAN +1 dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Mengenai kerjasama regional, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa dalam lingkaran konsentris ketiga, Indonesia mengakui pentingnya menjalin kerjasama dengan negara-negara berkembang yang memiliki pemikiran serupa. Melalui berbagai forum, Indonesia dapat menerapkan diplomasi untuk memperkuat upaya bersama dalam rangka menjembatani kesenjangan antara negara-negara berkembang dan negara maju. Pada tingkat global, Indonesia secara konsisten mengharapkan dan menekankan penguatan multilateralisme melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama dalam menyelesaikan semua masalah perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia juga menolak semua keputusan unilateral yang diambil di luar kerangka kerja PBB (Bappenas, 2009).

3. Kerjasama Multilateral

Selain kerjasama bilateral dan regional, Indonesia juga aktif dalam kerjasama multilateral dengan berbagai organisasi internasional. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, memajukan dan melindungi hak asasi manusia, melakukan kerjasama kemanusiaan, serta meningkatkan pembangunan di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, industri, investasi, komoditas, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Beberapa organisasi internasional yang menjadi mitra kerjasama multilateral Indonesia antara lain Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), G20, Colombo Plan, Developing Eight (D-8), G-15, World Trade Organization (WTO), World Tourism Organization (UN-WTO), Gerakan Non-Blok (GNB), dan Kelompok 77 dan China. Sebagai contoh, keikutsertaan Indonesia dalam G20, sebuah forum internasional yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, memiliki dampak signifikan terhadap peluang kerjasama perdagangan. G20 merupakan forum penting bagi Indonesia untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan negara-negara maju dan berkembang lainnya dalam menangani isu-isu ekonomi dan finansial global. Melalui forum ini, Indonesia dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi global, mempromosikan kepentingan nasionalnya, dan meningkatkan peluang kerjasama perdagangan dengan negara-negara anggota lainnya.

Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam WTO juga membantu dalam memfasilitasi akses pasar dan mempromosikan perdagangan bebas dan adil. Sebagai anggota WTO, Indonesia berkomitmen untuk mengikuti aturan perdagangan internasional yang disepakati bersama, yang pada gilirannya dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Secara keseluruhan, kerjasama multilateral memainkan peran penting dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia (Bappenas, 2009). Melalui kerjasama ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam ekonomi global, mempromosikan kepentingan nasionalnya, dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan dan pembangunan.

4.2.3 Zona Perdagangan

Strategi industrialisasi yang berfokus pada ekspor dapat dipahami sepenuhnya sebagai respons terhadap perubahan dramatis dalam struktur ekonomi dan politik internasional dalam dekade setelah Perang Dunia II. Negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika setelah perang menghadapi tantangan besar untuk mengubah sistem ekonomi warisan kolonial menjadi ekonomi nasional yang mandiri dan layak. Masalah ini juga dihadapi oleh generasi sebelumnya dari bekas koloni (terutama di Amerika Latin) yang telah menemukan peran mereka dalam ekonomi internasional pasca perang. Oleh karena itu, muncul perjuangan untuk industrialisasi. Para perencana dan politisi dari negara-negara baru di era pasca-perang melihat industrialisasi dan pembangunan sebagai hal yang sejalan dan sangat diperlukan. Industrialisasi dilihat sebagai cara untuk melepaskan diri dari ketergantungan kolonial melalui ekspor produk pertanian dan bahan baku. Ini akan mengatasi kendala neraca pembayaran dengan

diversifikasi ekspor dan setidaknya memberikan fondasi bagi ekonomi domestik yang modern dan mandiri.

Aliran modal internasional telah mengikuti arus perdagangan internasional dan merupakan bagian utama dari investasi asing, seperti bagian utama perdagangan dunia antara negara-negara maju. Namun, harus diakui bahwa dengan pertumbuhan perusahaan transnasional (TNCs), produksi teknologi berskala besar yang baru dan konsekuensi baru dari divisi internasional tenaga kerja, peran negara-negara kurang berkembang (LDCs) dalam perekonomian internasional telah berubah secara kualitatif sejak tahun 1960-an. Harus juga diakui bahwa, meskipun negara-negara kurang berkembang berada dalam posisi yang rentan dan lebih atau kurang berdaya dalam perekonomian dunia pasca perang, sumber daya, pasar, dan kesediaan politik mereka semuanya menjadi perhatian penting bagi negara-negara industri. Sejak tahun 1940-an, kekuatan industri utama yang dipimpin oleh Amerika Serikat terlibat dalam upaya besar untuk merekonstruksi ekonomi pasar internasional sedemikian rupa untuk memungkinkan mereka mendapatkan kembali atau memperluas dominasi ekonomi mereka.

Strategi Industrialisasi yang diadopsi oleh negara-negara kurang berkembang (LDCs) dari tahun 1940-an dapat dijelaskan sebagai inisiatif mereka untuk pertumbuhan ekonomi. Dan mereka juga dapat menjelaskan hal itu sebagai teknik dimana pusat metropolitan pada periode pasca-kolonial menarik bekas koloni kembali ke dalam sistem internasional yang melayani kepentingan negara-negara maju. Kelahiran industrialisasi berbasis ekspor yang diikuti erat oleh kedatangan perusahaan transnasional (TNC), di mana perusahaan-perusahaan besar melakukan investasi langsung dan produksi di dua negara atau lebih. TNC, yang berbeda dari investasi asing, memiliki kekuatan utama yang terletak pada teknologi, keterampilan dan juga bergerak bersama dengan modal. Perubahan dalam teknologi produksi menambahkan motif baru untuk penetrasi TNC di negara-negara kurang berkembang.

Pemerintah negara berkembang seringkali didorong untuk menanggung sebagian dari biaya produksi aktual dengan menyediakan infrastruktur, lokasi, layanan, dan lainnya. Salah satu ciri khas strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor yang sering menjadi taktik utama adalah pembentukan zona pemrosesan ekspor (EPZ) atau zona perdagangan bebas (FTZ). Zona-zona ini adalah kantong-kantong kecil industri berbasis ekspor, yang terpisah dari ekonomi domestik negara tuan rumah. Berbagai istilah telah digunakan sepanjang waktu, mencerminkan berbagai aktivitas yang dilakukan di zona tersebut. Istilah yang paling umum digunakan biasanya adalah zona perdagangan bebas (FTZ), zona pemrosesan ekspor (EPZ), zona ekonomi khusus (SEZ), dan zona industri bebas (IFZ). Semua zona ini memiliki beberapa fitur dasar yang sama pada umumnya.

Di dalam kantong-kantong ini, perusahaan-perusahaan dari investasi asing dapat menikmati berbagai perlakuan khusus termasuk impor barang dan bahan baku tanpa batas, penggunaan tanah dan bangunan yang disubsidi, serta infrastruktur dan layanan yang disediakan oleh pemerintah lokal, insentif keuangan dan pajak, dan konsesi bea cukai. Selain itu, peraturan seringkali kurang ketat atau dilonggarkan. Prosedur administratif biasanya efisien dan kontrol pemerintah disederhanakan melalui otoritas zona. Penawaran spesifik yang ditawarkan bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi fitur umum biasanya dibuat hampir menyeluruh untuk menghindari kontrol pajak dan impor, dengan syarat impor barang setengah jadi hanya digunakan di zona dan bahwa produk akhir akan diekspor.

1. Zona Perdagangan Khusus (*Special Trade Zone*)

Negara yang paling berhasil dalam menerapkan Zona Ekonomi Khusus (SEZ) adalah China. Ketika pertama kali memutuskan untuk membangun SEZ, China tidak memiliki pengalaman dalam menarik investasi asing. Seperti yang kita ketahui, China adalah negara yang menganut ideologi komunisme yang menentang sistem kapitalisme (Hernawan, 1967). Strategi pembangunan yang diterapkan sebelumnya adalah model substitusi impor yang protektif dan mengisolasi diri dari ekonomi global. Model substitusi impor ini digunakan oleh China untuk memenuhi kebutuhannya, yang berarti tujuan dari model ini adalah untuk tidak lagi mengimpor produk tertentu dari luar negeri, melainkan

memproduksinya sendiri di dalam negeri. Hal ini memicu stagnasi ekonomi dan pertumbuhan yang sangat rendah, bahkan defisit di China. Untuk mengatasi masalah ini, negara harus mengubah strategi dari yang protektif dan tertutup terhadap ekonomi global menjadi lebih terbuka, salah satunya dengan melibatkan peran investor asing dalam pembangunan. Namun, negara tidak dapat sepenuhnya memberikan kebebasan bagi investor asing untuk masuk. Jika tidak dilakukan secara selektif, masuknya investor asing dapat menguras sumber daya dan pada akhirnya akan menggerogoti kedaulatan negara, tanpa memberikan manfaat yang signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro bahwa perusahaan-perusahaan asing tidak tertarik untuk mendukung upaya pembangunan suatu negara. Mereka hanya fokus pada upaya memaksimalkan keuntungan atau tingkat hasil finansial atas setiap sen modal yang mereka investasikan.

Oleh karena itu, peran zona khusus seperti SEZ dalam membuka diri terhadap ekonomi global menjadi sangat penting bagi suatu negara untuk menghindari kekhawatiran-kekhawatiran di atas. Menurut Zhu Ying, kebijakan SEZ sangat penting dalam konteks ini. Negara yang paling berhasil dalam menerapkan Zona Ekonomi Khusus (SEZ) adalah China. Saat pertama kali memutuskan untuk membentuk SEZ, China tidak memiliki pengalaman dalam menarik investasi asing. Seperti yang kita ketahui, China adalah negara yang menganut ideologi komunisme yang menentang sistem kapitalisme. Strategi pembangunan yang diterapkan sebelumnya adalah model substitusi impor yang protektif dan mengisolasi diri dari ekonomi global. Model substitusi impor ini digunakan oleh China untuk memenuhi kebutuhannya, yang berarti tujuan dari model ini adalah untuk tidak lagi mengimpor produk tertentu dari luar negeri, melainkan memproduksinya sendiri di dalam negeri. Hal ini memicu stagnasi ekonomi dan pertumbuhan yang sangat rendah, bahkan defisit di China. Untuk mengatasi masalah ini, negara harus mengubah strategi dari yang protektif dan tertutup terhadap ekonomi global menjadi lebih terbuka, salah satunya dengan melibatkan peran investor asing dalam pembangunan.

Namun, negara tidak dapat sepenuhnya memberikan kebebasan bagi investor asing untuk masuk. Jika tidak dilakukan secara selektif, masuknya investor asing dapat menguras sumber daya dan pada akhirnya akan menggerogoti kedaulatan negara, tanpa memberikan manfaat yang signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro bahwa perusahaan-perusahaan asing tidak tertarik untuk mendukung upaya pembangunan suatu negara. Mereka hanya fokus pada upaya memaksimalkan keuntungan atau tingkat hasil finansial atas setiap sen modal yang mereka investasikan.

Oleh karena itu, peran zona khusus seperti SEZ dalam membuka diri terhadap ekonomi global menjadi sangat penting bagi suatu negara untuk menghindari kekhawatiran-kekhawatiran di atas. Menurut Zhu Ying, kebijakan pengembangan zona khusus merupakan kebijakan nasionalis yang berorientasi internasional, dan penggunaannya sebagai alat eksperimen terhadap masuknya investasi asing. Dengan pendekatan ini, negara bertujuan membuka diri terhadap masuknya perusahaan-perusahaan asing demi meningkatkan ekspor. Namun, pada saat yang sama negara juga melakukan proteksi terhadap ekonomi domestik dengan mengisolasi praktik-praktik ekonomi perusahaan asing sehingga mencegah akses perusahaan-perusahaan asing tersebut terhadap pasar dalam negeri. Dengan demikian negara telah menghindarkan persaingan langsung antara perusahaan-perusahaan asing dengan perusahaan-perusahaan local (Todaro, 1990).

2. Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*)

Istilah Zona Perdagangan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ), sebagai salah satu bentuk dari Zona Ekonomi (*Economic Zone*), memiliki berbagai definisi yang cukup beragam. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan sudut pandang atau fokus tinjauan para ahli tentang konsep FTZ itu sendiri. Menurut Capella dan Hatman, Zona Ekonomi adalah "wilayah tertentu dalam suatu negara yang beroperasi di bawah aturan yang memberikan insentif investasi khusus, termasuk perlakuan bebas bea untuk impor dan untuk pabrik manufaktur yang mengekspor kembali produk mereka". Perdagangan bebas adalah konsep teoritis yang mengasumsikan sistem perdagangan internasional yang dibebaskan dari hambatan yang

disebabkan oleh regulasi pemerintah suatu negara, baik yang disebabkan oleh pengenaan tarif (tariff barriers) maupun hambatan non-tarif (non-tariff barriers) (Arafat, 2010). Oleh karena itu, FTZ memiliki arti, menurut Charles W Thurston, sebagai "esensi dari enklave bebas pajak dan tidak dianggap bagian dari negara sejauh peraturan impor berlaku. Ketika suatu barang meninggalkan zona perdagangan bebas dan secara resmi diimpor ke negara tuan rumah Zona Perdagangan Bebas, semua bea dan regulasi dikenakan.

Banyak definisi lain mengenai FTZs dapat ditemukan dalam berbagai literatur, namun ada empat karakteristik utama zona perdagangan bebas (FTZs), yaitu:

- a. Merupakan kawasan industri yang mengkhususkan diri di bidang manufaktur untuk ekspor dan menawarkan perusahaan pada kondisi perdagangan bebas dan lingkungan peraturan yang liberal (Madani, 1999).
- b. Merupakan zona industri dengan insentif khusus yang dibentuk untuk menarik investor asing, di mana bahan impor mengalami beberapa tingkat proses sebelum diekspor kembali (ILO, 1998).
- c. Merupakan area yang jelas dibatasi dan tertutup dengan wilayah pabean nasional, sering terletak pada lokasi geografis yang menguntungkan (Madani, 1999) dengan infrastruktur yang sesuai dengan pelaksanaan perdagangan dan operasional industri serta tunduk pada prinsip bea cukai dan fiscal segregation.
- d. Merupakan suatu kawasan industri yang jelas digambarkan sebagai kantong perdagangan bebas dalam pabean dan rezim perdagangan yang ditetapkan oleh suatu negara, dimana perusahaan manufaktur asing, terutama yang melakukan produksi industri berorientasi ekspor, mendapat keuntungan dari sejumlah insentif fiskal dan keuangan ((Kusago & Tzannatos, 1998).

Indonesia memiliki empat Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) yaitu Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Keempat kawasan ini dibentuk berdasarkan pertimbangan pentingnya pengembangan wilayah regional untuk mendorong perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, pengembangan pariwisata, dan penarikan investasi dari dalam dan luar negeri. Penetapan kawasan perdagangan bebas ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun berada di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis provinsi ini, yang membentang dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia, memberikan peran strategis bagi Provinsi Kepulauan Riau dalam lalu lintas perdagangan dunia. Dengan penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 44 Tahun 2007, peluang bagi wilayah FTZ Batam, Bintan, dan Karimun untuk meningkatkan hubungan perdagangan internasional dapat diperbesar (Arafat, 2010).

Pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun diperkuat secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan diikuti oleh beberapa Peraturan Pemerintah. Penetapan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan ini adalah kawasan strategis nasional yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting secara nasional terhadap ekonomi nasional. Pengembangan kawasan perusahaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun (FTZ Karimun) merupakan tantangan bagi Badan Pengusahaan Karimun (BPKBPB) untuk dapat mengambil kebijakan strategis dalam memilih sumber pendapatan potensial untuk menggerakkan perekonomian kawasan dan menarik investasi asing. Implementasi peran Badan Pengusahaan di Karimun masih mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan negara lain, yang dibuktikan dengan masih kurangnya infrastruktur yang jauh dari standar kelayakan.

3. Peralihan Status Zona Perdagangan, Kota Batam

Batam, yang secara geografis terletak di jalur pelayaran internasional yang melintasi Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia, telah berubah menjadi Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ). Kawasan ini berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia dan berada di tengah-tengah kawasan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Dengan posisinya yang sangat strategis, Batam menjadi salah satu titik penting bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya dengan menetapkan berbagai status, seperti Bonded Zone dan FTZ, sebagai bagian dari kebijakan untuk menarik Investasi Asing Langsung (FDI). Batam, dengan luas wilayah sebesar 415 km², cukup memadai untuk aktivitas ekonomi seperti investasi dan produksi industri, didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dari wilayah tersebut dan sekitarnya. Ditambah lagi, Batam memiliki infrastruktur yang terus berkembang, membuat kawasan ini menarik bagi investor lokal dan terutama investor asing.

Berbagai kebijakan khusus pemerintah mengenai pajak, kepabeanan, dan peraturan lainnya telah membawa kemajuan ekonomi yang signifikan. Mayoritas industri berorientasi ekspor di Batam merupakan eksistensi perusahaan asing, baik yang berupa relokasi maupun investasi baru. Contohnya adalah Singapura, sebuah negara dengan lahan terbatas dan industri yang relatif jenuh. Batam dan pulau-pulau sekitarnya dipilih sebagai tempat relokasi alternatif yang paling logis bagi Singapura. Pada tahun 1990, Singapura mereposisi program restrukturisasi industrinya, yang diwujudkan melalui program regionalization 2000 (R 2000). Program ini bertujuan untuk membangun kawasan industri perkotaan di negara lain sebagai tempat baru kegiatan produksi dengan fasilitas yang sama persis dengan yang ada di Singapura. Perusahaan-perusahaan yang dipindahkan hanya mendirikan pabriknya di negara tujuan, tetapi kantor pusat tetap berada di Singapura. Dengan demikian, Singapura berperan sebagai basis operasional usaha mereka. Singapura pun terus meningkatkan berbagai investasi di Batam, yang merupakan tempat relokasi paling logis bagi negara tersebut. Hingga sebagian besar perusahaan asing yang beroperasi di Batam merupakan perusahaan Singapura, atau perusahaan-perusahaan negara lain yang basis operasionalnya berada di Singapura.

Pada tanggal 25 Juni 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sepakat untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi dengan menyelenggarakan dan menandatangani penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone—SEZ) Batam. Kesepakatan ini dilakukan oleh Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Lim Hng Kiang. Ini merupakan tanda jelas komitmen dari kedua belah pihak untuk menjadikan wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan dinamis yang memberikan keuntungan nyata bagi kedua negara.

Menindaklanjuti hasil MoU tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam. Selain itu, pemerintah beralasan penetapan Batam menjadi kawasan perdagangan bebas/free trade zone (FTZ) dikarenakan kegentingan yang memaksa, yaitu keadaan ekonomi Indonesia saat ini tidak mengalami kemajuan. Menurut pemerintah kebutuhan untuk segera menjadikan Batam sebagai kawasan FTZ dikarenakan secara de facto selama ini ternyata Batam menjalankan aturan-aturan sebagaimana kawasan perdagangan bebas. Hal ini ditandai dengan berbagai insentif fiskal (tax incentives) terhadap kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke Batam dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, terdapat kendala yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya, seperti yang sering dikemukakan adalah landasan payung hukum pembentukan FTZ, ini mengacu kepada banyak negara yang memberlakukan FTZ pada daerah dalam negaranya, yang diketahui bahwa pembentukan FTZ biasanya ditetapkan dengan Undang-Undang, hal mana secara hukum kekuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan Pulau Batam saat ini masih mendasarkan kepada KEPPRES maupun Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Keputusan Menteri (KEPMEN), seperti halnya FTZ yang ditetapkan pada Batam hanya sebatas PP, yang mengakibatkan banyak tertundanya berbagai investasi asing dan juga membuat beberapa perusahaan asing yang telah

melakukan kegiatan ekonomi di Batam memilih untuk hengkang dan memindahkan lokasi usahanya ke negara lain seperti China, Vietnam, India dan bahkan ke negara tetangga Malaysia.

Kemudian pada tahun 2009 Batam yang berstatus FTZ dialihkan statusnya menjadi SEZ, yang merupakan perwujudan dari diplomasi ekonomi antara RI dan Singapura sesuai dengan MoU pembentukan special economic zone (SEZ) Batam. Dan ini ditandai dengan disahkannya UU No.39 Tahun 2009. SEZ adalah salah satu strategi untuk menarik investasi serta meningkatkan daya saing perdagangan internasional. Belajar dari sukses pengembangan SEZ di China yang juga menggandeng Singapura, pola kerja sama seperti itu akan diaplikasikan di Indonesia. Tetapi sangat disayangkan saat Indonesia memberlakukan SEZ bagi Batam status FTZ dihapuskan. Tidak seperti halnya China yang telah sukses mengembangkan SEZ, tidak menghapuskan FTZ yang berada dalam SEZ itu sendiri.

4.3 Penutup

4.3.1 Rangkuman

Perdagangan internasional melibatkan pertukaran barang dan jasa antar negara, yang menghasilkan keseimbangan antara perdagangan dan investasi di area tertentu. Perdagangan internasional bersifat global, tidak hanya spesifik pada area tertentu. Indonesia merupakan pemain kunci dalam kerja sama ekonomi internasional, membina kerja sama dengan berbagai negara dalam komunitas ekonomi internasional. Kerja sama ini mencakup kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Perdagangan internasional telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1960-an, dengan perusahaan transnasional yang memproduksi teknologi baru dan menghasilkan peningkatan perdagangan internasional. Pemerintah sering kali berupaya meningkatkan harga barang dengan menyediakan infrastruktur, lokasi, dan layanan. Jenis industrialisasi berbasis ekspor yang paling umum adalah zona perdagangan bebas (FTZ), zona pemrosesan ekspor (EPZ), zona ekonomi khusus (SEZ), dan zona industri bebas (IFZ).

4.3.2 Evaluasi

1. Kemukakan pendapat Anda definisi *Free Trade Zone*!
2. Mengapa Pulau Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun ditetapkan sebagai *Free Trade Zone*?
3. Uraikan bagaimana status Pulau Batam dalam kancah perdagangan internasional saat ini?
4. Mengutip pendapat Gunadi (2023) pada berita online mncrijaya.com, terdapat ribuan perjanjian perdagangan yang justru merugikan Indonesia. Terkait pernyataan tersebut, uraikan pendapat Anda langkah apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi negara dari praktek ketidakadilan perdagangan internasional?
5. Mengutip pendapat Faisal (2023) pada berita online republika.com, Ekspor Indonesia menurut karena kondisi ekonomi global, terutama kondisi ekonomi negara mitra utama Indonesia. Deskripsikan pendapat Anda, bagaimana peluang dan tantangan Ekspor Indonesia ke negara-negara maju?

4.3.3 Daftar Pustaka

- Apridar. (2015). *Ekonomi Peradaban : Ekonomi, Politik, Pendidikan dan Keagamaan*. Graha Ilmu. https://repository.unimal.ac.id/2731/1/BUKU_EKONOMI_PERADABAN.pdf
- Arafat, A. (2010). *Pengalihan Status Free Trade Zone (FTZ) Menjadi Special Economic Zone (SEZ), Dalam Hubungan Kerjasama Ekonomi Indonesia Dan Singapura, Contoh Kasus Batam Periode Tahun 2007-2010*. Universitas Indonesia.
- Bappenas. (2009). *Perdagangan Dan Investasi di Indonesia*. 6.
- Hernawan, I. (1967). Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura Dalam Pengembangan Special Economic Zone Di Wilayah Batam, Bintan Dan Karimun Setelah Diberlakukannya Asean Economic Community Tahun 2006-2017. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

- Kusago, T., & Tzannatos, Z. (1998). *Export Processing Zones: A Review in Need of Update* (Issue January).
- Madani, D. (1999). *A Review of the Role As instruments for encouraging economic* (Issue November).
- PKPPIM Kementerian Keuangan. (2019). *Kerja Sama Multilateral Indonesia di Sektor Keuangan* (Vol. 1). www.ipbpress.com
- Shoemith Dennis ed. (1986). *Export processing Zones in five countries the economic and human consequences*.
- Todaro, M. P. (1990). Economic Development in the Third World, Fourth Edition. In *Population and Development Review* (Vol. 16, Issue 1). <https://doi.org/10.2307/1972548>

BAB 5

KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Deskripsi Singkat

Kebijakan fiskal adalah strategi ekonomi makro yang dikelola oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Presiden memberikan wewenang pengelolaan keuangan dan harta negara kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan perwakilan pemerintah dalam kepemilikan harta negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal biasanya mencerminkan keputusan pemerintah dalam menetapkan jumlah pengeluaran atau belanja dan pendapatan, yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi ekonomi. Keputusan tersebut, pada tingkat praktis, dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah, yang di Indonesia lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam mendorong aktivitas ekonomi negara, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan. Namun, dampak kebijakan fiskal terhadap aktivitas ekonomi negara sangat luas. Berbagai indikator ekonomi lainnya juga mengalami perubahan sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan fiskal oleh pemerintah. Diharapkan dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi selalu positif, sedangkan dampak terhadap inflasi diharapkan negatif. Namun, secara teoritis, kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah tanpa adanya peningkatan sumber pajak, sebagai sumber utama pendanaan pemerintah, akan mengakibatkan peningkatan defisit anggaran (Easterly & Rebelo, 1993). Pada Bab 5 ini mempelajari Kebijakan Fiskal Indonesia yang meliputi Orientasi Kebijakan Fiskal, Fungsi Kebijakan Fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kebijakan Ekonomi Indonesia, dan Garis Waktu Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

5.1.2 Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan Kebijakan Fiskal Indonesia

5.1.3 Indikator

1. Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi Orientasi Kebijakan Fiskal
2. Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi Fungsi Kebijakan Fiskal
3. Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
4. Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi Kebijakan Ekonomi Indonesia
5. Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi Garis Waktu Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

5.2 Pembahasan

Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen fiskal untuk mempengaruhi fungsi sistem ekonomi agar dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Kebijakan fiskal sering didefinisikan sebagai pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu ekonomi, termasuk kebijakan perpajakan yang dipungut dan dikumpulkan, pembayaran transfer, pembelian barang dan jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran, yang mencakup semua tingkat pemerintahan (Fahriska & Zulkifli, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa presiden memberikan kuasa

pengelolaan keuangan dan harta negara kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan harta negara yang dipisahkan. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dituangkan dalam APBN sebagai rencana operasional keuangan pemerintah, antara lain adalah :

- a. Perubahan dalam tarif pajak yang menghasilkan peningkatan pendapatan akan mempengaruhi ekonomi.
- b. Pengeluaran pemerintah dapat merangsang ekonomi melalui dampaknya pada pengeluaran agregat.
- c. Politik anggaran (surplus, seimbang, atau defisit) sebagai respons terhadap suatu kondisi.
- d. Strategi pembiayaan dan pengelolaan utang (Kebijakan Fiskal dan Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran).

Definisi lain menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah strategi yang dijalankan pemerintah terkait dengan pendapatan (penerimaan) dan belanja (pengeluaran) uang pemerintah. Secara sederhana, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah sebagai bentuk intervensi dalam mengelola anggaran untuk mempengaruhi ekonomi serta memaksimalkan kesejahteraan dan stabilitas dalam bidang ekonomi. Seiring perkembangannya, kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi empat jenis berdasarkan (Basri, 2022):

- a. Pembiayaan fungsional (fungsional finance)
- b. Pengelolaan anggaran (the managed budget approach)
- c. Stabilisasi anggaran otomatis (the stabilization budget)
- d. Pendekatan anggaran belanja seimbang (balanced budget approach)

Secara singkat, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen-instrumen fiskal untuk mempengaruhi fungsi sistem ekonomi agar dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi.

5.2.1 Orientasi Kebijakan Fiskal

Setelah krisis multidimensi pada tahun 1997, pemerintah mengarahkan kebijakan fiskalnya pada dua tujuan utama, yaitu mendukung konsolidasi fiskal untuk mencapai ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability) dan menciptakan ruang gerak fiskal (fiscal space) yang cukup untuk memperkuat stimulus fiskal, sehingga dapat mendorong ekonomi domestik. Kedua tujuan ini tetap menjadi prioritas dalam kebijakan di tahun-tahun berikutnya. Dalam periode 2000-2009, upaya untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal ini dibagi menjadi fase konsolidasi (penyehatan) APBN pada periode 2000-2005 dan fase stimulus fiskal pada periode 2006-2009. Secara operasional, konsolidasi fiskal (penyehatan APBN) dicapai melalui kontrol defisit anggaran dengan langkah-langkah berikut. Pertama, meningkatkan pendapatan negara dengan fokus pada peningkatan penerimaan pajak dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Kedua, mengendalikan dan mempertajam prioritas alokasi belanja negara sambil tetap memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum. Ketiga, mengelola utang negara secara sehat untuk menutupi kesenjangan pembiayaan anggaran yang dihadapi pemerintah. Keempat, memperbaiki struktur penerimaan dan alokasi belanja negara, dengan meningkatkan peran sektor pajak non-migas, dan secara bertahap mengalihkan subsidi kepada bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu agar lebih tepat sasaran. Kelima, mengelola keuangan negara secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, yang dilakukan antara lain melalui perbaikan manajemen pengeluaran negara. Sementara itu, penguatan stimulus fiskal terutama dicapai melalui optimalisasi belanja negara untuk infrastruktur pembangunan, alokasi belanja negara untuk aktivitas dan sektor yang dapat mendorong ekonomi, serta pemberian insentif fiskal .

5.2.2 Fungsi Kebijakan Fiskal

Pemerintah seringkali menargetkan tujuan-tujuan yang lebih spesifik dalam kebijakan fiskalnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Adapun tujuan-tujuan spesifik tersebut meliputi:

- a. Koreksi terhadap ketidakseimbangan sementara,
- b. Stimulasi pertumbuhan ekonomi, dan
- c. Redistribusi pendapatan.

Dengan tujuan-tujuan spesifik tersebut, kebijakan fiskal dapat beroperasi dalam jangka pendek (stabilisasi) dan jangka panjang secara bersamaan. Hal ini karena sebagian besar langkah-langkah kebijakan fiskal jangka pendek memiliki konsekuensi jangka panjang, dan sebaliknya, langkah-langkah kebijakan fiskal jangka panjang memiliki implikasi jangka pendek. Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, ada tiga aktivitas utama otoritas fiskal yang mencerminkan fungsi-fungsi spesifik kebijakan fiskal. Ketiga fungsi spesifik tersebut adalah fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave & Musgrave, 1989). Ketiga cabang ekonomi pemerintah adalah:

- a. Stabilisasi: Bertanggung jawab untuk memastikan perekonomian beroperasi pada tingkat pekerjaan penuh (full employment) dengan harga yang stabil. Tujuan utama dari fungsi stabilisasi kebijakan fiskal adalah menjaga tingkat pendapatan nasional aktual mendekati potensialnya. Dengan tujuan tersebut, "kebijakan stabilisasi" sering diartikan sebagai manipulasi permintaan agregat untuk mencapai full employment dan stabilitas harga (price stability) secara bersamaan.
- b. Alokasi: Pemerintah melakukan intervensi dalam perekonomian untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Intervensi ini dapat dilakukan dengan cara langsung membeli barang-barang seperti pertahanan dan pendidikan, dan secara tidak langsung melalui berbagai pajak dan subsidi yang mendorong atau menghambat aktivitas-aktivitas tertentu.
- c. Distribusi: Berkaitan dengan bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat didistribusikan di antara anggotanya, berkaitan dengan isu-isu seperti pemerataan, dan *trade-off* antara pemerataan dan efisiensi.

Namun, fungsi kebijakan fiskal menjadi lebih jelas ketika meminimalisir volatilitas atau fluktuasi siklus bisnis, di mana fungsi "stabilisasi" sangat dibutuhkan oleh perekonomian. Dalam kerangka fungsi stabilisasi tersebut, kebijakan fiskal dianggap sebagai alat yang sangat efektif dalam membantu memperkecil siklus bisnis. Mengingat sumber fluktuasi ekonomi jangka pendek berasal dari guncangan permintaan agregat dan penawaran agregat, maka upaya untuk mengendalikan fluktuasi siklus bisnis harus dilakukan dengan mengendalikan permintaan agregat dan penawaran agregat melalui berbagai instrumen kebijakan ekonomi makro, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal yang tepat. Kebijakan-kebijakan ini mempengaruhi siklus bisnis, sehingga sangat berpotensi menstabilkan perekonomian dari berbagai fluktuasi siklus bisnis jika dilaksanakan dengan baik, tepat, akurat, dan prudent. Sebaliknya, jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak dijalankan dan dikelola dengan baik, justru akan dapat menciptakan masalah baru pada ketidakstabilan ekonomi yang mungkin bahkan akan lebih buruk lagi (Mankiw, 2009).

Sebuah pandangan alternatif mengenai fungsi kebijakan fiskal adalah bahwa secara bersamaan, kebijakan fiskal ditujukan untuk menciptakan lingkungan makroekonomi yang mendukung dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pengangguran, mengendalikan tingkat inflasi, dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata. Ada tiga tujuan utama dari kebijakan fiskal:

- a. Meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi, atau memperbaiki kondisi ekonomi.
- b. Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran, serta menjaga stabilitas harga secara umum.
- c. Menstabilkan harga secara umum, terutama dalam upaya mengendalikan inflasi.

Di Indonesia, sebagai negara berkembang, kebijakan fiskal yang diterapkan cenderung ekspansif dengan menggunakan instrumen anggaran defisit. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat utama dalam kebijakan fiskal, sehingga pengelolaan anggaran, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan agar kebijakan fiskal yang ekspansif dengan anggaran defisit tidak menimbulkan masalah jangka panjang. Oleh karena itu, merumuskan strategi pembiayaan anggaran yang tepat dan terkendali sangat penting untuk menjaga agar anggaran tetap sehat, dapat dipercaya (credible), dan berkelanjutan (sustainable). Kebijakan fiskal dapat dilihat dari struktur pos-pos dalam APBN. APBN memiliki dua sisi, yaitu sisi pengeluaran dan sisi penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan dana untuk pelaksanaannya.

5.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Keuangan Negara mencakup seluruh aktivitas yang terkait dengan pengelolaan semua hak dan kewajiban Negara. Seluruh aktivitas ini memiliki dampak keuangan, sehingga membutuhkan perencanaan keuangan yang teliti (budgeting atau penganggaran). Anggaran ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola Negara dalam periode tertentu, sebagai alat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah, dan sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilih. Di Indonesia, istilah yang awalnya digunakan untuk menyebut anggaran adalah "begrooting". Namun, sejak Proklamasi Kemerdekaan, istilah yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja, seperti yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

Dalam perkembangannya, kata "Negara" ditambahkan, menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN ini merupakan manifestasi dari pengelolaan keuangan Negara yang tertib, patuh pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap tahun, penyelenggara Negara (Pemerintah) mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN untuk dibahas bersama DPR. Jika disetujui, RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) APBN yang berlaku selama satu tahun anggaran.

Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) :

Sebelumnya, dalam bentuk T-Account (1966-1999), format ini mirip dengan neraca perusahaan, di mana ada keseimbangan antara aset (penerimaan) dan liabilitas (pengeluaran), tanpa mempertimbangkan adanya defisit.

1. Anggaran seimbang
2. Tahun anggaran berjalan dari 1 April hingga 31 Maret tahun berikutnya

Sekarang, dalam bentuk I-account, dimulai sejak tahun 2000

1. Dibuat dalam satu kolom, bagian atas mencatat penerimaan dan bagian bawah mencatat pengeluaran, langsung menunjukkan adanya defisit dan pendanaannya
2. Anggaran tidak seimbang
3. Tahun anggaran berjalan dari 1 Januari hingga 31 Desember.

1. Klasifikasi Belanja Menurut Peraturan Perundang-Undangan

- a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (5), disebutkan bahwa APBN yang telah disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
- b. PP Akuntansi Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Belanja diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Pusat meliputi belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial), belanja modal, belanja lain-lain. Klasifikasi belanja menurut fungsi dibagi menjadi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

2. Klasifikasi Menurut Fungsi

Klasifikasi ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja guna memperoleh manfaat maksimal. Rincian belanja Negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial, disesuaikan dengan tugas masing-masing Kementerian Negara atau Lembaga. Oleh karena itu, program kementerian negara atau lembaga harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

3. Klasifikasi Menurut Jenis Belanja

Pasal 11 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa belanja negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. APBN memiliki dua sisi, yaitu sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan dana untuk pelaksanaannya :

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa,
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai,
- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payments yang meliputi misalnya, pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Selain itu semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana untuk melaksanakannya.

Sisi penerimaan menunjukkan dari mana dana yang diperlukan tersebut diperoleh. Ada empat sumber utama untuk memperoleh dana tersebut, yaitu (Boediono, 1986 dalam Pamuji):

- a. Pajak berbagai macam,
- b. Pinjaman dari bank sentral,
- c. Pinjaman dari masyarakat dalam negeri,
- d. Pinjaman dari luar negeri.

Selanjutnya, dari pos-pos anggaran tersebut akan terlihat dampak kebijakan fiskal untuk perekonomian nasional. Dengan kata lain, suatu kebijakan fiskal adalah suatu aliran kombinasi pos-pos APBN dengan berbagai mekanisme, yang dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

5.2.4 Kebijakan Ekonomi Indonesia

Kebijakan fiskal didefinisikan sebagai taktik ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk membawa ekonomi ke kondisi yang lebih menguntungkan. Ini dicapai dengan melakukan penyesuaian pada pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal, adalah penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengeluaran dan pendapatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif (Mankiw, 2009). Kebijakan fiskal ekspansif adalah strategi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi tingkat pengangguran. Di sisi lain, kebijakan fiskal kontraktif adalah strategi yang bertujuan untuk menurunkan tingkat inflasi dan defisit neraca pembayaran luar negeri.

Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengarahkan ekonomi. Ini mencakup berbagai tindakan seperti menetapkan tingkat pajak, menentukan bagaimana pendapatan pemerintah harus dibelanjakan, dan mengimplementasikan kebijakan untuk mengendalikan inflasi dan defisit. Oleh karena itu, kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menentukan arah dan stabilitas ekonomi suatu negara.

Sebagaimana kita ketahui, salah satu tujuan utama dari perencanaan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut, perlu ada peningkatan dalam pembentukan modal, yang dapat dicapai dengan meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi. Namun, di Indonesia, peningkatan laju pembentukan modal ini menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingkat tabungan yang rendah, yang pada gilirannya disebabkan oleh tingkat pendapatan yang juga rendah. Akibatnya, laju investasi juga rendah, yang berdampak pada rendahnya modal dan produktivitas. Kondisi ini sering disebut sebagai "lingkaran setan kemiskinan". Untuk memutus lingkaran setan ini, diperlukan pembangunan yang terencana. Ada dua cara untuk memutus lingkaran setan tersebut:

1. Melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri, yang disebut "Industrialisasi yang diproteksi".
2. Dengan cara mengumpulkan tabungan wajib, yang disebut "Industrialisasi dengan kemampuan sendiri".

Dasar pemikiran dari perencanaan tersebut adalah:

1. Untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar.
2. Untuk mengurangi pengangguran.

Singkatnya, perencanaan pembangunan sangat diperlukan karena merupakan cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan di negara berkembang dan khususnya di Indonesia. Perencanaan yang baik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, meningkatkan kesempatan kerja, dan untuk pembangunan secara keseluruhan. Perencanaan Ekonomi adalah upaya sadar dari pemerintah untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan perubahan variabel-variabel ekonomi utama (misalnya GDP, Konsumsi, Investasi, Tabungan, dan lain-lain). Rencana ekonomi juga dapat dianggap sebagai serangkaian tujuan (target) ekonomi secara kuantitatif yang spesifik dan harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi dapat mencakup seluruh aspek (komprehensif) atau sebagian aspek.

Proses perencanaan ekonomi melibatkan beberapa tahapan, dan setiap tahapan memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Menyusun tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan pengurangan kemiskinan.
2. Mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selama periode perencanaan, seperti tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, dan tenaga kerja terlatih.
3. Memilih berbagai metode (aktivitas dan alat) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini, proyek-proyek investasi seperti pembangunan jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, dan pusat-pusat kesehatan ditentukan. Selain itu, juga ditentukan perencanaan nasional tentang kebijakan harga, seperti nilai tukar, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, dan subsidi.
4. Melakukan proses pemilihan aktivitas-aktivitas yang potensial dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) tanpa terhambat oleh kendala sumber daya dan organisasional.

Untuk mencapai keberhasilan dalam perencanaan, biasanya diperlukan beberapa hal berikut:

1. Komisi perencanaan: Sebagai badan pelaksana perencanaan yang terorganisir dengan baik.
2. Data Statistik: Perencanaan yang baik membutuhkan analisis menyeluruh tentang potensi sumber daya yang dimiliki dan kekurangannya.
3. Tujuan: Perencanaan harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai.

4. Penetapan sasaran dan prioritas: Penetapan sasaran dan prioritas untuk mencapai tujuan dibuat secara makro dan sektoral.
5. Mobilisasi Sumber Daya: Dalam perencanaan, ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumber daya yang tersedia.
6. Keseimbangan dalam perencanaan: Suatu perencanaan harus mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian untuk menghindari kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan.
7. Sistem Administrasi yang Efisien: Administrasi yang baik dan efisien dan tidak korup adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan.
8. Kebijakan pembangunan yang tepat: Pemerintah harus menetapkan kebijakan pembangunan yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaannya.
9. Administrasi yang ekonomis: Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi, khususnya dalam pengembangan bagian-bagian departemen dan pemerintah.
10. Dasar pendidikan: Administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang kuat. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika masyarakat.
11. Teori konsumsi: Salah satu syarat penting dalam perencanaan pembangunan modern adalah bahwa perencanaan tersebut harus didasarkan pada teori konsumsi.
12. Dukungan masyarakat: Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu perencanaan di dalam suatu negara yang demokratis

Dalam memahami perekonomian suatu negara, penting untuk mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan. Berikut adalah beberapa strategi yang umum digunakan:

1. Strategi Pertumbuhan

Dalam strategi ini, pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi, diharapkan hasil pembangunan akan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat melalui proses '*trickle-down-effect*' atau distribusi ulang hasil pembangunan oleh pemerintah. Bahkan, ada pendapat yang menyatakan bahwa ketimpangan atau ketidakmerataan adalah prasyarat atau kondisi yang harus ada untuk menciptakan pertumbuhan, yaitu melalui proses akumulasi modal oleh lapisan masyarakat yang kaya. Inti dari strategi ini adalah:

- a. Pembangunan ekonomi suatu negara akan berfokus pada upaya pembentukan modal, dan bagaimana menggunakannya secara seimbang, tersebar, terarah, dan terpusat, sehingga dapat menciptakan efek pertumbuhan ekonomi.
- b. Pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan masyarakat yang lemah melalui proses '*trickle-down-effect*' atau distribusi ulang.
- c. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.

2. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Kondisi sosial antara si kaya dan si miskin mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif. Alternatif baru yang muncul adalah strategi pembangunan pemerataan. Strategi ini menekankan peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Namun, ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara sedang berkembang seperti pengangguran massal, kemiskinan struktural dan kepincangan sosial.

3. Strategi Ketergantungan

Teori ketergantungan muncul dari pertemuan ahli-ahli ekonomi Amerika Latin pada tahun 1965 di Mexico City. Konsep ini timbul karena tidak sempurnanya strategi pertumbuhan dan strategi pembangunan dengan pemerataan. Teori ketergantungan menjelaskan dasar-dasar kemiskinan yang diderita oleh negara-negara sedang berkembang, khususnya negara-negara Amerika Latin. Yang menarik

dari teori ketergantungan adalah munculnya istilah dualisme utara-selatan, desa-kota, *core-periphery* yang mencerminkan adanya pemikiran pembangunan yang berwawasan ruang. Inti dari strategi ketergantungan adalah:

- a. Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lain.
- b. Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan bahwa teori ketergantungan memang cukup relevan namun sayangnya sudah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (*Self Development*).

Kemiskinan di negara-negara berkembang seringkali lebih disebabkan oleh ketergantungan mereka terhadap negara atau pihak lain. Oleh karena itu, jika suatu negara ingin bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain adalah meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, dan lebih mencintai produk nasional. Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan bahwa teori ketergantungan memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (*self-development*). Sebab selalu akan gampang sekali bagi kita untuk menumpahkan semua kesalahan pada pihak luar yang memeras, sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja.

4. Strategi yang Berwawasan Ruang

Teori ini dicetuskan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya/maju. Pada argumentasi Myrdall dan Hirschman terdapat dua istilah yaitu "*back-wash effects*" dan "*spread effects*". "*Backwash Effects*" adalah kurang maju dan kurang mampunya daerah-daerah miskin untuk membangun dengan cepat. Sedangkan "*spread effects*" (pengaruh menyebar), tetapi pada umumnya spread-effects yang terjadi adalah jauh lebih lemah dari back-wash effect nya sehingga secara keseluruhan pembangunan daerah yang lebih kaya akan memperlambat jalannya pembangunan di daerah miskin. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyeter dari kaya ke miskin (*Spread Effects*) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (*Backwash-effect*). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

5. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Strategi ini memiliki tujuan untuk menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan dikeluarkannya dokumen: *Employment, Growth, and Basic Needs: A One World Problem*. ILO menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipengaruhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok dan sejenisnya.

5.2.5 Garis Waktu Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Indonesia, sebagai negara berkembang, telah melalui berbagai tahapan dan strategi dalam perencanaan pembangunan ekonominya. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pada bagian ini akan membahas secara mendalam tentang garis waktu perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Mulai dari era awal kemerdekaan, melalui berbagai

periode pembangunan, hingga era reformasi dan era globalisasi saat ini. Kami akan menelusuri bagaimana perencanaan pembangunan ekonomi telah berubah dan berkembang seiring dengan perubahan politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia, berikut ini adalah garis waktu kebijakan ekonomi yang pernah diterapkan oleh Indonesia (Arham, 2013):

1. Periode Orde Lama

Perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dibagi dalam beberapa periode. Pada periode sebelum Orde Baru, ada dua fase penting. Fase pertama adalah periode 1945-1950, yang ditandai dengan Perencanaan Hatta (1947), Rencana Kasimo atau Plan Produksi Tiga Tahun RI (1948-1950), dan Rencana Kesejahteraan Istimewa (1950-1951). Periode ini pada dasarnya adalah periode revolusi, di mana Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama periode ini, Indonesia menerapkan dua UUD, yaitu UUD 1945 dan Konstitusi RIS. Strategi utama pada periode ini adalah meningkatkan kemakmuran rakyat melalui pembaharuan tenaga produktif dan jalur industrialisasi, dengan tetap berpegang pada identitas sebagai negara agraris.

Fase kedua adalah periode 1951-1955, yang ditandai dengan Perencanaan Urgensi Perekonomian yang diusulkan oleh Sumitro Djojohadikusumo. Periode ini merupakan periode pemantapan kemerdekaan, di mana kemerdekaan Indonesia telah diakui secara internasional, meskipun Irian Barat masih belum diserahkan oleh Belanda. Pada periode ini, Indonesia menerapkan UUDS. Rencana pembangunan ekonomi pada periode ini hanya mencakup waktu 1951 dan 1952, dan tidak ada rencana pembangunan ekonomi yang disusun oleh pemerintah dari tahun 1952 hingga 1955. Strategi utama pada periode ini adalah peningkatan nilai kemakmuran masyarakat melalui pengembangan industri-industri kecil, peningkatan kemajuan badan-badan koperasi, penguatan organisasi dan perkumpulan untuk usaha perniagaan kecil dan menengah, serta pengembangan industri berat sebagai penyokong kemajuan perindustrian dalam negeri di daerah-daerah. Pada periode ini, peranan pemerintah diharapkan dominan dalam pelaksanaan rencana pembangunan.

Periode 1956-1960 merupakan periode Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (RTLTP) di Indonesia. Selama periode ini, kabinet pemerintahan sering kali berganti. Sengketa Irian Barat semakin meningkat, yang mengakibatkan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Perkembangan politik di negara ini semakin memanas, yang mengakibatkan perekonomian Indonesia berkembang ke arah yang tidak menentu. Strategi utama pada periode ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengalokasikan dana tahunan. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan (13%); pengairan dan proyek-proyek multipurpose (25%); alat-alat perhubungan (25%); pertambangan dan industri (25%); serta urusan sosial seperti pengajaran, kesehatan, perumahan, dan lain-lain (12%).

Secara politis, RUU tentang RLTP ini telah disetujui oleh DPR. Namun, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Garis-garis besar rencana itu perlu diubah, baik dalam target maupun dalam pembiayaan. Rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi yang ada. Inflasi semakin tidak terkendali sebagai akibat defisit APBN yang semakin besar. Pendapatan pemerintah dari ekspor sangat menurun sebagai akibat dari resesi ekonomi yang dialami AS dan Eropa Barat selama akhir 1957 dan permulaan 1958. Terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai manifestasi ketegangan antara pusat dan daerah mengakibatkan stabilitas politik tidak ada. Kemampuan administratif untuk menjamin pelaksanaan rencana masih sangat rendah.

Periode 1961-1965 di Indonesia ditandai dengan Perencanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Periode ini dipenuhi dengan perkembangan politik yang semakin panas, termasuk pembebasan Irian Barat, anti-Malaysia, dan konflik antar partai politik. Sayangnya, rencana ini terpaksa dihentikan di tengah jalan karena pemberontakan PKI pada tahun 1965. Meski ada niat baik untuk membangun dengan rencana yang jelas dan didukung oleh kebijakan tertentu, ada beberapa hambatan

yang dihadapi. Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim, termasuk tidak mempertimbangkan dana untuk membiayainya. Defisit anggaran yang semakin meningkat mengakibatkan inflasi hyper pada tahun 1965, merusak sendi-sendi perekonomian secara menyeluruh. Peraturan yang ada tidak dilaksanakan secara konsisten, dan stabilitas politik tidak ada. Tenaga pendukung (administrasi) yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana masih sangat lemah dan semakin diperlemah karena inflasi yang tidak terkendali.

2. Periode Orde Baru

Setelah periode Orde Baru, perencanaan pembangunan ekonomi dibagi lagi. Periode 1966-1969 adalah periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Dengan pemberontakan PKI tahun 1965, Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana praktis tidak berlaku lagi. Setelah pemberontakan PKI ditumpas, lahirlah masa Orde Baru. Pada periode ini, UU Perbankan tahun 1968 diberlakukan dan Kebijakan 3 Oktober 1966 diambil, yang mengambil langkah-langkah di bidang keuangan negara, moneter dan perdagangan. Strategi utama pada periode ini adalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan memperbaharui kebijakan dalam bidang ekonomi keuangan dan pembangunan. Ini mencakup penilaian kembali semua landasan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan, melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, stabilisasi dan rehabilitasi, pengendalian inflasi, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor, dan pencukupan kebutuhan sandang. Pembangunan yang terencana dan konsisten menjadi fokus utama, dengan prioritas pada bidang pertanian, prasarana, dan industri.

Periode 1961-1965 di Indonesia ditandai dengan implementasi Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Periode ini dipenuhi dengan tantangan politik, termasuk sengketa Irian Barat dan pergantian kabinet yang sering. Meski demikian, ada beberapa aspek positif, seperti penegasan skala prioritas nasional dalam bidang ekonomi dan pembangunan, serta penertiban keuangan pemerintah melalui kebijaksanaan APBN yang seimbang. Namun, ada juga hambatan, seperti penurunan harga barang-barang ekspor Indonesia di pasar internasional dan aspek administrasi yang belum menunjang (Arham, 2013).

a. Periode Repelita I (1969/70 – 1973/74)

Sasaran utama pada periode ini adalah meningkatkan produksi nasional sambil mempertahankan stabilisasi. Untuk mengatasi kekurangan dana, pemerintah memberlakukan kebijaksanaan pinjaman luar negeri dan mengundang modal asing. Selama periode ini, tingkat inflasi dapat dikendalikan dan disiplin penggunaan keuangan pemerintah semakin mantap. Namun, ada juga tantangan, seperti fluktuasi perekonomian Indonesia yang semakin terbuka dan perbedaan pendapatan antar golongan dan antar daerah. Meski demikian, periode ini menandai kemajuan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

b. Periode Repelita II (1974/75 – 1978/79)

Pada periode ini, harga minyak bumi meningkat pesat, yang berdampak pada peningkatan dana pembangunan. Pada tanggal 15 November 1978, terjadi devaluasi Rupiah, dari Rp 415,-/US 1,- menjadi Rp 625,-/US 1,-. Target pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai adalah 7,5%. Selama periode ini, mulai dikembangkan pembangunan yang berwawasan ruang dengan membentuk wilayah-wilayah pembangunan. Namun, periode ini juga ditandai dengan beberapa krisis, seperti krisis Pertamina yang tidak mampu melunasi utang jangka pendeknya dan krisis beras akibat kemarau panjang.

Strategi utama pada periode ini adalah meningkatkan Produk Nasional Bruto (GNP) dengan sasaran: tersedianya pangan dan sandang yang serba cukup dengan mutu yang bertambah baik dan terbeli oleh masyarakat, tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas lain yang diperlukan, terutama untuk rakyat banyak, keadaan prasarana yang semakin meluas dan sempurna, kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata, dan memperluas kesempatan kerja. Beberapa faktor yang mendukung strategi ini antara lain stabilitas ekonomi yang tetap dipertahankan yaitu dengan tetap mempertahankan APBN yang

seimbang, harga minyak bumi yang meningkat pesat, dan situasi politik yang relatif stabil. Namun, ada juga beberapa hambatan, seperti peranan pemerintah yang semakin dominan yang menghambat partisipasi rakyat/masyarakat, dan perekonomian internasional yang mulai dihindangi krisis yang mengakibatkan menurunnya penerimaan ekspor di luar minyak dan meningkatnya kebutuhan devisa untuk impor.

c. Periode Repelita III (1979/80 hingga 1983/84)

Menekankan pada peningkatan kesejahteraan dan peluang kerja, percepatan pembangunan di daerah tertentu, peningkatan kapabilitas golongan ekonomi lemah, pengembangan koperasi, peningkatan produksi pangan dan kebutuhan pokok lainnya, transmigrasi, perumahan, ekspansi fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan, dan penyelesaian masalah sosial lainnya. Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan adalah 6,5%. Deregulasi perbankan mulai diberlakukan pada 1 Juni 1983, dan masalah deregulasi dan debirokratisasi menjadi sangat menonjol. Mulai 1 Januari 1984, UU Pajak baru diberlakukan. Indonesia mulai mencapai swasembada beras. Devaluasi Rupiah terjadi pada tanggal 31 Maret 1983, dari Rp 625 menjadi Rp 970 per US \$ 1. Keputusan Presiden No. 10/1980 tentang sentralisasi pengadaan keperluan pemerintah diberlakukan, begitu juga dengan Inpres No. 51/1984.

Landasan hukum untuk semua ini adalah Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, TAP MPR No. IV/MPR/1978 (GBHN), TAP MPR No. VII/MPR/78, dan Keputusan Presiden T.I. No. 59/M tahun 1978. Strategi yang diadopsi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% dengan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan, yang meliputi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Faktor-faktor yang mendukung termasuk konsistensi kebijakan dengan sasaran yang ingin dicapai, pengendalian inflasi, dan peningkatan situasi ekonomi umum yang memungkinkan pertumbuhan, khususnya di sektor informal. Namun, ada juga hambatan, seperti gejala ekonomi dunia yang belum mereda dan penurunan harga minyak bumi yang mengurangi penerimaan pemerintah.

d. Periode Repelita IV (1984/85 hingga 1988/89)

Tujuan utama dari periode ini adalah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Dalam bidang politik, Pancasila diterima sebagai dasar tunggal untuk organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selama periode ini, deregulasi dan debirokratisasi menjadi kebijakan yang menonjol. Pada tanggal 12 September 1986, diumumkan devaluasi yang diikuti dengan kebijakan lain yang mendukung devaluasi. Inpres No. 4/1985 diberlakukan pada tanggal 4 April 1985 tentang penggunaan SGS untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi.

Instrumen moneter diaktifkan kembali dalam bentuk fasilitas diskonto ulang, sertifikat BI, dan surat berharga pasar uang. Volume APBN 1986/1987 menurun secara absolut dibandingkan dengan APBN tahun sebelumnya. Investasi besar-besaran juga dilakukan rephasing. Paket 6 Mei 1986 diberlakukan untuk meningkatkan daya saing ekspor non-migas dan menarik investasi. Keputusan 25 Oktober 1986 dan 15 Januari 1987 pada dasarnya untuk sebagian menghilangkan adanya importir tertunjuk. Pembayaran utang luar negeri melampaui DSR.

Terjadi 'mini krisis' pada September 1984 dan pembelian cadangan devisa Desember 1986, yang terakhir ini diatasi dengan 'gebrakan Sumarlin'. Landasan hukum untuk semua ini adalah Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, TAP MPR No. II/1983 tentang GBHN, TAP MPR No. /1983 tentang pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional, Keputusan Presiden No. 7/1979 tentang Repelita III, dan Keputusan Presiden No. 45/M tahun 1983 tentang pembentukan kabinet pembangunan IV.

Strategi yang diadopsi selama periode ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada pembangunan di bidang ekonomi, terutama sektor pertanian untuk melanjutkan upaya mencapai swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Pembangunan di bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain juga ditingkatkan sejalan dengan kemajuan di bidang ekonomi.

Beberapa faktor yang mendukung pembangunan ini adalah peningkatan ekspor barang non-migas, peningkatan penerimaan dalam negeri setelah diberlakukannya UU Perpajakan 1 Januari 1984, dan pemberian kredit investasi kecil (KIK), kredit modal kerja permanen (KMKP), dan kredit candak kulak (KCK). Namun, ada juga beberapa hambatan, seperti penurunan tajam penerimaan dari minyak bumi, proteksi yang diberlakukan oleh negara-negara maju, terutama Amerika Serikat yang merupakan pasar barang ekspor Indonesia terbesar, ketidakpastian ekonomi internasional, dan penurunan nilai dolar terhadap mata uang asing lainnya yang melipatgandakan utang Indonesia.

e. Periode Repelita V

Rencana Pembangunan Lima Tahun kelima, atau Repelita V, berlangsung dari tahun 1989/90 hingga 1993/94. Repelita V ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1989 dan SK Menteri Perindustrian Nomor 2/M/SK/1/1990 pada akhir Repelita IV. Fokus utama Repelita V adalah sektor industri.

Repelita V merupakan implementasi praktis dari Garis Besar Haluan Negara (GBHN), khususnya dalam konteks pembangunan industri, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR nomor 11/MPR/1988. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang Repelita V, dibuatlah dua buku. Buku I berisi pokok-pokok Kebijaksanaan Umum pengembangan sektor industri, sementara Buku II, sebagai penjabaran dari Buku I, menyajikan program-program pengembangan utama yang akan dijalankan selama Repelita V.

Tujuan utama dari Repelita V adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional melalui peningkatan di berbagai bidang. Selain itu, Repelita V juga bertujuan untuk menciptakan iklim investasi asing yang lebih baik untuk meningkatkan ekonomi dan industri nasional. Oleh karena itu, program ini mencakup berbagai kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mendorong investasi asing dan pertumbuhan industri di Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana Repelita V berusaha untuk mengintegrasikan ekonomi Indonesia ke dalam ekonomi global sambil memastikan pertumbuhan dan pembangunan nasional.

5.3 Penutup

5.3.1 Rangkuman

Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen fiskal untuk mempengaruhi fungsi sistem ekonomi agar dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dituangkan dalam APBN sebagai rencana operasional keuangan pemerintah. Fungsi kebijakan fiskal menjadi lebih jelas ketika meminimalisir volatilitas atau fluktuasi siklus bisnis, dan fungsi "stabilisasi" sangat dibutuhkan oleh perekonomian. Kebijakan fiskal ditujukan untuk menciptakan lingkungan makroekonomi yang mendukung dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta menjaga stabilitas harga secara umum. Di Indonesia, kebijakan fiskal yang diterapkan cenderung ekspansif dengan membukakan anggaran defisit. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat utama dalam kebijakan fiskal, yang membantu merumuskan strategi pembiayaan anggaran yang tepat dan terkendali.

5.3.2 Evaluasi

1. Deskripsikan pendapat Anda, mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut sebagai alat utama dalam kebijakan fiskal?
2. Menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan *trickle down effect*? Apakah konsep ini masih relevan digunakan di Indonesia?
3. Terdapat dua istilah yang dipakai dalam teori strategi berwawasan ruang, yaitu "*back-wash effects*" dan "*spread effects*". Deskripsikan pendapat Anda, istilah mana yang menggambarkan kondisi strategi pembangunan ekonomi di Indonesia?
4. Kemukakan pendapat Anda, mengapa kebijakan ekonomi di Indonesia pada Era Orde Lama banyak mengalami hambatan?
5. Jelaskan strategi apa sajakah yang dilakukan pemerintah Era Orde Baru untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5% periode Repelita IV?

5.3.3 Daftar Pustaka

- Arham, M. A. (2013). *Regulasi Kebijakan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia : Dampak Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Perekonomian* (p. 164).
- Basri, F. (2022). *Perekonomian Indonesia-Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*.
- Easterly, W., & Rebelo, S. (1993). Fiscal policy and economic growth. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 417–458. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90025-B](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90025-B)
- Fahrika, A. I., & Zulkifli. (2020). Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya. In Dahlia & Juhasdi (Eds.), *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 3449230(021), 20–21. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1684478331_kem_ppkf_2023.pdf%0Ahttp://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/KP_KEMPPKF_280515.pdf
- Mankiw, N. G. (2009). Macroeconomist as a scientist and engineer. *Voprosy Ekonomiki*, 2009(5), 86–103. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-5-86-103>
- Musgrave, R., & Musgrave, P. (1989). Fiscal policy for economic growth. In *Economists' Voice* (Vol. 9, Issue 2). <https://doi.org/10.1515/1553-3832.1898>

BAB 6

KRISIS EKONOMI

6.1 Pendahuluan

6.1.1 Deskripsi Singkat

Krisis ekonomi terjadi ketika ada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam aspek keuangan. Fenomena ini dapat berdampak global, di mana semua sektor pasar ekonomi dunia mengalami penurunan yang berdampak pada sektor-sektor lain secara global (Radelet & Sachs, 1998). Negara-negara berkembang di Asia, seperti Indonesia, merasakan dampak yang signifikan dari krisis ekonomi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Sebagai contoh, Indonesia, sebagai negara yang memiliki hutang, menghadapi tantangan karena tingkat bunga hutangnya meningkat setiap tahun, sementara pendapatan negara tidak meningkat akibat krisis ekonomi global. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya. Istilah krisis finansial atau keuangan digunakan untuk menggambarkan berbagai situasi di mana berbagai institusi atau aset keuangan kehilangan sebagian besar nilai mereka. Beberapa situasi yang sering disebut sebagai krisis finansial atau keuangan termasuk runtuhnya bursa efek dan krisis mata uang. Krisis Keuangan global dapat dibagi menjadi dua jenis krisis, yaitu krisis di pasar modal (capital market) dan krisis di pasar uang (money market). Kedua bentuk pasar keuangan ini memberikan peluang untuk transaksi dengan tingkat spekulasi yang tinggi. Keduanya menggunakan bunga sebagai instrumen. Keduanya juga memisahkan sektor moneter dan sektor riil seperti yang diajarkan dalam sistem ekonomi kapitalisme (Arafat, 2009).

Siklus bisnis atau ekonomi dapat berlangsung dalam jangka pendek, menengah, atau panjang, tergantung pada sistem ekonomi yang dianut dan faktor-faktor yang menjadi penyebab siklus di suatu negara. Kaum kapitalis memperkirakan bahwa penurunan ekonomi akan terjadi dalam siklus bisnis setiap 25 tahun sekali. Sementara itu, kaum sosialis memperkirakan krisis akan terjadi setiap 45 tahun sekali. Jangka waktu ini lebih panjang karena peran besar pemerintah dalam perekonomian, terutama dalam pengaturan harga. Inflasi adalah fenomena dimana harga secara umum dan berkelanjutan meningkat. Kenaikan harga hanya satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut meluas dan menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat lebih memahami bagaimana krisis ekonomi dapat mempengaruhi suatu negara dan bagaimana teori-teori ekonomi dapat digunakan untuk memahami dan merespons krisis tersebut. Bab ini akan membahas lebih lanjut tentang topik-topik ini.

Pada Bab 6 ini mempelajari Krisis Ekonomi yang meliputi Pengertian Krisis dan Resesi, Krisis Ekonomi Asia 1997, Dampak Krisis Ekonomi Asia Terhadap Perekonomian Indonesia, Kondisi Sosial Politik Indonesia Saat Krisis 1998, Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis Moneter 1998, Pemulihan Pasca Krisis Ekonomi, dan Periode Kepemimpinan Presiden Megawati – Joko Widodo.

6.1.2 Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan Krisis Ekonomi

6.1.3 Indikator

1. Mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan Pengertian Krisis dan Resesi
2. Mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan Krisis Ekonomi Asia 1997

3. Mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan Dampak Krisis Ekonomi Asia Terhadap Perekonomian Indonesia
4. Mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan Kondisi Sosial Politik Indonesia Saat Krisis 1998
5. Mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis Moneter 1998
6. Mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan Pemulihan Pasca Krisis Ekonomi
7. Mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan Periode Kepemimpinan Presiden Megawati – Joko Widodo

6.2 Pembahasan

6.2.1 Pengertian Krisis dan Resesi

Krisis ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jenis krisis ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti inflasi, deflasi, dan krisis finansial. Tanda lainnya juga ditunjukkan oleh belanja negara yang semakin ditekan dan tingginya persentase pengangguran. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan masyarakat secara sekaligus. Resesi, menurut *National Bureau of Economic Research (NBER) AS*, didefinisikan sebagai penurunan yang signifikan dalam aktivitas ekonomi yang meluas di seluruh ekonomi, berlangsung lebih dari beberapa bulan. Biasanya, resesi dapat dilihat dalam penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, pendapatan riil, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir-eceran.

Julius Shiskin pada tahun 1974 memberikan definisi yang lebih sederhana dan umum digunakan, yaitu resesi adalah penurunan PDB yang terjadi selama dua kuartal berturut-turut. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya resesi ekonomi. *Business Insider* mencatat lima penyebab utama resesi, yaitu: guncangan ekonomi, kehilangan kepercayaan konsumen, suku bunga tinggi, deflasi, dan gelembung aset. Guncangan ekonomi adalah peristiwa tak terduga yang menyebabkan gangguan ekonomi yang meluas, seperti bencana alam atau serangan teroris. Contoh terbaru adalah Pandemi Covid-19 yang melanda semua negara.

Kehilangan kepercayaan konsumen juga dapat memicu resesi. Ketika konsumen merasa tidak yakin tentang kondisi ekonomi, mereka cenderung mengurangi belanja, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan dalam produksi dan lapangan kerja. Suku bunga tinggi juga dapat memicu resesi karena dapat mencegah investasi dan mempengaruhi konsumen dan bisnis untuk mengambil pinjaman. Deflasi, atau penurunan harga secara umum dan berkelanjutan, dapat memperburuk resesi karena dapat mendorong konsumen dan bisnis untuk menunda pembelian dengan harapan harga akan turun lebih jauh. Gelembung aset, di mana harga aset naik secara signifikan dan tidak berkelanjutan, juga dapat memicu resesi ketika gelembung tersebut pecah. Dengan memahami penyebab-penyebab ini, kita dapat lebih memahami bagaimana resesi dapat mempengaruhi suatu negara dan bagaimana teori-teori ekonomi dapat digunakan untuk memahami dan merespons resesi tersebut.

Krisis ekonomi dan resesi adalah dua konsep yang saling terkait dalam ekonomi, tetapi mereka memiliki perbedaan yang signifikan. Krisis ekonomi adalah fenomena yang lebih luas dan dapat mencakup berbagai jenis gangguan ekonomi, termasuk resesi, depresi, dan inflasi. Krisis ekonomi biasanya ditandai dengan penurunan tajam dalam kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem keuangan, dan dapat mempengaruhi semua sektor pasar ekonomi. Krisis ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan politik, bencana alam, atau kejadian tak terduga lainnya yang mengganggu stabilitas ekonomi (Todaro & Smith, 2003).

Di sisi lain, resesi adalah jenis krisis ekonomi yang spesifik. Resesi didefinisikan oleh *National Bureaus of Economic Research* (NBER) AS sebagai penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh ekonomi, berlangsung lebih dari beberapa bulan. Biasanya, resesi dapat dilihat dalam penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, pendapatan riil, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir-eceran. Resesi biasanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti guncangan ekonomi, kehilangan kepercayaan konsumen, suku bunga tinggi, deflasi, dan gelembung aset. Jadi, meskipun krisis ekonomi dan resesi keduanya melibatkan penurunan dalam aktivitas ekonomi, krisis ekonomi adalah konsep yang lebih luas yang dapat mencakup resesi serta berbagai jenis gangguan ekonomi lainnya. Resesi, di sisi lain, adalah jenis krisis ekonomi yang lebih spesifik yang ditandai oleh penurunan signifikan dan berkelanjutan dalam aktivitas ekonomi.

6.2.2 Krisis Ekonomi Asia 1997

Krisis Keuangan Asia bermula dari penurunan nilai mata uang Baht Thailand pada Juni 1997, yang disebabkan oleh tindakan spekulasi. Spekulasi menjual Baht dengan tujuan menurunkan nilai tukar Baht yang saat itu berada di 26 Baht per 1 Dolar Amerika. Akhirnya, upaya spekulasi berhasil dan pemerintah Thailand terpaksa membeli Baht dan menghabiskan cadangan devisa sebesar USD 6,8 juta. Pada Januari 1998, nilai Baht merosot menjadi 54 Baht per Dolar Amerika. Pada dekade 1980-an, ekonomi Thailand stabil dengan pertumbuhan rata-rata 9% per tahun. Stabilitas ini mendorong banyak perusahaan swasta di Thailand untuk mencari keuntungan lebih. Melihat stabilitas makroekonomi Thailand, bank-bank Jepang dengan mudah memberikan kredit kepada berbagai perusahaan di Thailand. Namun, pada akhir tahun 1996, banyak perusahaan swasta di Thailand yang tidak mampu membayar utang mereka, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan perbankan Jepang. Beberapa bank Jepang bahkan mempercepat jatuh tempo pembayaran utang.

Akibatnya, banyak perusahaan yang gagal membayar utang mereka dalam periode yang sama. Hal ini menyebabkan nilai saham perusahaan-perusahaan tersebut jatuh, dan pasar modal Thailand pun ikut anjlok sebesar 75%. Krisis finansial di Thailand dimulai pada 2 Juli 1997. Finance One, perusahaan keuangan terbesar di Thailand, juga bangkrut. Pada 11 Agustus 1997, IMF menawarkan bantuan untuk Thailand dengan menyediakan dana lebih dari US\$ 16 miliar. Namun, pada 20 Agustus, IMF hanya menyetujui pencairan dana bantuan sebesar US\$ 3,9 miliar. Pada Januari 1998, Baht jatuh ke titik terendahnya: 56 Baht per US\$, padahal sejak 1985 hingga 2 Juli 1997 Baht dipatok pada harga 25 Baht per US\$. Menambahkan detail tentang Krisis Keuangan Asia 1997, krisis ini merupakan periode krisis keuangan yang melanda sebagian besar Asia Timur dan Tenggara pada akhir 1990-an (Ba, 2023).

Krisis ini dimulai di Thailand pada Juli 1997 sebelum menyebar ke beberapa negara lain dengan efek domino, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya krisis ekonomi global akibat kontagion finansial. Meski umumnya digambarkan sebagai krisis keuangan atau ekonomi, krisis ini juga dapat dilihat sebagai krisis tata kelola di semua tingkat politik utama. Meski sebagian besar pemerintah Asia memiliki kebijakan fiskal yang tampaknya sehat, Dana Moneter Internasional (IMF) turun tangan untuk memulai program \$40 miliar untuk menstabilkan mata uang Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia, ekonomi yang paling parah terkena dampak krisis. Upaya untuk menghentikan krisis ekonomi global sedikit banyak membantu menstabilkan situasi domestik di Indonesia.

6.2.3 Dampak Krisis Ekonomi Asia Terhadap Perekonomian Indonesia

Sebelum terkena dampak krisis di Thailand, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan rata-rata 7% per tahun. Menurut data Bank Dunia, tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun, mencapai 11% dari total populasi, yaitu sekitar 11 juta jiwa. Selain itu, program Keluarga Berencana berhasil mengurangi angka kematian bayi dari 118 kematian per 1000 kelahiran menjadi hanya 52 kasus kematian. Keberhasilan pembangunan juga ditunjukkan dengan peningkatan usia harapan hidup dari sekitar 48 tahun menjadi sekitar 64 tahun. Namun, pada Juni 1997, Indonesia mulai merasakan dampak dari krisis di Thailand. Pada awal 1997, nilai rupiah stabil di kisaran

Rp 2000-2300/US\$, namun dalam waktu satu tahun, nilai tersebut turun drastis hingga lebih dari Rp 10000/US\$. Dari situ, diketahui bahwa utang korporasi swasta di Indonesia mencapai US\$75 miliar. Selain itu, sistem perbankan di Indonesia dinyatakan gagal karena banyak diintervensi oleh kepentingan politik.

Berbeda dengan Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, surplus perdagangan lebih dari US\$900 juta, dan cadangan devisa lebih dari US\$20 miliar. Meskipun Indonesia telah menerima bantuan dari IMF, nilai Rupiah tetap terus menurun karena pembayaran utang swasta luar negeri yang jatuh tempo, permintaan dolar AS yang sangat tinggi di pasar, dan penjualan rupiah dalam jumlah besar. Pasar uang dan bursa efek Jakarta mencapai titik terendah pada bulan September 1997. Krisis moneter yang mengguncang Indonesia sejak awal Juli 1997 telah berlangsung selama hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, ditandai dengan stagnasi aktivitas ekonomi karena penutupan perusahaan yang semakin banyak dan peningkatan pengangguran. Krisis ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh krisis moneter, tetapi juga diperparah oleh serangkaian bencana nasional yang terjadi di tengah kesulitan ekonomi, seperti gagal panen padi di banyak tempat karena musim kemarau yang panjang dan terburuk dalam 50 tahun terakhir, serangan hama, kebakaran hutan besar-besaran di Kalimantan, dan kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 dan seterusnya.

Meski fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dianggap cukup kuat dan dipuji oleh Bank Dunia, krisis moneter ini tetap terjadi. Fundamental ekonomi yang kuat mencakup pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran yang relatif rendah, surplus neraca pembayaran secara keseluruhan meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun masih terkendali, cadangan devisa yang cukup besar, dan surplus anggaran pemerintah yang masih sedikit. Namun, di balik ini terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif.

Pada saat yang sama, kurangnya transparansi dan data menimbulkan ketidakpastian sehingga dana asing masuk dalam jumlah besar melalui sistem perbankan yang lemah. Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar tidak di-hedge. Dengan terjadinya krisis moneter, terjadi juga krisis kepercayaan. Namun, semua kelemahan ini masih mampu ditampung oleh ekonomi nasional. Yang terjadi adalah, tiba-tiba datang badai yang sangat besar, yang tidak mampu ditahan oleh tembok penahan yang ada, yang selama bertahun-tahun telah mampu menahan berbagai gelombang yang datang mengancam.

Kondisi sosial dan politik Indonesia saat krisis ekonomi 1998, krisis ini memicu transisi spektakuler ke sistem politik demokratis. Meskipun Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat pada 1980-an dan awal 1990-an, krisis keuangan 1997 merusak banyak peningkatan ini karena PDB turun, pengangguran naik, upah erosi, dan harga meningkat secara dramatis. Dalam hal nilai dolar, Indonesia mengalami penurunan GNP yang sangat besar sebesar 84% antara Juni 1997 dan Juli 1998. Pada tahun 1996 hingga 1997, PDB nominal per kapita turun sebesar 43,2% di Indonesia (Hays, 2015). Meskipun Indonesia telah menerima paket bantuan dari IMF sebesar USD \$43 miliar untuk mengembalikan kepercayaan pasar pada rupiah Indonesia, reformasi yang diminta oleh IMF ternyata gagal.

Selain itu, krisis ini juga memicu peningkatan kriminalitas dan ketegangan sosial yang sudah ada, yang berkontribusi pada kerusuhan sosial yang meluas dan akhirnya mengakibatkan Presiden Soeharto mengundurkan diri. Meskipun krisis keuangan adalah katalis yang memicu jatuhnya pemerintahan Soeharto, itu bukanlah penyebab utamanya. Konflik sosial, perpecahan sepanjang garis regional, kelas, dan budaya, korupsi, dan geng kriminal sudah sangat akar dalam masyarakat Indonesia (Dori, 1998).

6.2.4 Kondisi Sosial Politik Indonesia Saat Krisis 1998

Saat ini, semua masalah dalam krisis ekonomi berpusat pada kurs nilai tukar mata uang asing, terutama dolar AS, yang melonjak tinggi dibandingkan dengan pendapatan masyarakat dalam rupiah yang tetap atau bahkan menurun di beberapa kasus, ditambah dengan PHK. Sementara itu, harga banyak barang meningkat cukup tinggi, kecuali di sebagian sektor pertanian dan ekspor. Dampak dari penurunan nilai tukar rupiah yang signifikan secara umum sudah kita ketahui: kesulitan dalam menyeimbangkan APBN, harga telur/ayam naik, utang luar negeri dalam rupiah melonjak, harga BBM/tarif listrik naik, tarif angkutan naik, perusahaan tutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban utang yang tinggi, toko sepi, PHK di mana-mana, investasi menurun karena impor barang modal menjadi mahal, biaya sekolah di luar negeri melonjak.(Fahriska & Zulkifli, 2020).

Dampak lain adalah tingginya laju inflasi selama beberapa bulan terakhir ini, yang bukan disebabkan oleh imported inflation, tetapi lebih tepat jika dikatakan foreign exchange induced inflation. Masalah ini hanya bisa diselesaikan secara mendasar jika nilai tukar mata uang asing bisa diturunkan hingga tingkat yang wajar atau nyata (riil). Dengan demikian, roda perekonomian bisa berputar kembali dan harga-harga bisa turun dari tingkat yang tinggi dan terjangkau oleh masyarakat, meskipun tidak kembali pada tingkat sebelum terjadinya krisis moneter (Levinsohn et al., 2003).

Di sisi lain, penurunan nilai tukar rupiah secara tajam juga membawa hikmah. Secara umum, impor barang menurun tajam termasuk impor buah, perjalanan ke luar negeri dan pengiriman anak sekolah ke luar negeri, sebaliknya arus masuk turis asing akan lebih besar, daya saing produk dalam negeri dengan tingkat kandungan impor rendah meningkat sehingga bisa menahan impor dan merangsang ekspor khususnya yang berbasis pertanian, proteksi industri dalam negeri meningkat sejalan dengan merosotnya nilai tukar rupiah, pengusaha domestik kapok meminjam dana dari luar negeri. Hasilnya adalah perbaikan dalam neraca berjalan. Petani yang berbasis ekspor penghasilannya dalam rupiah mendadak melonjak drastis, sementara bagi konsumen dalam negeri harga beras, gula, kopi dan sebagainya ikut naik. Sayangnya ekspor yang secara teoritis seharusnya naik, tidak terjadi, bahkan cenderung sedikit menurun pada sektor barang hasil industri.

Meskipun penerimaan rupiah petani komoditi ekspor meningkat tajam, tetapi penerimaan ekspor dalam valas umumnya tidak berubah, karena pembeli di luar negeri juga menekan harganya karena tahu petani dapat untung besar, dan negara-negara produsen lain juga mengalami depresiasi dalam nilai tukar mata uangnya dan bisa menurunkan harga jual dalam nominasi valas. Hal yang serupa juga terjadi untuk ekspor barang manufaktur, hanya di sini ada kesulitan lain untuk meningkatkan ekspor, karena ada masalah dengan pembukaan L/C dan keadaan sosial-politik yang belum menentu sehingga pembeli di luar negeri mengalihkan pesanan barangnya ke negara lain.

Menambahkan detail tentang kondisi sosial dan politik Indonesia saat krisis ekonomi 1998, krisis ini memicu transisi spektakuler ke sistem politik demokratis. Meskipun Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat pada 1980-an dan awal 1990-an, krisis keuangan 1997 merusak banyak peningkatan ini karena PDB turun, pengangguran naik, upah erosi, dan harga meningkat secara dramatis. Dalam hal nilai dolar, Indonesia mengalami penurunan GNP yang sangat besar sebesar 84% antara Juni 1997 dan Juli 1998. Pada tahun 1996 hingga 1997, PDB nominal per kapita turun sebesar 43,2% di Indonesia. Meskipun Indonesia telah menerima paket bantuan dari IMF sebesar USD \$43 miliar untuk mengembalikan kepercayaan pasar pada rupiah Indonesia, reformasi yang diminta oleh IMF ternyata gagal. Selain itu, krisis ini juga memicu peningkatan kriminalitas dan ketegangan sosial yang sudah ada, yang berkontribusi pada kerusuhan sosial yang meluas dan akhirnya mengakibatkan Presiden Soeharto mengundurkan diri. Meskipun krisis keuangan adalah katalis yang memicu jatuhnya pemerintahan Soeharto, itu bukanlah penyebab utamanya. Konflik sosial, perpecahan sepanjang garis regional, kelas, dan budaya, korupsi, dan geng kriminal sudah sangat akar dalam masyarakat Indonesia (Hays, 2015).

6.2.5 Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis Moneter 1998

Krisis finansial Asia pada tahun 1997 mengakibatkan penurunan signifikan dalam perekonomian Indonesia, dengan kontraksi sebesar 13% dan depresiasi besar-besaran pada nilai tukar rupiah. Sebagai respons terhadap krisis ini, Indonesia memutuskan untuk mendapatkan pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF). Program IMF dimulai dengan penandatanganan Surat Niat (LOI) pertama pada akhir Oktober 1997 dan berlanjut hingga Desember 2003. Selama periode ini, empat presiden yang berbeda menerapkan sejumlah program reformasi ekonomi dengan hasil yang bervariasi. Reformasi ekonomi pasca-krisis ini sebagian besar didorong oleh program reformasi yang ditetapkan oleh IMF sebagai syarat untuk menerima bantuan (Investment, 2020). IMF mensyaratkan agenda reformasi struktural, serta beberapa langkah menuju stabilisasi makroekonomi dan perbaikan kesehatan sistem finansial.

Persyaratan IMF juga mencakup penghapusan monopoli cengkeh, serta penghapusan semua bentuk subsidi pemerintah untuk industri yang dianggap tidak layak secara ekonomi, seperti proyek mobil nasional Timor dan industri pesawat terbang. Beberapa langkah reformasi ini sempat menghadapi tantangan besar, karena melibatkan individu-individu yang dekat dengan Presiden Soeharto. Namun, langkah-langkah tersebut diperlukan sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan publik dan pasar terhadap pemerintahan. Pada Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden dan digantikan oleh Habibie. Pada bulan Juli 1998, persetujuan untuk program bantuan IMF yang baru disetujui, dan kali ini melibatkan strategi restrukturisasi korporasi serta program restrukturisasi perbankan yang lebih luas. Inisiatif lainnya adalah penerbitan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (hukum persaingan) pada Maret 1999, serta pemberian status independen Bank Indonesia yang diamanatkan melalui UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia.

Selanjutnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Presiden pada Oktober 1999. Persetujuan ketiga dengan IMF pun ditandatangani pada Januari 2000 dan berlanjut hingga Desember 2002. Program baru ini melibatkan agenda jangka menengah yang terdiri dari empat aspek: kerangka makro ekonomi jangka menengah, kebijakan restrukturisasi, menata ulang institusi perekonomian, serta memperbaiki manajemen sumber daya alam. Kerangka makro ekonomi menjelaskan program pemulihan sembari mempertahankan stabilitas tingkat harga. Namun demikian, implementasi program ini cukup lambat, meskipun setelah melakukan beberapa kali *reshuffle* kabinet.

Selanjutnya, Presiden Gus Dur terjerat oleh beberapa permasalahan governance, termasuk skandal Bulog yang menyebabkan turunnya beliau dari jabatannya. Akibatnya, pencairan pinjaman IMF menjadi tertunda. Penyebab lainnya adalah implementasi yang kurang baik dari langkah-langkah reformasi oleh tim ekonomi pemerintah pada saat itu, yang sebenarnya menentang keterlibatan IMF dalam pemulihan krisis. Pemerintahan Gus Dur menghadapi dua permasalahan utama dalam implementasi program reformasi. Pertama, program tersebut mencakup sejumlah isu yang timbul dari persyaratan reformasi struktural. Dengan demikian, pemulihan ekonomi Indonesia pasca-krisis 1998 melibatkan serangkaian reformasi ekonomi dan struktural yang ditentukan oleh IMF, serta perubahan signifikan dalam struktur politik dan ekonomi negara. Meskipun ada tantangan dan hambatan, reformasi ini membantu Indonesia pulih dari krisis dan membangun kembali kepercayaan pasar dan publik terhadap pemerintah dan ekonominya.

6.2.6 Pemulihan Pasca Krisis Ekonomi

Krisis finansial yang terjadi di Asia pada tahun 1997 berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Pada periode tersebut, terjadi kontraksi ekonomi sebesar 13%, disertai dengan depresiasi nilai tukar rupiah yang signifikan. Untuk mengatasi krisis ini, Indonesia memutuskan untuk mengajukan pinjaman ke International Monetary Fund (IMF). Program IMF dimulai dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI) pada akhir Oktober 1997 dan berlangsung hingga Desember 2003. Dalam menjalankan program IMF, empat presiden yang berbeda mengimplementasikan sejumlah program reformasi

ekonomi. Reformasi ini lebih banyak dipacu oleh persyaratan IMF, yang mencakup agenda reformasi struktural, stabilitas makro ekonomi, dan perbaikan sistem finansial. Beberapa langkah reformasi termasuk penghapusan monopoli cengkeh, subsidi pemerintah untuk industri yang dianggap tidak ekonomis, serta reformasi dalam sistem perbankan.

Meskipun langkah-langkah ini dihadapi dengan tantangan, termasuk resistensi dari pihak terkait dengan pemerintahan sebelumnya, langkah-langkah ini dianggap perlu untuk memulihkan kepercayaan publik dan pasar terhadap pemerintahan. Pada Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Habibie. Pada Juli 1998, program bantuan IMF yang baru disetujui, melibatkan restrukturisasi korporasi dan program restrukturisasi perbankan yang lebih luas. Namun, pada pemerintahan Habibie, muncul skandal Bank Bali yang menyebabkan penghentian sementara program IMF pada September 1999. Program IMF dianggap penting untuk mendukung agenda ekonomi terstruktur di tengah gejolak pemerintahan yang sering berganti-ganti. Program ini juga mensyaratkan reformasi-institusi, transparansi, persaingan sehat, serta kerangka hukum yang kuat. Presiden selanjutnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terpilih pada Oktober 1999. Pada Januari 2000, ditandatangani persetujuan ketiga dengan IMF yang berlanjut hingga Desember 2002. Program baru ini melibatkan aspek kerangka makro ekonomi jangka menengah, kebijakan restrukturisasi, penataan ulang institusi perekonomian, dan perbaikan manajemen sumber daya alam.

Meskipun demikian, implementasi program ini terhambat oleh sejumlah permasalahan governance, termasuk skandal Bulog yang menyebabkan turunnya Gus Dur dari jabatannya. Pencairan pinjaman IMF tertunda, dan implementasi reformasi ekonomi terkendala oleh isu-isu seperti kurangnya koordinasi antar menteri, konflik dengan Bank Indonesia, desentralisasi, dan hubungan yang memburuk antara pemerintah dengan parlemen. Kendati memiliki peran kunci, Gus Dur kesulitan menunjukkan kepemimpinan efektif di bidang ekonomi. Dalam menangani krisis, dibentuk sejumlah institusi baru, seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Indonesia, dan *Jakarta Initiative Task Force*, yang bertanggung jawab atas restrukturisasi kredit, langkah krusial dalam pemulihan ekonomi.

6.2.7 Periode Kepemimpinan Presiden Megawati – Joko Widodo

1. Era Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri

Tim ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Megawati berhasil memperbaiki hubungan dengan Dana Moneter Internasional (IMF), yang berujung pada sejumlah persetujuan dengan IMF untuk memperbaiki program bantuan IMF yang sempat dihentikan. Tim ekonomi Megawati menunjukkan keterbukaan dan dukungan terhadap program IMF. Stabilitas politik berhasil dipulihkan di bawah pemerintahan Megawati. Namun, implementasi program reformasi berjalan cukup lambat, antara lain karena kurangnya kapasitas implementasi, sebuah masalah yang telah ada sejak pemerintahan Gus Dur. Sejak pertengahan 2002, opini publik mulai terbentuk agar pemerintah tidak melanjutkan program bantuan IMF setelah selesai pada akhir 2003.

Pada saat itu, hanya Indonesia satu-satunya negara yang terkena dampak krisis keuangan 1997-98, yang masih menerima bantuan IMF. Pada Juli 2003, pemerintah mengumumkan bahwa program bantuan IMF tidak akan dilanjutkan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk tim antar-lembaga yang menyusun strategi keluar yang mempertimbangkan hal-hal seperti financing gap, yang terkait dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah, dan credibility gap, yang terkait dengan dampak negatif dari sentimen pasar, ketika program IMF berakhir. Keputusan untuk mengakhiri program bantuan IMF dipengaruhi oleh pemilihan umum yang mendekat, serta oleh sentimen nasionalistik yang tengah berkembang di dunia politik dan publik.

Pada 10 Desember 2003, pemerintah menandatangani LOI terakhir dengan IMF. Sebagai persiapan berakhirnya program bantuan IMF, pada 15 September 2003 pemerintah menerbitkan 'Paket Kebijakan Ekonomi Pra- dan Pasca-IMF, yang juga dikenal sebagai "White Paper". Paket kebijakan ini diterima dengan baik oleh publik dan pasar. Secara umum, peranan penting dari paket kebijakan tersebut adalah untuk memastikan kebijakan reformasi pemerintah, terutama dalam periode pemilu. Cakupan White Paper cukup beragam, dan bahkan menurut beberapa pengamat lebih luas dan ambisius dibandingkan program bantuan IMF. Akan tetapi, paket kebijakan ini dihasilkan oleh pemerintah Indonesia dengan masukan dari sektor swasta, setelah juga berkonsultasi dengan sejumlah ekonom independen.

Program pemerintah ini menimbulkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi (karena bukan didikte oleh IMF atau asing), yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikannya, serta untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Sebagai bagian dari 'Paket Kebijakan Ekonomi Indonesia Pra- dan Pasca-IMF', pada tanggal 15 September 2003, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No 5/2003. Sejumlah elemen utama dalam paket kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Menjaga stabilitas makroekonomi: Fokus dari usaha ini adalah untuk mencapai kondisi fiskal yang sehat, serta mengurangi laju inflasi, dan menjaga persediaan cadangan devisa untuk kebutuhan jangka menengah.
 - 1) Bertahap mengurangi defisit anggaran untuk mencapai keseimbangan pada tahun 2005-2006;
 - 2) Menurunkan rasio utang pemerintah terhadap PDB ke tingkat yang aman;
 - 3) Melakukan reformasi dan modernisasi pada sistem perpajakan nasional untuk menghasilkan sumber pemasukan negara yang dapat diandalkan;
 - 4) Meningkatkan efisiensi belanja pemerintah;
 - 5) Mengembangkan sistem pengelolaan utang yang efektif.

- B. Melakukan restrukturisasi dan reformasi pada sektor keuangan dengan fokus:
 - 1) Membentuk Jaring Pengaman Sistem Keuangan melalui pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), fasilitas pinjaman opsi terakhir di Bank Indonesia, dan penguatan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) Melanjutkan program restrukturisasi sektor perbankan, terutama bank milik negara, dengan dukungan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan lembaga lainnya;
 - 3) Memperketat pengawasan terhadap pencucian uang;
 - 4) Memperbaiki kinerja dan pengawasan pasar modal;
 - 5) Mengonsolidasikan industri asuransi dan dana pensiun;
 - 6) Meningkatkan kinerja dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - 7) Mendukung pengembangan sistem akuntansi publik.

- C. Meningkatkan investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja dengan fokus pada inisiatif kebijakan:
 - 1) Memperbaiki kebijakan investasi dan perdagangan melalui layanan satu atap dan Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI);
 - 2) Meningkatkan kepastian hukum dengan merevisi UU Kepailitan dan mengharmonisasikan regulasi di tingkat regional;
 - 3) Membangun dan memperbaiki infrastruktur di sektor listrik, transportasi, telekomunikasi, dan sumber daya air;
 - 4) Meningkatkan transparansi pelayanan publik;
 - 5) Meningkatkan pemerataan melalui program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Meskipun Pemerintahan Megawati berhasil membangun stabilitas makroekonomi melalui kelembagaan, independensi Bank Indonesia, dan penataan ulang Kementerian Keuangan, kegagalan terlihat pada reformasi mikro, terutama dalam meningkatkan iklim investasi. Dua kebijakan yang memperburuk situasi investasi adalah sikap ambivalen terhadap privatisasi dan pembatalan UU Kelistrikan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003.

2. Era Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden SBY mengakui pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pada Januari 2005, pemerintah mengadakan Infrastructure Summit dengan maksud menarik investasi swasta dalam pengembangan infrastruktur. Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena pemerintah gagal menyelenggarakan reformasi dan menghasilkan regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki iklim investasi infrastruktur (Soesastro & Raymond, 2005). Salah satu setback yang signifikan adalah pembatalan UU Kelistrikan baru oleh Mahkamah Konstitusi pada 6 Desember 2004, yang bertujuan membuka persaingan dengan swasta di sektor tersebut. Dampaknya, Indonesia terus mengalami defisit infrastruktur selama pemerintahan SBY. Meskipun ada upaya reformasi melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), hasilnya mengecewakan dan Indonesia tertinggal dalam kualitas infrastruktur dan logistik dibandingkan negara pesaing.

Investasi infrastruktur yang jauh dari kebutuhan, disertai hambatan regulasi, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi mahal dan tidak efisien. Pemerintah juga gagal mereformasi sektor transportasi, terutama di sektor kelistrikan dan pelabuhan yang tetap dikuasai oleh BUMN. Secara spesifik, UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menerapkan asas cabotage, dianggap sebagai kemunduran karena membatasi persaingan dengan kapal asing dalam industri pelayaran domestik. Meskipun pada akhir pemerintahannya, SBY meratifikasi UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum, hal ini baru berlaku pada 1 Januari 2015. Upaya untuk memperbaiki iklim investasi melalui paket reformasi kebijakan pada Februari 2006 mencakup UU Penanaman Modal baru, UU Perpajakan baru, dan amandemen UU Bea Cukai serta revisi UU Ketenagakerjaan, tetapi implementasinya terhambat oleh masalah koordinasi, lambatnya progres di DPR, dan regulasi pendukung yang kurang baik dirancang.

Kendala dalam reformasi ekonomi melibatkan sensitivitas politik, sentimen nasionalistik yang meningkat, serta kelompok kepentingan dan agenda politik yang beragam. Gaya kepemimpinan Presiden SBY juga dianggap sebagai penyebab lambatnya reformasi ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi didukung oleh kenaikan harga komoditas dunia, peran sektor jasa meningkat, sementara pertumbuhan sektor manufaktur melambat. Beberapa faktor, seperti kebijakan domestik yang tidak optimal, biaya logistik tinggi, dan iklim investasi yang tidak kondusif, menjadi penyebab kondisi ini. Pemerintahan SBY kurang berhasil mengatasi tantangan ini melalui reformasi ekonomi di tingkat mikro, sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat.

Selama pemerintahan Presiden Yudhoyono, terjadi peralihan otoritas dari presiden ke parlemen, khususnya dalam menentukan arah kebijakan atau reformasi ekonomi. Hal ini tampaknya membuat Presiden SBY enggan melakukan reformasi yang diperlukan namun tidak populer, mungkin karena takut menghadapi nasib serupa dengan dua presiden sebelumnya yang dimakzulkan DPR. Menteri kunci terkait ekonomi juga lebih sering diambil dari berbagai partai politik, yang dikenal sebagai Kabinet Pelangi pada pemerintahan SBY periode pertama, untuk mendapatkan dukungan politik dari parlemen. Desentralisasi dan otonomi daerah juga memberikan banyak tanggung jawab pengelolaan politik dan ekonomi kepada pemerintah daerah, menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam proses pengambilan kebijakan.

Dampak dari perubahan kelembagaan tersebut adalah terjadinya fragmentasi dalam proses pengambilan kebijakan, di mana setiap kementerian atau pemerintah daerah dapat beroperasi sesuai dengan agenda mereka sendiri tanpa menjalankan visi nasional yang konsisten. Contoh nyata adalah

konflik antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian mengenai kebijakan beras. Sebagai respons terhadap harapan publik akan tindakan cepat dari pemerintah, Presiden SBY menginstruksikan kementerian untuk menjalankan Program Kerja 100 Hari. Program ini memiliki tujuan umum untuk memperbaiki iklim investasi, menjaga stabilitas makroekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan publik serta mengentaskan kemiskinan. Namun, implementasinya tidak menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi ekonomi.

Ketidakmampuan pemerintahan SBY untuk melaksanakan reformasi pada kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi contoh utama. Hal ini telah menjadi beban fiskal yang signifikan dan menghambat investasi di sektor infrastruktur. Selain itu, ketidaktransparan rincian program kepada publik menimbulkan tanda tanya besar mengenai arah pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Kesulitan untuk mengukur kinerja pemerintah oleh pihak non-pemerintah juga menjadi dampak negatif. Sebagai kesimpulan, meskipun mendapatkan dukungan dari kenaikan harga komoditas dunia dan likuiditas global yang melimpah, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dianggap berhasil dalam manajemen stabilitas makroekonomi dan mengatasi dampak krisis finansial global 2008. Namun, dalam hal reformasi ekonomi yang lebih luas, seperti memperbaiki iklim investasi, pembangunan infrastruktur, mengatasi ketimpangan, dan melakukan reformasi perpajakan, Presiden SBY dinilai kurang berhasil, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat sejak 2010.

Kritik terhadap perekonomian SBY dapat difokuskan pada kegagalan dalam menyelenggarakan reformasi ekonomi yang memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kegagalan dalam melibatkan sektor swasta dan mengatasi hambatan regulasi telah mengakibatkan defisit infrastruktur yang berkepanjangan. Selain itu, kurangnya keberanian dalam menghadapi isu-isu yang tidak populer dan lambatnya respons terhadap kebutuhan ekonomi telah menjadi kendala utama. Fragmentasi dalam proses pengambilan kebijakan, terutama akibat peralihan otoritas ke parlemen, juga menjadi faktor yang mempersulit implementasi reformasi ekonomi secara konsisten.

Dalam konteks ini, kurangnya transparansi dalam komunikasi pemerintah kepada publik mengenai program-program ekonomi dan langkah-langkah yang diambil juga merupakan kekurangan serius. Hal ini menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis mengenai arah pembangunan ekonomi nasional. Akhirnya, tidak adanya keseriusan dalam mengatasi isu-isu krusial, seperti subsidi BBM, yang menjadi beban fiskal, juga mencerminkan kelemahan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang strategis. Dengan demikian, sementara pemerintahan SBY berhasil mengelola stabilitas makroekonomi dan menghadapi krisis global, kritik terhadap keberhasilan reformasi ekonominya, terutama dalam membangun infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, tetap menjadi perhatian utama dalam evaluasi kinerja ekonomi selama masa pemerintahannya.

3. Era Joko Widodo

Dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2014, Joko Widodo (Jokowi) berhasil memenangkan jabatan Presiden ke-7 Indonesia dan mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Kemenangan Jokowi memberikan optimisme kepada publik, mengingat citranya sebagai seorang pemimpin reformis yang efektif dalam menyelesaikan masalah di lapangan selama menjabat sebagai walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Jokowi dianggap sebagai pemimpin taktis yang lebih menekankan langkah konkret dan cepat di lapangan daripada pemimpin strategis dengan fokus pada 9 visi besar. Pemerintahan baru Jokowi, dijalankan oleh Kabinet Kerja, diharapkan dapat melaksanakan agenda kebijakan reformasi ekonomi, terutama dalam percepatan proyek infrastruktur, pengembangan sektor maritim, dan program jaminan sosial. Jokowi dihadapkan pada tantangan eksternal dan internal, termasuk pertumbuhan ekonomi yang melambat dalam empat tahun terakhir, menandakan lemahnya daya beli masyarakat.

Dalam menghadapi kondisi eksternal yang kurang kondusif, Jokowi mengambil pendekatan reformasi ekonomi domestik dengan fokus pada sisi penawaran, seperti pengembangan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi. Salah satu reformasi yang mencolok adalah pemotongan subsidi bahan bakar

minyak (BBM) sebagai upaya mengurangi beban fiskal. Langkah bold ini, termasuk kenaikan harga BBM bersubsidi, memberikan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Namun, meskipun langkah-langkah ini awalnya memunculkan kepercayaan publik akan komitmen pemerintah terhadap reformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi terus melambat hingga mencapai titik terendah 4,7% pada triwulan II tahun 2015. Tantangan utama termasuk kurangnya perbaikan signifikan dalam iklim investasi hingga pertengahan 2015, lambatnya kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, dan adanya ketidaksesuaian antara retorika reformis tingkat tinggi dengan kenyataan implementasi kebijakan di tingkat pemerintahan yang lebih rendah dan daerah. Tren proteksionis yang muncul pada periode kedua pemerintahan SBY dan berlanjut hingga pertengahan 2015 juga menjadi isu kritis. Hambatan non-tarif yang diterapkan pada sektor impor dan ekspor menciptakan lingkungan perdagangan yang semakin restriktif. Meskipun ada pembalikan kebijakan pada semester kedua tahun 2015, dengan perubahan Menteri Perdagangan dan minat untuk bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP), tantangan proteksionisme tetap menjadi bagian dari perekonomian Indonesia.

Untuk merespons permasalahan ini, Jokowi meluncurkan serangkaian Paket Kebijakan Ekonomi sejak September 2015. Namun, meskipun jumlahnya sudah mencapai 12 paket hingga Juni 2016, efektivitas implementasi dan pemantauan serta evaluasi kebijakan masih menjadi kendala. Langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi dalam beberapa sektor strategis, seperti pertanian, infrastruktur, properti, maritim, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan logistik, diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memberikan insentif investasi. Meskipun demikian, masih terdapat kekhawatiran akan kurangnya komitmen nyata dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengatasi hambatan regulasi di lapangan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi paket kebijakan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dalam merespons dinamika ekonomi.

Meskipun pemerintahan Jokowi telah berupaya mengatasi tantangan ekonomi melalui reformasi yang berfokus pada penawaran, kritik dapat difokuskan pada implementasi yang belum optimal dan ketidaksesuaian antara retorika reformis dan realitas di lapangan. Diperlukan langkah-langkah lebih konkret untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diumumkan di tingkat tinggi dapat diimplementasikan dengan efektif di seluruh jajaran pemerintahan dan daerah. Sejumlah kritik terhadap kebijakan ekonomi Jokowi mencakup berbagai aspek yang memerlukan perhatian mendalam. Pertama, dalam hal pertumbuhan ekonomi, meskipun Jokowi menetapkan target ambisius antara 6% hingga 7% dalam RPJMN 2014-2019, kenyataannya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2015-2018 hanya berada di kisaran 4,88% hingga 5,17%. Hal ini mencerminkan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan untuk mencapai target yang lebih realistis.

Sektor investasi asing langsung (FDI) menunjukkan kinerja negatif pada semester pertama 2014, meskipun pemerintah telah menerapkan insentif-insentif seperti tax holiday dan tax allowance, serta menghadirkan online single submission (OSS) untuk mempermudah izin berusaha. Keberlangsungan iklim investasi yang belum optimal memerlukan strategi lebih lanjut untuk menarik investor. Privatisasi mengalami hambatan dalam implementasinya karena sikap ambivalen pemerintah terhadap konsep tersebut. Kejelasan dan konsistensi dalam pendekatan terhadap privatisasi menjadi kunci untuk memajukan usaha ini.

Pembatalan UU Kelistrikan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2003, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, memberikan dampak signifikan terhadap iklim investasi. Perlu adanya langkah strategis untuk menyusun regulasi yang mendukung dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Pertumbuhan industri manufaktur yang terus di bawah target, khususnya pada tahun 2018, menunjukkan perlunya fokus lebih besar dalam mendukung sektor ini sesuai dengan target RPJMN 2015-2019.

Defisit dalam neraca perdagangan, terutama yang mencapai puncak pada tahun 2018 sebesar US\$ 8,57 miliar, menandakan perlunya upaya intensif untuk mencapai keseimbangan ekspor dan impor. Kesimpulannya, kritik terhadap kebijakan ekonomi Jokowi pada periode pertama memberikan gambaran mengenai beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan tersebut. Meskipun terdapat upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui reformasi dan program-program strategis, realitas pertumbuhan yang di bawah target, kinerja investasi yang belum optimal, kendala dalam privatisasi, hingga defisit neraca perdagangan menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan ditangani lebih lanjut. Evaluasi kritis ini tidak hanya mencerminkan tanggapan terhadap kinerja pemerintah dalam mencapai target ekonomi nasional tetapi juga menyoroti kompleksitas tantangan eksternal dan internal yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

6.3 Penutup

6.3.1 Rangkuman

Krisis ekonomi dan resesi adalah dua konsep yang saling terkait dalam ekonomi, tetapi mereka memiliki perbedaan yang signifikan. Krisis ekonomi dan resesi keduanya melibatkan penurunan dalam aktivitas ekonomi, dan resesi adalah konsep yang lebih luas yang dapat mencakup resesi serta berbagai jenis gangguan ekonomi lainnya. Krisis keuangan Asia tahun 1997 secara signifikan berdampak pada perekonomian Indonesia, menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 13% dan penurunan PDB riil yang signifikan. Untuk mengatasi krisis ini, Indonesia meminta bantuan internasional dari Dana Moneter Internasional (IMF). Pemerintah Indonesia telah memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur untuk memerangi kemerosotan ekonomi, dengan menyelenggarakan Infrastructure Summit pada tahun 2005 yang bertujuan untuk menarik investasi asing dalam pembangunan infrastruktur.

Namun, hal ini belum berhasil karena kurangnya reformasi dan peraturan pemerintah untuk meningkatkan investasi infrastruktur. Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah dipuji atas reformasi-reformasi efektifnya dalam mengatasi berbagai masalah di Indonesia, termasuk proyek-proyek infrastruktur, pengembangan sektor maritim, dan program-program sosial. Meskipun begitu, terlepas dari usaha-usaha Pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap stagnan. Hal ini disebabkan oleh melemahnya iklim investasi, melemahnya pembangunan infrastruktur, dan kurangnya implementasi kebijakan yang efektif.

6.3.2 Evaluasi

1. Kemukakan pendapat Anda terkait hubungan antara resesi dengan krisis ekonomi!
2. Menurut pendapat Todaro & Smith (2003) krisis ekonomi dapat disebabkan oleh perubahan politik, bencana alam, atau kejadian tak terduga lainnya yang mengganggu stabilitas ekonomi. Uraikan pendapat Anda tentang pernyataan tersebut didukung dengan fenomena terkini!
3. Jelaskan faktor apa saja yang memicu terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia!
4. Mengutip pendapat Aviliani (2023) dalam CNBC Indonesia menjelaskan bahwa krisis ekonomi diperkirakan terjadi pada tahun 2024 dan 2025 akibat ketidakpastian global. Analisislah fenomena yang terjadi pada tahun 2023 sehingga dapat memicu krisis ekonomi!
5. IMF merupakan organisasi internasional yang memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas perekonomian global. Mengutip pendapat Lahadalia (2023) dalam CNN Indonesia, banyak kebijakan ekonomi yang ditawarkan IMF yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, salah satunya pada saat terjadi krisis 1998. Baru-baru ini IMF meminta kepada Presiden Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan mineral mentah lainnya. Deskripsikan pendapat Anda, bagaimana strategi yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pengaruh dari internasional?

6.3.3 Daftar Pustaka

- Arafat, M. R. (2009). *Faktor penyebab krisis finansial global 2008 serta eksekusi krisis terhadap tatanan ekonomi global*.
- Ba, A. D. (2023). *Asian Financial Crisis*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/money/topic/Asian-financial-crisis>
- Dori, J. T. (1998). *Indonesia's Economic and Political Crisis: A Challenge for U.S. Leadership in Asia*. Heritage. <http://www.heritage.org/research/reports/1998/08/indonesias-economic-and-political-crisis>
- Fahrika, A. I., & Zulkifli. (2020). Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya. In Dahlia & Juhasdi (Eds.), *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Hays, J. (2015). *1997-98 ASIAN FINANCIAL CRISIS IN INDONESIA: Poor Indonesians and the Asian Financial Crisis in Indonesia*. Fact and Details. http://factsanddetails.com/indonesia/History_and_Religion/sub6_1c/entry-3962.html
- Investment, I. (2020). *Krisis Keuangan Asia di Indonesia*. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/krisis-keuangan-asia/item246?>
- Radelet, S., & Sachs, J. D. (1998). The East Asian financial crisis: Diagnosis, remedies, prospects. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1, 1–90. <https://doi.org/10.2307/2534670>
- Soesastro, H., & Raymond, A. (2005). Survey of recent developments. In *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Taylor & Francis Journals (Vol. 41, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.728620>
- Sugawara, E., & Nikaido, H. (2014). *Properties of AdeABC and AdeIJK efflux systems of Acinetobacter baumannii compared with those of the AcrAB-TolC system of Escherichia coli*. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*.

BAB 7

PILAR EKONOMI INDONESIA

7.1 Pendahuluan

7.1.1 Deskripsi Singkat

Sistem perekonomian Indonesia berdiri di atas tiga pilar utama, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi. Dalam struktur perekonomian nasional, BUMN dan BUMS mewakili dua kelompok utama, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta. BUMN adalah entitas penting dalam ekonomi nasional Indonesia, beroperasi bersama sektor swasta, perusahaan domestik dan asing, serta koperasi. BUMN didefinisikan sebagai perusahaan di mana sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui investasi langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai pelaku ekonomi, BUMN beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Sejarah BUMN di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke era Hindia-Belanda (pra-kemerdekaan), di mana beberapa dari mereka kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Beberapa BUMN didirikan oleh pemerintah Indonesia, sementara beberapa lainnya kemudian dijual kepada pihak asing, baik negara lain atau swasta asing. Berdasarkan bentuknya, BUMN di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis: Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero. Namun, saat ini hanya ada dua jenis, yaitu Perum dan Persero.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan swasta. BUMN beroperasi di sektor-sektor strategis dan memiliki pengaruh besar dalam sektor-sektor yang mencakup kebutuhan publik seperti transportasi umum, pertambangan, air dan listrik, bahan bakar, telekomunikasi, dan sebagian aktivitas perbankan. Ini sesuai dengan prinsip UUD 1945 Pasal 33 yang menegaskan bahwa sumber daya yang penting bagi kehidupan masyarakat harus dikuasai oleh negara. Namun, meski BUMN memiliki peran penting, dominasi pemerintah belum berhasil meningkatkan nilai tambah dan penciptaan nilai dari sumber daya yang dimiliki oleh negara. Studi oleh Bank Dunia menunjukkan beberapa fenomena di BUMN, termasuk penggunaan anggaran pemerintah yang seharusnya dialokasikan untuk pelayanan sosial, pengambilan kredit untuk investasi yang tidak tepat, polusi yang lebih tinggi daripada industri swasta, dan perbaikan BUMN yang belum sepenuhnya mengurangi defisit fiskal.

Sejak awal berdirinya, BUMN telah menjadi bagian integral dari perekonomian Indonesia dan terus berkontribusi terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan negara. Namun, tantangan yang dihadapi oleh BUMN menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dan reformasi dalam cara mereka dioperasikan dan dikelola. Ini akan memastikan bahwa BUMN dapat terus memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, sambil juga memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia. Pola bisnis BUMN cenderung konvensional, dengan monopoli, subsidi, dan perlindungan industri, yang tidak dapat bersaing secara efektif dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Hingga akhir tahun 2009, total aset BUMN mencapai angka yang signifikan, namun belum semuanya dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan. Return on Asset (ROA) BUMN masih relatif kecil, mencerminkan kurangnya efisiensi dalam memanfaatkan aset secara produktif. Aset yang belum dimanfaatkan sepenuhnya menjadi potensi untuk meningkatkan kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, tantangan dalam meningkatkan kinerja BUMN terlihat dalam kurangnya kemampuan untuk bersaing secara bebas dan adanya campur tangan pemerintah yang terlalu besar. Melalui kerja sama

dengan sektor swasta dan upaya efektif dalam mengelola aset, BUMN dapat menjadi lebih kompetitif, berkinerja baik, dan berkontribusi lebih besar pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah untuk mengubah pola bisnis BUMN agar lebih efisien dan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Ini akan memastikan bahwa BUMN dapat terus memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, sambil juga memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia. Pada Bab 7 ini mempelajari Pilar Ekonomi Indonesia yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, Peran BUMN Dalam Perekonomian Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Peran BUMS Terhadap Pendapatan Negara, Koperasi, Kerjasama Publik Swasta, dan Studi Kasus Kemitraan Publik Swasta.

7.1.2 Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan Pilar Ekonomi Indonesia

7.1.3 Indikator

1. Mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan Badan Usaha Milik Negara
2. Mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan Peran BUMN Dalam Perekonomian Negara
3. Mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan Badan Usaha Milik Swasta
4. Mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan Peran BUMS Terhadap Pendapatan Negara
5. Mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan Koperasi
6. Mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan Kerjasama Publik Swasta
7. Mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan Studi Kasus Kemitraan Publik Swasta

7.2 Pembahasan

7.2.1 Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran krusial dalam kegiatan ekonomi nasional, bersanding dengan pelaku ekonomi lain seperti sektor swasta (dari skala besar hingga kecil, baik domestik maupun asing) dan koperasi. Kontribusi positif BUMN terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, BUMN menjadi implementasi nyata dari demokrasi ekonomi yang terus dikembangkan secara progresif dan berkelanjutan. Dalam menjalankan operasional bisnisnya, BUMN mengikuti prinsip-prinsip umum badan usaha dengan tujuan utama memperoleh keuntungan (*profit-oriented*). Selain fokus pada aspek keuntungan, pendirian BUMN juga bertujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Poin ini ditegaskan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sebagai agen pembangunan, BUMN tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pemerintah Pusat, 2003).

Peran yang diemban oleh BUMN sangat besar dan berat. Meskipun demikian, sebagai subjek hukum, BUMN wajib tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku. Saat melakukan investasi, BUMN merujuk pada beberapa undang-undang. Dalam prakteknya, seringkali muncul potensi tumpang tindih, konflik, dan multitafsir antara Undang-undang BUMN dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Masalah utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada aspek tata kelola (*governance*) dan profesionalitas. Kinerja BUMN dituntut setara dengan perusahaan swasta dan sebagai pelaku ekonomi, BUMN pada dasarnya tidak berbeda dengan swasta. Oleh karena mayoritas kepemilikannya berasal dari negara, prinsip kehati-hatian harus senantiasa menjadi prioritas. Untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan yang lebih baik, perlu dilakukan pembenahan khusus terhadap regulasi yang mengatur BUMN serta regulasi terkait.

Analisis dan evaluasi mengenai Peningkatan BUMN sebagai Agen Pembangunan di Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Perumahan difokuskan pada menganalisis dan mengevaluasi peraturan

perundang-undangan terkait peran BUMN dalam bidang-bidang tersebut. Beberapa undang-undang yang menjadi fokus meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan tidak Sehat
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum, digunakan beberapa dimensi penilaian, termasuk kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator, potensi tumpang tindih atau ketidakharmonisan antar pasal dalam undang-undang, serta implementasi peraturan perundang-undangan. Sebagai penutup, perlu dilakukan upaya konkret untuk merampingkan regulasi dan memastikan implementasi yang efektif agar BUMN dapat memberikan kontribusi maksimal sebagai agen pembangunan di bidang Pangan, Infrastruktur, dan Perumahan.

Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tujuan yang jelas sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang BUMN. Tujuan utama BUMN adalah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi nasional dan meningkatkan penerimaan negara. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, serta membantu penerimaan keuangan negara. Meskipun BUMN bertujuan untuk mengejar keuntungan, dalam beberapa situasi, BUMN dapat diberikan tugas khusus yang berfokus pada pelayanan umum. Pemerintah dapat memberikan tugas tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Penugasan tersebut harus disertai dengan pembiayaan atau kompensasi berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial (Pemerintah Pusat, 2003).

Selain itu, BUMN juga diharapkan untuk menyediakan barang dan/atau jasa berkualitas tinggi dan memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ini menunjukkan bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh BUMN, baik dalam bentuk barang maupun jasa, harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Terakhir, BUMN juga diharapkan menjadi pelopor dalam kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. BUMN juga diharapkan untuk secara aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Kegiatan perintis ini mencakup penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun belum dapat dilakukan secara komersial oleh swasta dan koperasi karena tidak menguntungkan. Dengan demikian, tujuan pendirian BUMN mencakup pelayanan umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, penyediaan barang dan jasa berkualitas, serta peran sebagai perintis kegiatan ekonomi yang mungkin tidak dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Ini menunjukkan bahwa BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan pelayanan masyarakat.

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengadopsi berbagai model bisnis. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pengelolaan BUMN, pada tahun 1997 terdapat 188 perusahaan BUMN yang mencakup enam sektor, termasuk industri/perdagangan, jasa keuangan, migas, pertambangan, perumahan, dan lainnya. Kepemilikan negara dalam BUMN, berdasarkan status hukumnya, dikelompokkan menjadi empat kategori: Patungan Minoritas, Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Persero. Menurut Laporan Menteri Keuangan, jumlah BUMN terakhir berdasarkan status hukumnya hingga Maret 2001 adalah 188 perusahaan, yang terdiri dari 125 Persero, 13 Perum, 15 Perjan, 21 Perusahaan Patungan Minoritas, dan 14 anak Perusahaan Holding Company (Fahrika & Zulkifli, 2020).

1. Perusahaan Jawatan (PERJAN)

Perusahaan negara yang tidak memiliki badan hukum. Perusahaan ini lebih berfokus pada penyediaan layanan kepada masyarakat daripada mencari keuntungan. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2000 menjelaskan bahwa Perusahaan Jawatan adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham. Namun, seiring perkembangannya, status Perusahaan Jawatan ini ditingkatkan menjadi Perum atau bahkan Persero.

2. Perusahaan Negara Umum (PERUM)

Perusahaan negara yang dibentuk tidak hanya untuk melayani kepentingan umum tetapi juga untuk mencari keuntungan. Ketentuan mengenai Perum diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 dan kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara, berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Organ Perum dapat didefinisikan sebagai Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Menteri di sini adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah sebagai pemilik modal dalam Perum. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Negara BUMN.

Menurut Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Menteri adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum yang memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Menteri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Ini mencakup memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi dan memastikan bahwa kebijakan pengembangan usaha yang diusulkan oleh Direksi mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. Menteri juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pengembangan usaha sesuai dengan tujuan dan maksud Perum.

3. Perusahaan Perseroan (Persero)

Bentuk perusahaan di mana negara memiliki atau mengendalikan setidaknya 51% saham melalui penyertaan modal secara langsung. Pembentukan jenis badan usaha ini berorientasi pada pencapaian keuntungan dan berusaha dalam bidang-bidang yang dapat merangsang perkembangan sektor swasta dan koperasi. Dalam praktiknya, PT Persero hampir tidak berbeda dengan PT biasa, kecuali bahwa unsur pemerintah masih mendominasi di dalamnya. Peraturan mengenai Perusahaan Negara dalam bentuk Perseroan awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 1998. Saat ini, Perusahaan Negara tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan pendirian Persero adalah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan (Pemerintah Pusat, 2003).

Berdasarkan definisi di atas, beberapa elemen penting yang melekat dalam Persero adalah:

- a. Persero adalah badan usaha;
- b. Persero adalah Perseroan Terbatas;
- c. Modalnya terbagi atas saham;
- d. Tujuan pendiriannya adalah untuk mencari keuntungan.

Mengingat Persero adalah PT, pendirian dan pengelolaan Persero juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor. Tahun 1995 dengan beberapa pengecualian. Misalnya, meskipun Undang-

Undang Nomor. 1 Tahun 1995 mensyaratkan ada dua orang pemegang saham, ketentuan ini dikecualikan untuk Persero, karena dalam Persero, negara bisa saja memegang atau menguasai 100% saham Persero. Negara menguasai 100% atau setidaknya 51% saham perusahaan yang bersangkutan. Dalam kasus privatisasi, seperti "PT Indonesia (Persero) Tbk", negara melepaskan mayoritas kepemilikan saham Persero kepada pihak asing. Akibatnya, Persero tersebut telah menjadi perusahaan swasta dan menjadi PT. Indosat Tbk.

Pendirian Persero diajukan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan pertimbangan dasar setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Dalam persaingan ekonomi global, Persero dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Hal ini tentu akan menguntungkan nilai Persero itu sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan.

7.2.2 Peran BUMN Dalam Perekonomian Negara

Menguasai sumber daya vital negara merupakan kunci utama bagi kemakmuran rakyat. Sumber daya yang melimpah harus dikelola secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika sumber daya ini dikuasai oleh sekelompok perusahaan swasta, risikonya adalah keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Oleh karena itu, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perekonomian sangat krusial untuk mencegah disparitas ekonomi (Erman Rajagukguk, 2016). Contohnya, BUMN seperti Pertamina berperan dalam mengelola sektor minyak bumi, sehingga keuntungan dapat lebih merata di masyarakat. Selain itu, peran BUMN juga terlihat dalam penyediaan lapangan kerja. Dengan beroperasinya ratusan perusahaan BUMN dan anak perusahaannya, jutaan lapangan pekerjaan telah tercipta. Dampaknya tidak hanya langsung dirasakan oleh para pekerja, tetapi juga menciptakan peluang kerja tidak langsung di sektor-sektor terkait. BUMN dengan demikian menjadi kontributor utama dalam mengatasi masalah pengangguran.

Sebagai penyeimbang ekonomi, BUMN juga memegang peran strategis. Pemerintah tidak dapat sepenuhnya menyerahkan kendali ekonomi ke sektor swasta. Dengan peran BUMN, pemerintah dapat mengatur secara langsung jalannya ekonomi, menciptakan kestabilan ekonomi, seperti yang terlihat dalam pengendalian harga beras oleh Perum Bulog. BUMN berperan sebagai perintis dalam sektor yang mungkin kurang diminati oleh swasta, terutama yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Contohnya, Damri yang membuka rute-rute ke daerah terpencil sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Peran BUMN juga melibatkan perlindungan terhadap pelaku ekonomi lemah, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan BUMN, seperti Pos Indonesia, membuka kantor di seluruh pelosok Indonesia, melindungi UMKM yang mungkin tidak dilirik oleh perusahaan ekspedisi swasta.

BUMN tidak hanya berfungsi untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga memberikan keuntungan bagi negara. Seluruh laba dan keuntungan yang dihasilkan oleh BUMN masuk ke dalam kas negara, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan. Dengan begitu, BUMN menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek. Sebagai agen pembangunan, BUMN memainkan peran penting dalam pembangunan nasional, termasuk dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah telah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 219 triliun (2005-2019) yang digunakan untuk meningkatkan kinerja BUMN, melakukan restrukturisasi BUMN, dan mendirikan BUMN baru (Newshire & Alaydrus, n.d.). Selain itu, untuk memperkuat permodalan BUMN di tengah dampak Covid-19, Pemerintah melakukan PMN ke BUMN sebesar Rp 31,5 triliun (Keuangan, n.d.).

Dalam upaya mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19, BUMN terlibat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang meliputi penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, serta penjaminan kredit modal kerja. Kredit kepada UMKM dan

koperasi disalurkan melalui kredit Usaha Mikro (UMi) oleh PT Pegadaian, PT PNM, dan PT Bahana. Selain UMi yang plafonnya sampai Rp10 juta, juga disalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan BUMN dengan plafon sampai Rp 500jt. Bunga KUR sangat rendah karena disubsidi oleh Pemerintah.

Penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM dilakukan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo hingga plafon pinjaman Rp 10 miliar dan bunga disubsidi. Sementara itu, untuk korporasi, penjaminan kredit modal kerja mulai Rp10 miliar-Rp1 triliun dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020). Kedua lembaga ini merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki jenis penjaminan sovereign guarantee dan didukung oleh peningkatan kapasitas finansial melalui PMN.Peran BUMN dalam mendorong roda ekonomi sangat penting, yang akan meningkatkan pasokan dan permintaan bahan baku serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Diharapkan BUMN dapat menjalankan perannya secara maksimal dan bijaksana, dan dunia usaha dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, BUMN memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

7.2.3 Badan Usaha Milik Swasta

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah organisasi bisnis yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok swasta. Tujuan utamanya biasanya adalah mencari keuntungan, tetapi beberapa BUMS juga mungkin memiliki tujuan sosial, seperti menjalankan rumah sakit, sekolah, universitas, atau panti asuhan.Ada berbagai bentuk BUMS, termasuk Perusahaan Perseorangan, Persekutuan, dan Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan Perseorangan adalah bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Keuntungannya meliputi kemudahan dalam pendirian dan pembubaran, kontrol penuh atas keuntungan, kepuasan dalam memimpin perusahaan sendiri, dan manajemen yang sederhana. Namun, ada juga beberapa kelemahan, seperti tanggung jawab tak terbatas atas kerugian, keterbatasan modal, dan pertumbuhan serta kelangsungan yang terbatas(Sudrajat et al., 2021).

Persekutuan adalah bisnis yang melibatkan dua pemodal atau lebih. Keuntungannya meliputi kemudahan dalam pendirian, kombinasi pengetahuan dan keterampilan, serta sumber daya yang lebih besar. Namun, ada juga beberapa kelemahan, seperti tanggung jawab tak terbatas, operasi yang terbatas waktu, potensi konflik antara mitra, dan kesulitan dalam membubarkan perusahaan.Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham dan terpisah dari kekayaan pribadi pemiliknya. Keuntungannya meliputi tanggung jawab terbatas, sumber daya yang lebih besar, dan kemampuan untuk menarik karyawan. Namun, ada juga beberapa kelemahan, seperti biaya pendirian yang tinggi, administrasi yang kompleks, dan pajak ganda.

Dalam PT, wewenang dibagi antara pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pemegang saham memberikan wewenang kepada direksi untuk menjalankan perusahaan, sementara komisaris berfungsi sebagai pengawas kinerja direksi. Keputusan strategis seperti pengangkatan direksi, pembagian dividen, dan kebijakan perusahaan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Ali, 2020).Secara keseluruhan, BUMS memainkan peran penting dalam perekonomian dengan berbagai keuntungan dan kelemahan tergantung pada jenisnya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan karakteristik masing-masing, pemilik usaha dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam memilih bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi bisnis mereka. BUMS juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta berperan dalam inovasi dan kompetisi pasar.

7.2.4 Peran BUMS Terhadap Pendapatan Negara

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu peran utamanya adalah menciptakan lapangan kerja, yang berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita, Produk Domestik Bruto (PDB), dan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan swasta juga berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pembayaran pajak. Semakin besar pendapatan perusahaan swasta, semakin besar pula pajak yang dibayarkan ke pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, perusahaan swasta memiliki banyak peran lain dalam perekonomian Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Meningkatkan penerimaan devisa negara melalui aktivitas ekspor dan impor.
- b. Membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan produksi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
- c. Membantu mengurangi masalah pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja.
- d. Berperan sebagai penggerak perekonomian.
- e. Membantu meningkatkan kinerja ekonomi nasional di berbagai sektor pembangunan.
- f. Berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan.
- g. Menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat.
- h. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan kerja baru.
- i. Membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak dapat ditangani oleh BUMN.
- j. Membantu pemerintah dalam pendapatan negara melalui pajak.
- k. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh swasta dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Tujuan utama perusahaan swasta adalah memperoleh keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Perusahaan swasta didirikan untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia, dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan UUD 1945. Semoga informasi ini bermanfaat. BUMS juga berperan dalam mengelola sumber daya ekonomi negara. Misalnya, perusahaan swasta di sektor pertambangan mengelola sumber daya mineral dan batubara, sementara perusahaan swasta di sektor perkebunan mengelola sumber daya alam seperti karet, kelapa sawit, dan kopi. Dengan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan, BUMS membantu memastikan bahwa sumber daya ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi negara.

BUMS menciptakan lapangan kerja yang signifikan, yang membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, perusahaan swasta di sektor manufaktur, konstruksi, dan jasa sering kali menjadi penyedia kerja utama di banyak daerah. BUMS memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui pembayaran pajak dan dividen. Misalnya, perusahaan swasta yang menghasilkan laba akan membayar pajak penghasilan kepada negara. Selain itu, perusahaan swasta yang terdaftar di bursa saham juga akan membayar dividen kepada pemegang sahamnya, termasuk pemerintah jika pemerintah memiliki saham di perusahaan tersebut.

BUMS berperan dalam peningkatan ekonomi dengan cara meningkatkan produksi dan produktivitas. Misalnya, perusahaan swasta di sektor teknologi sering kali menjadi motor inovasi dan pertumbuhan, sementara perusahaan swasta di sektor perdagangan membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. BUMS memberikan kontribusi penting kepada negara dan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya, penciptaan lapangan kerja, kontribusi ke pendapatan negara, dan peningkatan ekonomi. Dengan demikian, BUMS memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia (Hasan & Muhammad, 2018).

7.2.5 Koperasi

Koperasi adalah konsep yang berasal dari kata Latin "Coopere", yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "cooperation". "Co" berarti bersama dan "operation" berarti bekerja, sehingga "cooperation" berarti bekerja bersama. Dalam konteks ini, kerja sama dilakukan oleh individu-individu yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama (Sitio & Tamba, 2001). Dalam bahasa Arab, ini disebut "ta'awun" yang berarti saling membantu. Koperasi adalah organisasi yang terdiri dari individu-individu yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama (Nuh & Bakri, 1992). Oleh karena itu, koperasi adalah entitas yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan bersama. Koperasi adalah entitas hukum yang didirikan berdasarkan prinsip kekeluargaan. Anggotanya bisa terdiri dari individu atau badan hukum lainnya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi dikelola secara kolektif oleh semua anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil oleh koperasi. Keuntungan yang diperoleh koperasi, yang biasa disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU), biasanya dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing anggota.

Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau adalah seorang ahli ekonomi yang percaya bahwa ekonomi rakyat adalah kunci untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas kontribusinya dalam bidang koperasi, Drs. Moh. Hatta dianugerahi gelar sebagai Bapak Koperasi Indonesia (Hadiprodjo, 1992). Menurut Undang-Undang Koperasi No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia didefinisikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial, yang anggotanya terdiri dari individu-individu atau badan hukum koperasi, dan merupakan struktur ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri dari individu-individu atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada prinsip kekeluargaan. Jadi, koperasi memiliki landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus patuh pada keputusan tertinggi, yaitu rapat anggota (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992). Menurut Moh. Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling membantu. Semangat saling membantu ini didorong oleh keinginan untuk memberikan layanan kepada sesama berdasarkan prinsip "satu untuk semua dan semua untuk satu".

Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya "10 tahun koperasi" 1941, mengatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia yang dengan sukarela ingin bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.
- b. Bahwa dengan bekerja sama, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
- c. Bahwa pendirian suatu koperasi memiliki pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Dasar, asas, dan prinsip koperasi menjadi fondasi yang tidak terpisahkan dalam perjalanan koperasi sebagai alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur di Indonesia. Landasan koperasi ini mencakup landasan idiil, landasan mental, dan landasan struktural. Sebagai landasan idiil, koperasi Indonesia berakar pada Pancasila dan UUD 1945. Kelima sila Pancasila menjadi dasar bagi kehidupan koperasi, yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan yang adil, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan idiil ini menjadi pedoman moral bagi anggota dan pengurus koperasi. Landasan struktural koperasi Indonesia ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Koperasi ditempatkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia, memberikan landasan hukum untuk keberadaannya.

Landasan mental koperasi Indonesia mencakup setia kawan dan kesadaran berpribadi. Koperasi Indonesia menggambarkan semangat gotong royong dalam kehidupan bangsa yang berbudaya, yang tercermin dalam prinsip kekeluargaan dan kegotongroyongan. Setia kawan menjadi dasar untuk bekerja sama berdasarkan kekeluargaan, sementara kesadaran berpribadi menciptakan tanggung jawab dan disiplin terhadap aturan koperasi. Selain itu, asas-asas koperasi Indonesia mencakup kekeluargaan dan kegotong royongan. Koperasi, dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan kegotong royongan, mencerminkan kepribadian Indonesia dan semangat bekerja sama tanpa memikirkan kepentingan pribadi, melainkan untuk kebahagiaan bersama.

Prinsip-prinsip koperasi menjadi pedoman pelaksanaan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Di antara prinsip-prinsip tersebut, seperti keanggotaan terbuka, satu anggota satu suara, pembagian SHU yang adil, dan pemberian balas jasa terbatas atas modal, semuanya bertujuan untuk menciptakan koperasi yang demokratis, adil, dan mandiri. Dengan menjalankan landasan, asas, dan prinsip tersebut, koperasi Indonesia tidak hanya menjadi badan usaha, tetapi juga gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Keseluruhan landasan dan asas ini membentuk identitas dan integritas koperasi Indonesia dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum, serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, peningkatan kesejahteraan anggota adalah prioritas utama koperasi melalui layanan usaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992). Oleh karena itu, keberhasilan koperasi dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota.

Sejalan dengan bentuknya sebagai entitas bisnis, tujuan koperasi adalah untuk mencapai keuntungan. Anggota koperasi juga tidak bertindak sebagai pemilik atau pelanggan dan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi (Ropke, 2009). Dengan demikian, penyimpangan dari tujuan tersebut dapat lebih cepat diketahui. Jadi, jika pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi individu atau masyarakat tersebut juga akan meningkat. Oleh karena itu, jika tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka tujuan tersebut juga diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan riil para anggotanya. Dalam hal tujuannya, koperasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengelola pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengelola pembelian barang-barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan bantuan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi memiliki beberapa peran, antara lain:

1. Membantu anggota untuk meningkatkan pendapatan/penghasilan.
2. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa.
5. Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari individu, baik secara perorangan maupun masyarakat.
6. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

Di dalam Bab III, Bagian Pertama Pasal 4 UU No. 25/1992, dijelaskan fungsi dan peran koperasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992), yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai pilar utamanya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun fungsi koperasi Indonesia adalah (Susanto & Firdaus, 2002):

1. Alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasian ekonomi sosial.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4. Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Dalam pelaksanaannya, koperasi memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi adalah memperjuangkan kemakmuran bersama secara merata bagi para anggota koperasi. Fungsi sosial koperasi adalah memupuk persaudaraan dan kekeluargaan secara gotong royong, yang pada akhirnya diharapkan terbina persatuan dan kesatuan bangsa. Koperasi harus memiliki rencana pengeluaran yang selaras dengan prinsip-prinsip koperasi, dengan mempertimbangkan hukum dan regulasi yang berlaku serta ketentuan administratif. Ada beberapa prinsip yang harus diikuti oleh koperasi dalam hubungannya dengan modal, yaitu:

1. Pengendalian dan manajemen koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang dapat diinvestasikan oleh seorang anggota dalam koperasi, dengan berlakunya prinsip satu anggota satu suara.
2. Modal harus digunakan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggota.
3. Hanya diberikan balas jasa yang terbatas kepada pemberi modal.
4. Untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien, pada dasarnya koperasi membutuhkan modal yang cukup.
5. Usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan (SHU) dan tidak membagikan semuanya kepada anggota.

Secara umum, sumber dana atau modal koperasi terdiri dari:

1. Modal sendiri yang berasal dari:
 - a. Simpanan wajib, yaitu simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu.
 - b. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi tersebut.
 - c. Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyesihan sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
 - d. Donasi atau hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.
2. Modal pinjaman atau modal luar, yang berasal dari:
 - a. Anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota yang bersangkutan.

- b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya, pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antara koperasi.
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sumber lain yang sah, pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.

Modal koperasi terdiri dari dua jenis utama, yaitu modal sendiri (equity) dan modal pinjaman. Modal sendiri terbagi menjadi beberapa bagian:

- a. Modal Awal: Ini adalah modal murni yang berasal dari anggota koperasi, yang terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi.
- b. Modal Organik: Ini adalah modal yang berasal dari dalam koperasi itu sendiri, yang mencakup cadangan yang disisihkan dari Surplus Hasil Usaha, selisih harga/nilai (agio/disagio) Sertifikat Modal Koperasi yang dialihkan oleh anggota kepada koperasi, dan penyetaraan Setoran Pokok Anggota Baru atas setoran pokok anggota lama.
- c. Modal Tambahan: Ini adalah modal yang dihimpun dari setiap kali penerbitan (ulang) Sertifikat Modal Koperasi. Penerbitan ulang Sertifikat Modal Koperasi dimaksudkan untuk pengembangan usaha, sesuai usulan (proposal) dari pengurus yang dibahas dan disahkan oleh Rapat Anggota.
- d. Hibah: Ini adalah modal yang diterima sebagai hadiah atau sumbangan tanpa kewajiban pengembalian.
- e. Modal Penyertaan: Ini dapat dikategorikan sebagai ekuitas atau Opsi Ekuitas. Sementara itu, modal pinjaman berasal dari berbagai sumber, termasuk Modal Penyertaan (yang memiliki karakteristik sebagai hutang), anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pada akhirnya, struktur modal ini mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan standar akuntansi keuangan yang biasa digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Koperasi. Oleh karena itu, mungkin diperlukan revisi terhadap Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 mengharuskan dilakukannya konversi modal koperasi, yang melibatkan pengalihan-namaan, pengalih-hitungan dan pengalih-bukuan. Untuk melakukan konversi, perlu dipahami terlebih dahulu karakteristik tiap komponen modal yang akan dikonversi, seperti Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib (sebagai modal sendiri menurut ketentuan pasal 41 ayat dan (2) UU nomor 25 tahun 1992), Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sebagaimana diatur dalam pasal 66-72 UU nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan dengan jelas bahwa dalam konteks pembangunan nasional, koperasi harus menjadi pilar utama dan platform sentral bagi ekonomi rakyat. Kebijakan ini sepenuhnya sejalan dengan esensi dan semangat Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia diatur sebagai usaha bersama, dan bentuk usaha yang paling sesuai dengan prinsip ini adalah Koperasi. Dalam konteks ini, peran koperasi menjadi sangat krusial karena dalam menjalankan ekonomi secara kolektif, koperasi dapat mengumpulkan kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau adalah seorang ahli ekonomi yang percaya bahwa ekonomi rakyat adalah kunci untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas kontribusinya dalam bidang koperasi, Drs. Moh. Hatta dianugerahi gelar sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Koperasi dianggap sebagai fondasi ekonomi

nasional, sehingga dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi para anggotanya. Mengingat betapa pentingnya peran koperasi dalam meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat, mari kita dorong perkembangan koperasi demi kemajuan dan kemakmuran bangsa ini di masa depan.

7.2.6 Kerjasama Publik Swasta

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakannya, sementara untuk barang privat, sektor swasta yang bertanggung jawab. Namun, dalam kenyataannya, terdapat barang campuran, seperti barang semi publik (quasi public goods) dan semi privat (quasi private goods). Pelayanan publik mencakup penyediaan barang publik murni, semi publik, dan semi privat. Untuk barang campuran ini, baik sektor publik maupun swasta dapat berkontribusi. Oleh karena itu, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, pemerintah daerah dapat mengadopsi program kemitraan dengan sektor swasta (Public Private Partnership/PPP) atau bekerja sama dengan sektor ketiga seperti organisasi nirlaba dan LSM (Felsing et al., 2008).

PPP merupakan model kemitraan yang didasarkan pada konsep penyedia terbaik (Best Sourcing). Dengan pendekatan Best Sourcing, pemerintah dapat mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam penyediaan pelayanan publik tertentu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas (value for money), serta menciptakan solusi saling menguntungkan baik bagi pemerintah maupun sektor swasta. Bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta dapat berupa kontrak pelayanan, tender penyediaan barang atau jasa, atau Business Process Outsourcing (Mahmudi, 2010). Kemitraan Publik-Swasta (PPP) merupakan jenis hubungan antara sektor publik dan swasta yang melibatkan sektor swasta sebagai mitra dalam rencana kerja pemerintah. PPP juga turut serta dalam merumuskan rencana peran pemerintah untuk memastikan kewajiban sosial terpenuhi dan mencapai kesuksesan reformasi sektor serta investasi publik. PPP memberikan kerangka kerja yang melibatkan sektor swasta dan mengakui peran pemerintah dalam menjamin pemenuhan kewajiban sosial serta keberhasilan reformasi sektor dan investasi public (Felsing et al., 2008).

PPP yang solid secara optimal mengalokasikan tugas, kewajiban, dan risiko di antara pemerintah dan mitra swasta. Kemitraan publik-swasta juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, misalnya, PPP dapat menggerakkan modal swasta, menarik investasi swasta untuk mendanai proyek infrastruktur yang mungkin tidak dapat dicapai hanya melalui pendanaan pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses ke layanan, yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Efisiensi yang lebih besar: PPP dapat meningkatkan efisiensi penyediaan layanan dengan memanfaatkan keahlian sektor swasta dalam bidang manajemen, operasional, dan inovasi (Felsing et al., 2008). Ini dapat menghasilkan penghematan biaya, peningkatan kualitas layanan, dan peningkatan produktivitas, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Peran pemerintah dalam memupuk hubungan publik-swasta untuk pembangunan ekonomi berbeda secara signifikan di antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan ekonomi ASEAN. Di Tiongkok, pemerintah memiliki kontrol dan investasi besar dalam proyek infrastruktur berskala besar dan secara aktif mendorong kerjasama dengan perusahaan swasta (Olsen, 2009). Campuran unik Tiongkok antara kapitalisme negara dan inisiatif yang dipimpin pemerintah menempatkan fokus besar pada pendanaan yang didukung pemerintah dan perencanaan strategis. Sementara itu, Amerika Serikat beroperasi secara besar-besaran dalam sistem ekonomi berbasis pasar. Dalam hal ini, peran pemerintah lebih diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bisnis melalui kerangka kerja hukum dan regulasi, insentif pajak, dan program hibah. Dalam lanskap ekonomi ASEAN yang beragam, tingkat pengembangan ekonomi dan struktur pemerintahan yang berbeda menghasilkan pendekatan yang berbeda. Beberapa negara ASEAN, seperti Indonesia dan Malaysia, memprioritaskan PPP untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur, sementara yang lain, seperti Singapura dan Vietnam, menekankan kemitraan teknologi dan pengembangan infrastruktur. Pada akhirnya, pendekatan yang

diadopsi di setiap wilayah mencerminkan konteks ekonomi dan politik yang berbeda. Beberapa model kemitraan yang dapat diadopsi meliputi:

- a. Kontrak pelayanan (service contract)
- b. Kontrak pengelolaan (management contract)
- c. Kontrak sewa (lease contract)
- d. Bangun-kelola-alih milik (Build, Operate and Transfer)
- e. Bangun-kelola-miliki-alih milik (Build, Operate, Own, and Transfer)
- f. Koneksi (concession)

Konsep dan model kerjasama kemitraan strategis berkembang seiring perubahan paradigma administrasi publik. (Mustopadidjaja AR, 2005) menyampaikan konsep mewirauasakan birokrasi melalui lima strategi inti (5 core strategies, 5Cs), yaitu:

- a. Strategi Inti (Centre Strategy)
- b. Strategi Konsekuensi (Consequence Strategy)
- c. Strategi Pelanggan (Customer Strategy)
- d. Strategi Kendali (Control Strategy)
- e. Strategi Budaya (Cultural Strategy)

Dalam pengembangan kerjasama kemitraan strategis, terdapat konsep dan model yang telah dikembangkan, seperti kerjasama antar daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan pihak ketiga, kemitraan strategis, aliansi strategis, dan kemitraan terpadu.

7.2.7 Studi Kasus Kemitraan Publik Swasta

Peran pemerintah dalam memupuk hubungan publik-swasta untuk pembangunan ekonomi berbeda secara signifikan di antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan ekonomi ASEAN. Di Tiongkok, pemerintah memiliki kontrol dan investasi besar dalam proyek infrastruktur berskala besar dan secara aktif mendorong kerjasama dengan perusahaan swasta (Olsen, 2009). Campuran unik Tiongkok antara kapitalisme negara dan inisiatif yang dipimpin pemerintah menempatkan fokus besar pada pendanaan yang didukung pemerintah dan perencanaan strategis. Sementara itu, Amerika Serikat beroperasi secara besar-besaran dalam sistem ekonomi berbasis pasar. Dalam hal ini, peran pemerintah lebih diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bisnis melalui kerangka kerja hukum dan regulasi, insentif pajak, dan program hibah. Dalam lanskap ekonomi ASEAN yang beragam, tingkat pengembangan ekonomi dan struktur pemerintahan yang berbeda menghasilkan pendekatan yang berbeda. Beberapa negara ASEAN, seperti Indonesia dan Malaysia, memprioritaskan PPP untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur, sementara yang lain, seperti Singapura dan Vietnam, menekankan kemitraan teknologi dan pengembangan infrastruktur. Pada akhirnya, pendekatan yang diadopsi di setiap wilayah mencerminkan konteks ekonomi dan politik yang berbeda.

Hubungan publik-swasta antara ekonomi Tiongkok, Amerika Serikat, dan ASEAN dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di setiap negara. Tiongkok telah membuat kemajuan signifikan dalam kemitraan publik-swasta (PPP) dan telah mencapai kerangka kebijakan yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Ketika wabah Covid-19 pecah, Tiongkok, Amerika Serikat, dan bahkan negara-negara ASEAN membuka kerjasama di bidang penelitian dan kesehatan, serta perusahaan ekspedisi dan transportasi untuk secara perlahan memulihkan ekonomi dan menyelamatkan warganya dari wabah Covid-19.

Output dari kolaborasi publik-swasta ini berupa penemuan. Vaksin Sinovac oleh Tiongkok, kemudian Tiongkok menjual vaksin tersebut ke seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat, dapat dikatakan bahwa perusahaan Sinovac dan pemerintah Tiongkok berbagi keuntungan dari penjualan vaksin tersebut. Perusahaan Sinovac Biotech juga akan membayar biaya lisensi sebesar 20 juta yuan

(sekitar Rp. 44,5 miliar) kepada CAS, yang akan dibayarkan secara bertahap sesuai dengan pencapaian tertentu dalam pengembangan dan produksi vaksin Sinovac. Perjanjian lisensi ini berlaku selama 20 tahun, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak (Akomea-Frimpong et al., 2023). Selain membayar royalti dan biaya lisensi kepada CAS, Sinovac Biotech juga harus memenuhi kewajiban lain, seperti mematuhi standar kualitas dan keamanan vaksin, melaporkan data klinis dan pasca pemasaran, serta berbagi informasi dan teknologi dengan CAS.

Dengan menyediakan vaksin Sinovac kepada negara-negara ASEAN dan negara lainnya, Tiongkok tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi dari ekspor vaksin tetapi juga memperkuat ikatan diplomatik, berpotensi membuka pintu bagi perjanjian perdagangan di masa depan. Sebaliknya, Amerika Serikat telah mendapat manfaat dari akses ke vaksin Sinovac untuk mempercepat upaya vaksinasi dalam negeri dan menunjukkan pentingnya kolaborasi internasional dalam mengatasi krisis kesehatan global. Bagi negara-negara ASEAN, vaksin Sinovac menawarkan alat penting untuk mengurangi dampak pandemi terhadap kesehatan dan ekonomi. Vaksinasi massal dapat mendorong pemulihan ekonomi dengan mengembalikan kepercayaan konsumen dan memfasilitasi penurunan kegiatan ekonomi utama, pada akhirnya berkontribusi pada ketahanan dan pertumbuhan pasca-pandemi di wilayah ini. Dinamika ini menunjukkan bagaimana diplomasi vaksin yang beragam membentuk lanskap ekonomi dan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik.

7.3 Penutup

7.3.1 Rangkuman

Terdapat beberapa pilar ekonomi Indonesia, antara lain BUMN, BUMS, dan Koperasi. BUMN memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan dukungan kepada semua sektor. BUMN juga memainkan peran strategis dalam mendorong stabilitas ekonomi, memastikan keterlibatan pemerintah dalam sektor-sektor yang mungkin menghadapi tantangan ekonomi. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah pemain kunci dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan modal, PDB per kapita, dan pertumbuhan ekonomi. BUMS berkontribusi pada pertumbuhan negara melalui pengumpulan pajak, dengan pendapatan pajak yang signifikan yang dibayarkan kepada pemerintah. Koperasi Indonesia didefinisikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial, yang terdiri dari individu-individu atau badan hukum koperasi. Koperasi memiliki landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban.

7.3.2 Evaluasi

1. Kemukakan pendapat Anda, apa sajakah peran BUMN dalam perekonomian negara?
2. Mengutip dari Ramandhita (2023) dan Andini (2023) dalam Republik Merdeka Online, bahwa sejumlah tujuh perusahaan BUMN dibubarkan karena dianggap sudah tidak mampu melaksanakan perannya dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam meraih keuntungan dan memberikan kemanfaatan umum. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya merugi. Analisislah apa penyebab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering mengalami kerugian dan bangkrut? Serta langkah-langkah apa sajakah yang seharusnya dilakukan oleh kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
3. PT. Djarum merupakan salah satu Badan Usaha Milik Swasta yang memiliki perkembangan luar biasa setiap tahunnya. Analisislah bagaimana kontribusi PT. Djarum terhadap perekonomian negara!
4. Koperasi terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam bertujuan untuk membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan bunga

yang lebih rendah daripada bank. Namun, fenomena yang terjadi saat ini adalah masyarakat lebih tertarik pinjol daripada koperasi (Ramadhan, 2023). Deskripsikan pendapat Anda, bagaimana pendekatan yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat masyarakat dalam kegiatan koperasi, terutama bagi milenial dan Gen Z?

5. Kemitraan Publik-Swasta (PPP) merupakan jenis hubungan antara sektor publik dan swasta yang melibatkan sektor swasta sebagai mitra dalam rencana kerja pemerintah? Kemukakan pendapat Anda, bagaimana bentuk kemitraan pemerintah swasta dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM?

7.3.3 Daftar Pustaka

- Akomea-Frimpong, I., Jin, X., Osei-Kyei, R., & Tumpa, R. J. (2023). A critical review of public-private partnerships in the COVID-19 pandemic: key themes and future research agenda. *Smart and Sustainable Built Environment*, 12(4), 701–720. <https://doi.org/10.1108/SASBE-01-2022-0009>
- Ali, K. (2020). Pengantar Bisnis: Pengantar Bisnis. In *Academia.edu* (Issue Pengantar Bisnis).
- Erman Rajagukguk. (2016). *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Perseroan Terbatas*.
- Fahrika, A. I., & Zulkifli. (2020). Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya. In Dahlia & Juhasdi (Eds.), *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Felsing, K., Miranda, J., Skilling, H., Booth, K., Areneta, E., Birken, M. A., Pedersen, S., Edwards, S., Woodward, I., Herrera, V., Canzon, M., Sutarez, A., & Mannapbekov, N. (2008). Public-Private Partnership Handbook Acknowledgments. *Asian Development Bank*, 100. <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31484/public-private-partnership.pdf>
- Hadiprodjo, S. R. (1992). *Manajemen Koperasi*.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). *Pembangunan Ekonomi*. http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku_pembangunan_ekonomi_contoh_fix.pdf
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2020). *Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Luncurkan Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM*. Ekon.Go.Id. <https://ekon.go.id/info-sektoral/17/89/berita-percepat-pemulihan-ekonomi-nasional-pemerintah-luncurkan-penjaminan-kredit-modal-kerja-umkm>
- Keuangan, K. (n.d.). *Kemenkeu optimistis realisasi penyaluran PMN tahun 2020 akan sesuai target*. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/13070/Kemenkeu-optimistis-realisasi-penyalaran-PMN-tahun-2020-akan-sesuai-target.html
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta :UPP (Issue 2015).
- Mustopadidjaja AR. (2005). *Dimensi-dimensi Pokok Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Newshire, & Alaydrus, H. (n.d.). *Sejak 2005 hingga 2019, Total Suntikan PMN ke BUMN Mencapai Rp233 Triliun*. 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201120/10/1320372/sejak-2005-hingga-2019-total-suntikan-pmn-ke-bumn-mencapai-rp233-triliun>
- Nuh, B. A., & Bakri, O. (1992). *Kamus Indonesia-Arab*. Mutiara Sumber Widya.
- Olsen, S. O. (2009). Guidelines for Government Support to Public-Private Partnership (PPP) Projects. *Central Asia Regional Economic Corporation*, vi. <http://www.carecprogram.org/uploads/events/2009/PPP-Workshop-PRC/Guidelines-for-Government-Support.pdf>
- Pemerintah Pusat. (2003). *Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2003: Badan Usaha Milik Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43919/uu-no-19-tahun-2003>
- Ropke, J. (2009). *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*.
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktek: Erlangga*. [https://books.google.co.id/books?id=O48Js7aV3X0C&printsec=frontcover&dq=koperasi+teori+%26+praktek&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjJXv0oLoAhU06nMBHVQuBLUQ6AEIKDAA#v=onepage&q=koperasi teori %26 praktek &f=false](https://books.google.co.id/books?id=O48Js7aV3X0C&printsec=frontcover&dq=koperasi+teori+%26+praktek&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjJXv0oLoAhU06nMBHVQuBLUQ6AEIKDAA#v=onepage&q=koperasi%20teori%20praktek&f=false)

- Sudrajat, D., Hartanto, B., & Badriatin, T. (2021). *Diktat Sistem Ekonomi Indonesia*. 91–94. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/351953/diktat-sistem-ekonomi-indonesia%0Ahttps://repository.penerbiteureka.com/media/publications/351953-diktat-sistem-ekonomi-indonesia-dc0fdc58.pdf>
- Susanto, A. E., & Firdaus, M. (2002). *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. In *Lembaran Negara Republik Indonesia*. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>

BIODATA PENULIS



Isna Fitria Agustina, asli Sidoarjo lahir pada tanggal 28 Agustus 1978, adalah dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) sejak 2008, saat ini sedang menempuh studi lanjut Program Doktorat Pengembangan Sumberdaya Manusia (S3 PSDM) Universitas Airlangga. Sampai sekarang aktif dalam berbagai kepengurusan dan kegiatan pengabdian masyarakat, diantaranya; di persyarikatan Muhammadiyah sebagai pengurus Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur serta Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Sidoarjo. Dalam kelembagaan pemerintah diangkat sebagai Fasilitator Daerah Pengarusutamaan Gender (Fasda PUG) Kabupaten Sidoarjo yang sudah menelurkan beberapa Naskah Akademik dan pendampingan terkait perempuan dan anak, Kesejahteraan anak jalanan, Perencanaan pembangunan desa, Perencanaan Pembangunan responsif gender, dan lain-lain



Isna Fitria Agustina, asli Sidoarjo lahir pada tanggal 28 Agustus 1978, adalah dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) sejak 2008, saat ini sedang menempuh studi lanjut Program Doktorat Pengembangan Sumberdaya Manusia (S3 PSDM) Universitas Airlangga. Sampai sekarang aktif dalam berbagai kepengurusan dan kegiatan pengabdian masyarakat, diantaranya; di persyarikatan Muhammadiyah sebagai pengurus Majelis Dikdasmen Pimpinan

Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur serta Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Sidoarjo.

Dalam kelembagaan pemerintah diangkat sebagai Fasilitator Daerah Pengarusutamaan Gender (Fasda PUG) Kabupaten Sidoarjo yang sudah menelurkan beberapa Naskah Akademik dan pendampingan terkait perempuan dan anak, Kesejahteraan anak jalanan, Perencanaan pembangunan desa, Perencanaan Pembangunan responsif gender, dan lain-lain

ISBN 978-623-464-086-1 (PDF)



UMSIDA PRESS
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jl. Mojopahit No. 666 B
Sidoarjo, Jawa Timur